

Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.,
Suwarno, S.Sos, M.I.Kom., Mulyati, S.I.Kom, M.I.Kom.

Indonesia

dalam

Board of Peace

Perspektif Media,
Diplomasi Perdamaian,
& Kontroversi



Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.,
Suwarno, S.Sos, M.I.Kom., Mulyati, S.I.Kom, M.I.Kom.

Indonesia dalam *Board of Peace*

Perspektif Media, Diplomasi Perdamaian, & Kontroversi



Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.,
Suwarno, S.Sos, M.I.Kom., Mulyati, S.I.Kom, M.I.Kom.

Indonesia

dalam

Board of Peace

Perspektif Media,
Diplomasi Perdamaian,
& Kontroversi



**Indonesia dalam *Board of Peace*:
Perspektif Media, Diplomasi Perdamaian, & Kontroversi**

© Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom., 2026

Penulis :

Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom.

Suwarno, S.Sos, M.I.Kom.

Mulyati, S.I.Kom, M.I.Kom.

Editor : Asep Rachmatullah

Tata Letak : Indigo Media

Perancang Sampul : Indigo Media

Diterbitkan Oleh :

Indigo Media

Jl. Kalipisir No. 36

Sukasari, Kota Tangerang 15118

Mobile : 0812.1000.7656

Website : www.pustakaindigo.com

pustakaindigo@gmail.com

x + 236 halaman; 15 x 23 cm

Cetakan I, September 2026

ISBN 978-623-7709-94-7

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

.....

Prakata

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas rahmat, karunia, serta pertolongan-NYA sehingga buku *Indonesia dalam Board of Peace: Perspektif Media, Diplomasi Perdamaian, & Kontroversi* ini dapat hadir di tengah pembaca. Salawat dan Salam juga tak lupa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga dan para sahabat. Berpijak dari rasa syukur telah mengantarkan kami menyusun buku ini sebagai ikhtiar untuk memperkaya cakrawala kajian media, khususnya jurnalistik.

Buku ini merupakan hasil pembelajaran dan refleksi dalam mengkaji bagaimana media daring mengonstruksi realitas politik luar negeri Indonesia melalui pemberitaan *Board of Peace* (BoP) di tengah perubahan konstelasi geopolitik global yang semakin masif. Kontroversi mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP menarik perhatian

publik karena memunculkan beragam pandangan mengenai arah diplomasi Indonesia, konsistensi politik luar negeri ‘bebas aktif’, serta posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

Menyikapi fenomena tersebut, buku ini bertujuan menjelaskan bagaimana media mengonstruksi isu mengenai kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP melalui integrasi analisis tematik dan analisis *framing*. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman ikhwal representasi isu dalam pemberitaan media. Analisis kemudian diperkaya dengan perspektif konstruksi realitas sosial dan *Hierarchy of Influences* untuk menjelaskan bagaimana kebijakan redaksional, praktik jurnalistik, dan orientasi ideologis media membentuk cara realitas dihadirkan kepada publik. Melalui pendekatan tersebut, buku ini membahas seputar pemberitaan, sekaligus bertujuan memahami proses pembentukan makna yang tersembunyi di balik teks media.

Dalam konteks tersebut, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi, jurnalistik, dan studi media. Selain menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi, buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana media membentuk cara masyarakat memaknai isu-isu politik luar negeri secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Ibarat pepatah ‘tiada gading yang tak retak’, buku ini tentu tidak luput dari kekurangan. Karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun penulis terima sebagai bagian dari proses belajar. Semoga buku ini bermanfaat dan membuka ruang diskusi serta kajian lebih lanjut tentang media (jurnalistik), politik, diplomasi, dan perdamaian internasional.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan, baik secara akademik, materil, maupun *spirit* atas terbitnya buku ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis atas dukungan dan semangat yang tiada henti hingga buku ini terbit.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: Rektor Budi Luhur *University* (BLU) Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.; Prof. Dr. Prudensius Maring, M.A. selaku Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM); Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK); Dr. Bambang Pujiyono, M.Si. selaku Wakil Direktur Bidang Riset-DRPM BLU; Artyasto Jatisidi, M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi-FKDK; rekan-rekan dosen di FKDK BLU (Harningsih, M.I.Kom, Dr. Nawiroh Vera, M.Si, Dr. Indah Suryawati, M.Si, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si.); serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus. Semoga segala kebaikan tersebut memperoleh balasan yang terbaik dan membawa manfaat yang berkelanjutan.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Charen Audy Paulus, Yolanda Evany, serta Kang Asep Rachmatullah (Indigo Media) yang membantu proses penerbitan buku ini. Atas segala dukungan yang diberikan, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan mendoakan semoga segala kebaikan memperoleh balasan yang terbaik.

Kiranya kita semua di semesta ini senantiasa sehat wal’afiat, sukses selalu dan berbahagia selalu dunia akhirat, serta selalu dalam lindungan dan kasih sayang-NYA. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Salam Budi Luhur

Jakarta, Agustus 2026

.....

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	ix

Bab I

Pendahuluan	1
-------------------	---

Bab II

Media dan <i>Framing</i>	9
A. Framing dalam Pemberitaan Media	9
B. New Media	12
C. Jurnalisme Online	13
D. Pesan dan Makna dalam Media	14

Bab III

<i>Board of Peace</i> (BoP) dalam Sorotan Media	18
A. BoP di Tengah Justifikasi dan Legitimasi	18

B. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP	69
C. Kebijakan Redaksional dalam Memaknai BoP	130
D. BoP dalam Justifikasi dan Evaluasi	135
Bab IV	
Pembingkaian Isu	137
A. Indonesia, BoP, dan Ketegangan Geopolitik	137
B. Kritik Publik dan Krisis Legitimasi BoP	163
C. Kontroversi BoP: Konstruksi Realitas dalam Media Daring Indonesia	195
D. Diferensiasi <i>Framing</i> dan Orientasi Editorial	198
E. Kebijakan Redaksional dan Orientasi Ideologis Media	203
Bab V	
Penutup	214
Daftar Pustaka	218
Tentang Penulis	233

Bab I

.....

Pendahuluan

Perubahan lanskap geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan dinamika yang semakin kompleks dan sulit diprediksi (Zahidi, 2026). Hal ini antara lain ditandai dengan meningkatnya persaingan antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok, eskalasi konflik di Timur Tengah serta menguatnya politik identitas di berbagai negara (Khan et al., 2024). Indonesia sebagai negara dengan tradisi politik luar negeri ‘bebas aktif’ menghadapi tantangan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Prinsip ‘bebas aktif’ menuntut kepiawaian Indonesia untuk memosisikan diri dalam forum internasional tanpa kehilangan legitimasi domestik (Nugraha, 2022: Simatupang & Panggabean, 2022: Afriansyah & Nasu, 2025). Kebijakan luar negeri ini dipertaruhkan manakala bersentuhan dengan isu-isu sensitif misalnya konflik Israel-Palestina (Fadlillah & Komarudin, 2026) ataupun rivalitas geopolitik (Medina et al., 2025).

Keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada awal 2026 menjadi salah satu contoh konkret dari dinamika tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BoP di Washington, D.C., serta penandatanganan perjanjian terkait dengan forum tersebut, diproyeksikan pemerintah sebagai bagian dari kontribusi aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global (Antara, 2026). Namun, kebijakan tersebut tidak diterima secara seragam oleh masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik.

Respons publik menunjukkan perbedaan persepsi yang cukup tajam terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Sebagian pihak memandang langkah tersebut sebagai bentuk diplomasi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sedangkan pihak lain mengkhawatirkan bahwa keterlibatan tersebut berpotensi menggeser orientasi politik luar negeri Indonesia atau tidak sejalan dengan komitmen historis Indonesia terhadap perjuangan Palestina (Hidayatullah.or.id, 2026). Perbedaan persepsi tersebut kemudian berkembang dalam ruang publik, serta dimediasi melalui pemberitaan media massa yang mengonstruksi dan menyajikan berbagai sudut pandang mengenai isu tersebut.

Pada konteks inilah peran pers menjadi sangat penting. McLuhan dikutip Baran & Davis (2009) menyatakan bahwa media merupakan perpanjangan manusia yang memungkinkan penyebaran informasi melintasi ruang dan waktu. Peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan redaksional dalam memilih, menonjolkan, dan menyajikan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial sebagai bagian dari agenda media (West & Turner, 2017). Dengan demikian, proses penyusunan pemberitaan melibatkan berbagai pertimbangan yang memengaruhi

bagaimana suatu realitas dikonstruksi dan disampaikan kepada khalayak.

Berpijak dari kondisi tersebut, pemberitaan dipengaruhi oleh beragam faktor yang melekat pada institusi media itu sendiri. Kondisi ini selaras dengan gagasan Shoemaker & Reese (2014) bahwa sejumlah faktor yang memengaruhi konten media, antara lain rutinitas redaksional, tekanan organisasi, nilai-nilai profesional hingga ideologi media. Rusadi (2015) mengemukakan, ideologi media menjadi kunci untuk memahami bagaimana media menempatkan diri dan beroperasi dalam arena kontestasi sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh berbagai faktor tersebut tercermin dalam cara media memilih, menonjolkan, dan membingkai suatu peristiwa sehingga menghasilkan representasi realitas tertentu bagi khalayak.

Proses pembentukan representasi realitas tersebut sejalan dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan Berger & Luckmann (1966: 1990). Keduanya menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kerangka tersebut kemudian diadaptasi oleh Hamad (2004) dalam kajian media massa. Menurut Hamad, media massa berperan aktif dalam membangun realitas sosial melalui penggunaan simbol dan bahasa, pengemasan isu-isu aktual, dan penempatan agenda media. Melalui proses inilah, realitas yang dikonstruksi media diinternalisasi oleh khalayak sebagai pengetahuan keseharian yang dianggap wajar dan sah.

Realitas yang dikonstruksi media terbentuk melalui isi pesan yang disampaikan serta kebiasaan masyarakat dalam mengakses, menggunakan, dan menjadikan media sebagai rujukan untuk memahami berbagai peristiwa sosial. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa

pengaruh media selain pada kontennya, juga pada praktik sosial yang mengiringi penggunaannya. Dalam konteks inilah, Couldry (2003) memperkenalkan konsep ‘ritual media’ yaitu berbagai praktik yang memperkuat anggapan bahwa media merupakan pusat akses masyarakat terhadap realitas sosial. Melalui praktik-praktik tersebut, masyarakat semakin menerima dan menganggap wajar bahwa media memiliki posisi sentral dalam membentuk pemahaman mereka tentang realitas sosial. Posisi sentral tersebut sekaligus memberikan ruang bagi media untuk menentukan bagaimana suatu realitas direpresentasikan kepada khalayak.

Dengan posisi tersebut, proses pembentukan realitas oleh media menjadi penting untuk dicermati. Realitas yang disajikan media bukanlah cerminan objektif atas suatu peristiwa, melainkan hasil dari proses seleksi, penafsiran, dan penyusunan informasi (Mast & Temmerman, 2021; Fadeji et al., 2025). Oleh karena itu, setiap pemberitaan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi perspektif, nilai, dan kepentingan tertentu yang diusung media.

Dalam konteks tersebut, sejumlah literatur menunjukkan bahwa orientasi ideologis, struktur kepemilikan media, serta segmentasi audiens turut memengaruhi konstruksi narasi pemberitaan (Agarwal & Priti, 2022; Baccino, 2025; Aktari, 2025; Psychari, 2025; Theine et al., 2025). Dengan kata lain, dalam praktik redaksional, berita dibentuk melalui penentuan sudut pandang yang dipengaruhi oleh orientasi media dan karakteristik audiens (Truyens & Picone, 2021; Belair-Gagnon et al., 2020; Shin & Miller, 2025; Dodds et al., 2023; Kristensen & Bro, 2024). Konsekuensinya, narasi pemberitaan yang dihasilkan akan menampilkan penekanan terhadap tema-tema tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana suatu peristiwa direpresen-

tasikan media, diperlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan menafsirkan tema-tema yang muncul dalam teks berita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, buku ini menggunakan analisis tematik dengan merujuk pada Braun & Clarke (2012) yang mendefinisikannya sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan tema-tema dalam data kualitatif. S. Ahmed & Matthes (2017) serta S. K. Ahmed et al. (2025) menambahkan bahwa analisis tematik berfokus pada tema-tema yang paling menonjol, bermakna, koheren, dan memiliki nilai analitis. Dalam konteks penelitian media, tema-tema dalam teks berita digunakan untuk memahami bagaimana suatu peristiwa direpresentasikan melalui narasi pemberitaan yang diproduksi dalam *newsroom*.

Relevansi analisis tematik tersebut mendorong perlunya menelaah bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya pada kajian media yang membahas isu politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejumlah penelitian mengkaji pemberitaan media mengenai isu politik dan kebijakan luar negeri (Assefa, 2024; Masduki et al., 2023; Setiawati & Roziqin, 2024; Hkikmat & Komara, 2024; Rahmadan & Setiawati, 2021). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menempatkan struktur tematik sebagai dasar untuk mengidentifikasi pembentukan isu dalam teks media. Oleh karena itu, kajian media mengenai isu politik dan kebijakan luar negeri Indonesia yang menggunakan analisis tematik sebagai pendekatan utama masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi buku yang mengkaji isi pemberitaan, serta mengidentifikasi bagaimana struktur tematik membentuk representasi suatu peristiwa dalam media. Atas dasar itu, buku ini menawarkan kebaruan dengan mengidentifikasi struktur

isu melalui analisis tematik untuk menjelaskan proses konstruksi realitas sebagai representasi media. Melalui pendekatan tematik analisis, buku ini bermaksud mengungkap kecenderungan konstruksi ideologis yang tercermin dalam praktik jurnalisme daring di Indonesia.

Di sisi lain, media berperan membentuk cara publik memaknai realitas melalui seleksi isu, penekanan tertentu, dan representasi yang ditampilkan (Entman, 2003). Pandangan ini diperkuat Zaklama (2025) yang menjelaskan bahwa pembingkai media dilakukan dengan menonjolkan atau mengurangi aspek tertentu sehingga memengaruhi cara publik memahami, menafsirkan, dan menilai suatu peristiwa, isu, maupun individu.

Dengan demikian, pemberitaan polemik Indonesia bergabung dalam BoP menjadi penting dikaji untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dikomunikasikan melalui pembingkai isu yang direpresentasikan melalui perspektif media.

Lebih lanjut, sejauh ini kajian *framing* media berkembang luas dalam berbagai konteks, mulai dari konflik internasional, kebijakan luar negeri, hingga isu domestik. Secara umum, media menyampaikan fakta, serta aktif merepresentasikan realitas sosial-politik melalui pilihan bahasa, sudut pandang, dan struktur narasi.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian memperlihatkan relasi framing media dengan kepentingan politik dan kebijakan negara. Maksum (2025) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberitaan Presidensi G20 cenderung menonjolkan narasi keberhasilan negara, sementara kritik terhadap isu domestik relatif terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian Martha et al. (2022) bahwa media nasional cenderung mendukung posisi kebijakan luar negeri

Indonesia. Di sisi lain, Fauzulhaq & Harwinda (2025) memperlihatkan perbedaan konstruksi narasi antar media terkait kontroversi Indonesia dalam BRICS. Sedangkan Juidah & Pratiwi (2025) menunjukkan bahwa *framing* dapat memperkuat legitimasi pemerintah maupun menampilkan kritik publik.

Di tingkat global, Arslan (2024) maupun Paun (2022) menunjukkan bahwa *framing* media berkaitan erat dengan identitas nasional serta relasi antara media dan negara. Konsekuensinya, praktik *framing* tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks politik, ideologi, dan kepentingan yang melingkupi institusi media. Ini tercermin dalam temuan Almahallawi & Awais (2025) serta Wang et al. (2024) yang mengungkapkan perbedaan mencolok antara media Barat dan Timur dalam membingkai konflik. Dengan demikian, implikasinya bahwa *framing* media mencerminkan posisi institusi media, sekaligus beririsan terhadap cara masyarakat memahami dan menilai suatu peristiwa, terutama dalam konteks politik.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa *framing* media tidak dapat dilepaskan dari orientasi geopolitik dan kepentingan editorial yang membentuk konstruksi realitas dalam pemberitaan. Konstruksi realitas yang dihasilkan media kemudian menjadi dasar bagi publik dalam memahami berbagai isu, khususnya isu-isu politik.

Dalam sistem demokrasi, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena media massa berperan sebagai sumber utama informasi bagi publik. Fuhat & Wahab (2024) mengemukakan bahwa media memengaruhi persepsi publik melalui pembedingkaian isu politik. Proses tersebut berperan penting dalam membentuk opini masyarakat, mengarahkan diskursus publik, serta mengonstruksi narasi mengenai berbagai isu politik.

Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perbandingan antar media dalam menyikapi beragam isu-isu besar yang aktual. Kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana media mengonstruksi isu kebijakan luar negeri, dalam hal ini isu BoP yang kontroversial dan aktual, relatif masih terbatas. Selain itu, pendekatan *framing* dalam korpus data (berita BoP) untuk menyingkap representasi media, sejauh ini relatif masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, buku ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji representasi media atas kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BoP pada Kompas.com dan Republika.co.id edisi 1-4 Maret 2026. Dengan memadukan analisis tematik dan pembingkai-
kaan isu, buku ini bertujuan mengeksplorasi fenomena polemik keterlibatan Indonesia dalam BoP secara lebih kontekstual. Artinya, riset ini menempatkan kedua pendekatan secara terpisah dalam satu desain analisis untuk memperjelas arah analisis dalam menelaah pemberitaan isu kebijakan luar negeri di media massa. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian jurnalisme kontemporer dalam menyikapi isu kebijakan luar negeri yang memicu perdebatan publik.

Bab II

.....

Media dan *Framing*

A. *Framing* dalam Pemberitaan Media

Framing merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi komunikasi untuk memahami bagaimana media membentuk makna atas peristiwa. Dalam perspektif ini, berita sebagai hasil konstruksi yang melibatkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Melalui proses tersebut, media berperan dalam menentukan bagaimana suatu isu dipahami oleh khalayak.

Entman (2003) menyatakan *framing* meliputi definisi masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian, membangun makna pemberitaan. Menurut Entman bahwa *framing* bekerja melalui empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*), penentuan penyebab (*causal interpretation*), penilaian moral (*moral evaluation*), serta rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Keempat elemen ini menunjukkan bahwa *framing* tidak hanya berkaitan dengan bagaimana

suatu peristiwa disajikan, tetapi juga bagaimana makna dibangun dan diarahkan dalam pemberitaan.

Pada perkembangannya, kajian *framing* terus mengalami penguatan melalui studi-studi kontemporer. Penelitian terbaru seperti yang dikemukakan oleh Zaklama (2025), menegaskan bahwa *framing* tetap relevan dalam konteks media digital yang dinamis, di mana produksi dan distribusi informasi berlangsung secara cepat dan berlapis. Dalam situasi tersebut, *framing* terbentuk di tingkat redaksi yang dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor dalam ruang publik digital.

Selain itu, Entman (2010) melalui konsep *cascading activation* menunjukkan bahwa proses *framing* tidak berlangsung secara tunggal, melainkan mengalir melalui relasi kekuasaan antara pemerintah, elite, media, dan publik. Hal ini menegaskan bahwa *framing* merupakan proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks politik serta struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Dengan demikian, *framing* sebagai mekanisme penting dalam produksi makna media yang mencerminkan realitas, serta membentuk cara pandang khalayak terhadap suatu isu. Dalam penelitian ini, teori *framing* digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana media membingkai isu kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Berita

Berita merupakan produk utama jurnalistik yang berfungsi menyampaikan informasi kepada publik tentang peristiwa yang memiliki nilai penting, aktual, dan relevan. Dalam perspektif klasik, berita sebagai laporan faktual mengenai realitas. Namun, dalam perkem-

bangun kajian komunikasi modern, berita tidak lagi dilihat sebagai cerminan realitas yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses seleksi dan penyusunan informasi oleh media (McQuail, 2010). Dalam konteks ini, peneliti memandang bahwa berita dipengaruhi oleh perspektif, kepentingan, serta praktik profesional dalam ruang redaksi. Dengan demikian, proses pembentukan berita tersebut tetap berada dalam kerangka norma dan prinsip jurnalistik yang mengatur bagaimana realitas disajikan kepada publik.

Dalam praktik jurnalistik, kualitas berita ditentukan isi informasi, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan profesi jurnalistik. Kovach & Rosenstiel (2021) menekankan bahwa jurnalisme memiliki elemen-elemen esensial yang semestinya diterapkan oleh setiap awak pers, antara lain kebenaran, loyalitas kepada warga, disiplin verifikasi, independensi dari sumber, serta fungsi sebagai pemantau kekuasaan. Elemen-elemen ini menunjukkan bahwa berita sebagai produk informasi serta memiliki tanggung jawab etis dalam menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain itu, Kovach dan Rosenstiel menekankan pentingnya penyajian berita yang proporsional dan komprehensif, sehingga publik dapat memahami isu secara utuh. Dalam konteks ini, jurnalis menyampaikan fakta dengan memilih sudut pandang tertentu yang dianggap relevan dan penting. Proses ini menunjukkan bahwa berita selalu melibatkan keputusan editorial yang berpengaruh terhadap cara suatu peristiwa direpresentasikan.

Di sisi lain, Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa produksi berita dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari individu jurnalis hingga struktur organisasi media. Hal ini semakin menegaskan

bahwa berita tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu berada dalam konteks sosial dan institusional tertentu.

Dalam era media daring, karakteristik berita mengalami perubahan signifikan. Kecepatan distribusi informasi dan tuntutan aktualitas membuat media harus bekerja lebih cepat dalam memproduksi berita (Deuze, 2003). Kondisi ini dapat mempengaruhi proses verifikasi dan kedalaman informasi, sehingga menuntut jurnalis menjaga prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

Dalam penelitian ini, berita sebagai teks media berfungsi menyampaikan informasi, sekaligus merepresentasikan cara media dalam menampilkan suatu isu. Oleh karena itu, analisis terhadap berita menjadi penting untuk memahami bagaimana isu kontroversi terkait BoP disajikan kepada publik.

B. New Media

New media merujuk pada perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan dalam cara produksi dan distribusi informasi. Deuze (2003) menjelaskan bahwa media daring memiliki karakteristik utama berupa kecepatan, interaktivitas, dan fleksibilitas dalam penyajian informasi.

Dalam konteks jurnalistik, *new media* mempercepat penyebaran berita secara *real-time*, sehingga publik dapat mengakses informasi dengan cepat. Namun, kondisi ini menuntut media untuk bekerja lebih cepat sehingga berpengaruh terhadap proses verifikasi dan kedalaman informasi.

Selain itu, *new media* membuka ruang interaksi antara media dan audiens. Pembaca dapat memberikan respons secara langsung

melalui komentar atau media sosial, sehingga menciptakan hubungan yang lebih dinamis antara media dan publik.

Perkembangan *new media* juga memengaruhi cara media dalam menyajikan berita. Artinya, media penting dalam menyampaikan informasi dengan mengemasnya dalam bentuk yang menarik dan mudah diakses oleh audiens.

Dalam buku ini, *new media* menjadi konteks yang penting dalam memahami bagaimana pemberitaan diproduksi dan didistribusikan dalam media daring.

C. Jurnalisme *Online*

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi signifikan dalam praktik jurnalisme, terutama dengan hadirnya internet sebagai medium utama distribusi informasi. Dalam konteks ini, jurnalisme *online* sebagai bentuk praktik jurnalistik yang memiliki karakteristik dan logika tersendiri. Deuze (2003) menegaskan bahwa jurnalisme *online* berkembang melalui pemanfaatan fitur khas media digital yang tidak dimiliki oleh media tradisional.

Salah satu ciri utama jurnalisme *online* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan *hypertextuality*, *interactivity*, dan *multimediality* dalam proses produksi dan penyajian berita. *Hypertextuality* menjadikan suatu berita terhubung dengan informasi lain melalui tautan, sehingga pembaca dapat menelusuri konteks yang lebih luas secara mandiri. Sementara itu, *interactivity* membuka ruang bagi audiens menjadi penerima informasi, namun dapat berpartisipasi melalui komentar, diskusi, maupun berbagi konten. Adapun *multimediality* menghadirkan keberagaman format penyajian, seperti teks,

gambar, audio, dan video, yang memperkaya pengalaman konsumsi berita.

Lebih lanjut, Deuze mengidentifikasi bahwa jurnalisme *online* hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah *mainstream news sites*, yaitu *platform* berita yang dikelola oleh institusi media arus utama. Dalam model ini, produksi konten masih didominasi redaksi, sehingga proses seleksi dan penonjolan isu tetap berada dalam kendali jurnalis. Meskipun demikian, keberadaan fitur digital tetap memengaruhi cara informasi disusun dan disampaikan, sehingga berimplikasi pada cara realitas dikonstruksi di ruang publik.

Dengan demikian, jurnalisme *online* menghadirkan perubahan pada aspek teknis, serta memengaruhi dinamika produksi makna dalam pemberitaan. Karakteristik digital yang melekat pada media *online* menjadikan proses konstruksi realitas semakin kompleks. Ciri khas tersebut melibatkan pilihan redaksional didukung perangkat teknologi yang membingkai penyajian informasi. Dalam buku ini, pemahaman terhadap jurnalisme *online* menjadi penting untuk melihat bagaimana media daring mengelola dan membingkai isu, khususnya dalam konteks pemberitaan mengenai kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

D. Pesan dan Makna dalam Media

Media massa sebagai saluran penyampaian informasi, dan sebagai ruang produksi makna atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Berita yang disajikan kepada memuat fakta, sekaligus mengandung pesan-pesan tertentu yang terbentuk melalui proses seleksi dan penyajian informasi. Pesan dalam media melalui teks mengandung gagasan dalam memandang realitas yang merefleksikan

ideologi media itu sendiri (Pawito, 2014). Hal ini membuat pembaca tanpa sadar ikut memahami realitas sesuai sudut pandang yang dibangun media secara perlahan dan halus. Proses pembentukan makna tersebut berkaitan erat dengan *framing*, yaitu cara media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas.

Dalam praktik jurnalistik, pemilihan isu, penentuan sudut pandang, serta penekanan pada aspek tertentu menjadi bagian dari proses yang memengaruhi bagaimana suatu peristiwa dipahami khalayak (McQuail, 2010; Eriyanto, 2002). Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa proses tersebut menunjukkan adanya peran aktif media dalam membingkai realitas, sehingga makna yang diterima publik merupakan hasil konstruksi, bukan pantulan realitas semata.

Proses tersebut menunjukkan bahwa pesan dalam media tidak bersifat netral. Informasi yang disampaikan melalui pertimbangan redaksional yang dipengaruhi oleh nilai berita, kebijakan media, serta konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap berita membawa makna tertentu yang dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu isu. Dalam hal ini, media juga sebagai ‘aktor’ yang turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial (McQuail, 2010). Dalam kerangka ini, penulis melihat bahwa peran media dalam merepresentasikan realitas, maupun mengarahkan pemaknaan publik melalui penonjolan aspek tertentu dan pengabaian aspek lainnya.

Dalam konteks media digital, produksi pesan menjadi semakin dinamis. Informasi disajikan dalam berbagai format serta didistribusikan secara cepat kepada khalayak yang luas. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya beragam interpretasi terhadap suatu peristiwa, seiring dengan meningkatnya akses terhadap berbagai sumber

informasi. Namun demikian, peran redaksi tetap menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana pesan disusun dan disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, pemahaman terhadap pesan dan makna dalam media massa menjadi penting dalam buku ini untuk melihat bagaimana suatu isu dikemas dalam pemberitaan. Setiap pilihan dalam penyajian informasi berpotensi menghasilkan penekanan makna tertentu, yang memengaruhi cara khalayak memahami realitas yang ditampilkan media. Perspektif ini menjadi landasan awal untuk menelaah lebih lanjut bagaimana media membingkai isu dalam pemberitaan.

Board of Peace (BoP)

Board of Peace (BoP) merupakan inisiatif kerja sama internasional yang muncul dalam konteks meningkatnya eskalasi konflik global, khususnya terkait isu Palestina. Gagasan awal pembentukan BoP diarahkan sebagai forum kolektif untuk mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, sekaligus merespons tekanan internasional terhadap perlunya penyelesaian konflik yang berkelanjutan (brin.go.id, 2026). Inisiatif ini tak dapat dilepaskan dari peran Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat dan menjadi figur sentral dalam mendorong pembentukan forum tersebut.

Secara formal, BoP ditandatangani pada akhir Januari 2026 dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Davos, Swiss yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara. Forum tersebut menjadi momentum awal bagi negara-negara yang terlibat untuk menyatakan komitmen dalam mendukung upaya perdamaian, khususnya terkait konflik di Palestina. Indonesia turut ambil bagian dalam pertemuan tersebut

melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto, yang mencerminkan posisi aktif Indonesia dalam dinamika diplomasi internasional.

Selanjutnya, BoP menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdananya di Washington, Amerika Serikat pada pertengahan Februari 2026. KTT ini semula diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan agenda konkret bagi penyelesaian konflik dan penguatan kerja sama antarnegara. Hanya saja, dalam waktu yang relatif singkat setelah forum tersebut berlangsung, terjadi eskalasi konflik yang ditandai dengan agresi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Peristiwa ini memunculkan kontradiksi terhadap semangat perdamaian yang sebelumnya diusung dalam kerangka BoP.

Kondisi tersebut menjadikan BoP sebagai forum diplomatik, sekaligus sebagai isu yang memicu perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, BoP diposisikan sebagai upaya kolektif untuk menjaga perdamaian, khususnya di Palestina. Namun di sisi lain, dinamika politik global yang berkembang justru menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen normatif dan praktik kekuasaan. Oleh karena itu, BoP menjadi relevan untuk dikaji dalam buku ini, terutama dalam melihat bagaimana media mengonstruksi dan membingkai isu tersebut di tengah kompleksitas kepentingan global.

Dengan demikian, BoP dalam buku ini sebagai isu kebijakan yang menjadi perhatian media dan publik. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, BoP melibatkan berbagai kepentingan yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam buku ini, BoP diposisikan sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana media merepresentasikan isu kebijakan luar negeri dalam pemberitaan.

Bab III

.....

***Board of Peace (BoP)* dalam Sorotan Media**

A. BoP di Tengah Justifikasi dan Legitimasi

Sepuluh berita terkait kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP pada Kompas.com (1-4 Maret 2026) dipilih secara purposif. Dengan menggunakan analisis tematik dari Braun dan Clarke (2012), pembahasan ini disusun berdasarkan kategori tema sebagai unit analisis yang dihasilkan melalui proses koding awal. Dalam konteks ini, penerapan metode analisis tematik menuntut keterlibatan penuh peneliti, ketelitian, transparansi, serta konsistensi selama proses analisis (S. K. Ahmed et al., 2025; Christou, 2023; Naeem et al., 2023; Byrne, 2022; Pearson et al., 2025). Selanjutnya, kategorisasi tema yang dihasilkan melalui analisis tematik digunakan sebagai bahan pembahasan.

Hasil pengkodean menunjukkan empat kategori tema yaitu: 1) Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP (empat berita); 2) Justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP (tiga berita); 3) Legitimasi BoP dipertanyakan (dua berita); 4) Delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP (satu berita). Mengutip gagasan Byrne (2022) bahwa

pengkodean berkontribusi menghasilkan tema yang bermakna dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tematik “Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP” merefleksikan pemberitaan yang memaparkan evaluasi kebijakan secara umum, serta menilai dampak bergabungnya Indonesia dalam BoP berikut signifikansinya melalui kritik, desakan atau protes yang berasal dari segenap masyarakat. Tema “Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam BoP” memperlihatkan bagaimana pemberitaan mengartikulasikan alasan dan argumentasi yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam BoP. Justifikasi hadir melalui pernyataan resmi pemerintah, pertimbangan strategis, serta penekanan pada kepentingan nasional yang dianggap relevan dengan dinamika global.

Sementara itu, tematik “Legitimasi BoP Dipertanyakan” mencerminkan kecenderungan pemberitaan berisi keraguan dan kritik terhadap dasar legitimasi BoP, baik dari segi kewenangan, peran, maupun relevansinya dalam konteks internasional yang terus berubah. Hal ini bersinggungan dengan tematik “Delegitimasi Kepemimpinan Internasional dalam BoP”, yang menyorot menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aktor-aktor global. Narasi yang berkembang dalam tema ini kerap mengangkat persoalan kredibilitas dan efektivitas kepemimpinan internasional dalam merespons situasi global.

Dengan demikian, kategorisasi tematik ini penting untuk memastikan keterkaitan antara data empiris dengan fokus analisis yang ditetapkan. Keempat kategori tematik ini selanjutnya diuraikan untuk menunjukkan kecenderungan makna yang tersembunyi di balik pemberitaan media.

- 1. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam *Board of Peace*
 - a. MUI Desak RI Keluar dari *Board of Peace* Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Tabel 1. Berita Kompas.com Edisi 1 Maret 2026 (15:58 WIB)

Judul berita: MUI Desak RI Keluar dari *Board of Peace* Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Sumber: <https://cahaya.kompas.com/aktual/26Co1135821990/mui-desak-ri-keluar-dari-board-of-peace-usai-serangan-as-israel-ke-iran>

JAKARTA, KOMPAS.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar dari *Board of Peace* (BoP) menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Sikap ini disampaikan dalam Tausiyah resmi MUI tertanggal 1 Maret 2026. MUI menilai keterlibatan Amerika dalam BoP memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina. Desakan tersebut tertuang dalam surat bernomor Kep28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI menyatakan bahwa Amerika memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, namun efektivitasnya dipertanyakan.

MUI: BoP Dinilai Tidak Efektif untuk Kemerdekaan Palestina

MUI menilai strategi yang dijalankan melalui *Board of Peace* belum menunjukkan arah menuju perdamaian yang adil bagi Palestina. "Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad (1/3/2026). MUI juga menyoroti tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melakukan serangan bersama Israel terhadap Iran sehingga memicu eskalasi konflik regional.

Serangan AS-Israel ke Iran dan Eskalasi Konflik

MUI menilai serangan militer Israel dan Amerika terhadap Iran, yang kemudian dibalas Iran, merupakan eskalasi serius dan berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang lebih luas. "Situasi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar. Ini adalah tugas dan tanggung jawab semua negara untuk mewujudkan perdamaian agar dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap warga sipil," tegasnya. MUI menilai motif strategis di balik serangan tersebut patut diduga sebagai upaya melemahkan posisi Iran di kawasan dan sekaligus membatasi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

MUI Serukan PBB dan OKI Bertindak

MUI menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. "MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," kata MUI. MUI juga menegaskan bahwa serangan Amerika dan Israel bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta Pembukaan UUD 1945 yang menekankan pentingnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Duka atas Gugurnya Ali Khamenei

Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran dilaporkan menyebabkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. MUI menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. "MUI menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/2026). Kita menyampaikan inna ilaihi raji'un Sebagai syahada kita doakan semoga menjadi penghuni surga, Aamin," tulisnya.

Seruan Qunut Nazilah dan Hentikan Eskalasi

MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan qunut nazilah serta berdoa memohon pertolongan dan perlindungan Allah SWT bagi umat Muslim yang mengalami kesulitan dan penindasan. MUI memahami bahwa serangan Iran ke negara teluk

merupakan bentuk pembalasan atas serangan Amerika dan Israel yang menyasar pangkalan militer.” Karena itu, untuk menghindari eskalasi lebih luas, Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB,” tulis dalam poin ketiga. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, MUI mendorong berbagai negara untuk mengambil peran sebagai juru damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi instrumen tekanan politik demi mengamankan dominasi regional Israel atas Palestina.

Koding awal: Ormas Islam desak RI ke luar dari BoP

Analisis berita berjudul “MUI Desak RI Keluar dari *Board of Peace* Usai Serangan AS-Israel ke Iran” memperlihatkan berita tersebut membangun konstruksi mengenai krisis kredibilitas BoP di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Fokus utama pemberitaan diarahkan pada sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP pasca serangan militer AS- Israel terhadap Iran. Dalam narasi yang dibangun, polemik mengenai BoP sebagai persoalan hubungan internasional, sekaligus sebagai isu yang menyangkut konsistensi moral, kredibilitas lembaga internasional, dan komitmen terhadap nilai-nilai perdamaian yang menjadi dasar pembentukan organisasi tersebut.

Narasi berita memperlihatkan bahwa kritik MUI berawal dari kontradiksi antara tujuan BoP sebagai forum yang mengedepankan perdamaian dengan tindakan militer yang dilakukan oleh salah satu aktor yang berada di dalam struktur organisasi tersebut. Keberadaan Amerika Serikat dalam BoP dipandang memunculkan dilema karena negara tersebut terlibat dalam operasi militer bersama Israel terhadap

Iran. Dalam konteks tersebut, pemberitaan menegaskan bahwa keterlibatan Amerika “memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kredibilitas BoP dipertanyakan karena munculnya keraguan terhadap kesesuaian antara komitmen normatif yang diusung organisasi dengan tindakan nyata para aktor di dalamnya.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa legitimasi suatu organisasi internasional ditentukan oleh tujuan yang tercantum dalam pembentukannya, maupun oleh konsistensi para anggotanya dalam menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar organisasi tersebut. Ketika negara yang terlibat dalam forum perdamaian tetap menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik, muncul persepsi bahwa nilai-nilai perdamaian yang dikedepankan kehilangan ‘ruh’ moralnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap organisasi internasional dipengaruhi oleh keselarasan antara retorika diplomasi dan praktik kebijakan yang dijalankan oleh para aktor yang terlibat dalam BoP.

Kritik tersebut semakin diperkuat melalui penilaian MUI bahwa BoP “tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap BoP didasarkan pada respons organisasi terhadap konflik Iran, serta dikaitkan dengan persoalan Palestina yang menjadi salah satu isu utama dalam diplomasi internasional. Dengan demikian, efektivitas BoP dipertanyakan karena dinilai belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata terhadap penyelesaian konflik maupun pemenuhan hak-hak masyarakat Palestina sesuai dengan prinsip perdamaian dan keadilan internasional.

Secara umum, pemberitaan membingkai BoP sebagai organisasi yang menghadapi tantangan serius terkait legitimasi, baik dari sisi kinerja maupun aspek moral dan politik para aktor yang berada di dalamnya. Narasi yang dibangun memperlihatkan bahwa praktik kekerasan militer bisa mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang mengusung agenda perdamaian internasional. Dalam konteks tersebut, kredibilitas organisasi didasarkan pada komitmen normatif yang disampaikan dalam berbagai forum diplomatik, maupun dari kemampuan mewujudkan nilai-nilai perdamaian melalui kebijakan dan tindakan nyata di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

b. Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Tabel 2. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (12:52 WIB)

Judul Berita: Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/12525441/anggota-dpr-desak-indonesia-keluar-dari-bop-usai-serangan-as-israel-ke-iran>

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari *Board of Peace* (BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Hasanuddin mengatakan, partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.

“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2026). Menurut dia, langkah tersebut justru mengembalikan posisinya sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan independen.

“Serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” kata Hasanuddin. Hasanuddin khawatir keputusan tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.

“Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” tutur Hasanuddin. Di samping itu, keterlibatan Indonesia di Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump telah membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut. “Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” kata Hasanuddin.

Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Hasanuddin berpandangan, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. “Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ujar dia. Dia juga mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.

“Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ucap Hasanuddin.

Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk partisipasi Tentara Nasional Indonesia dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. “Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia,” ujar Hasanuddin.

Koding awal: Wakil rakyat desak Indonesia ke luar dari BoP

Analisis terhadap pemberitaan Kompas.com berjudul “Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran” menunjukkan bahwa isu keanggotaan Indonesia dalam BoP diposisikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pemberitaan tersebut menyorot munculnya desakan dari anggota DPR agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap posisi Indonesia di dalam organisasi tersebut pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Desakan tersebut sebagai respons atas situasi konflik yang terjadi maupun sebagai bentuk refleksi terhadap konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini berlandaskan prinsip bebas aktif.

Dalam narasi berita, kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP tampak melalui argumentasi bahwa keberadaan Indonesia di dalam organisasi tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar diplomasi nasional. Hal ini ditegaskan oleh TB Hasanuddin yang menyatakan bahwa “partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif” karena organisasi tersebut dinilai membiarkan agresi militer terhadap negara lain. Pernyataan tersebut menunjukkan

adanya penilaian bahwa sikap pasif organisasi terhadap tindakan militer dapat memengaruhi citra negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik melalui jalur damai dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.

Lebih jauh, pemberitaan tersebut mencerminkan kekhawatiran mengenai konsekuensi diplomatik yang bisa muncul apabila Indonesia tetap mempertahankan keanggotaannya tanpa melakukan evaluasi. Dalam konteks hubungan internasional, persepsi publik global terhadap posisi suatu negara sering kali dipengaruhi oleh afiliasi dan keterlibatannya dalam organisasi internasional. Karena itu, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan dipersepsikan sebagai pihak yang “mendukung kepentingan AS dan Israel.” Persepsi semacam ini dinilai berpotensi mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten menyuarakan perdamaian, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, serta menolak segala bentuk agresi yang bertentangan dengan hukum internasional.

Dengan demikian, pemberitaan Kompas.com membingkai evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP sebagai bagian dari menjaga konsistensi moral, konstitusional, dan arah politik luar negeri Indonesia agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta prinsip bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi nasional. Dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, konsistensi terhadap nilai-nilai tersebut dipandang penting untuk mempertahankan legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap posisi Indonesia dalam berbagai isu perdamaian dunia.

c. Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari BoP

Tabel 3. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (20:18 WIB)

Judul Berita: Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari BoP

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/20183401/senior-pks-minta-prabowo-pertimbangkan-cabut-dari-bop>

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius opsi keluar dari *Board of Peace* (BoP), jika lembaga tersebut justru memperluas perang dan bukan menghadirkan perdamaian. Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menanggapi munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menyusul agresi militer ke Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

“Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah keberadaan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang ini *gitu loh*. Karena mestinya damai malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Hidayat, sejak awal BoP disebut dibentuk untuk menghadirkan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik lainnya.

Namun, dia menilai kondisi yang terjadi saat ini justru berlawanan dengan tujuan tersebut.

“BoP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lainnya. Tapi ternyata justru sekarang justru yang menciptakan BoP justru malah mengembangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lembaga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan,” kata Hidayat.

Dia juga menilai legitimasi moral BOP patut dipertanyakan apabila perang tidak kunjung dihentikan. “Legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan,” kata dia. Hidayat kemudian menyinggung kembali sikap pemerintah yang sempat menyatakan kesiapan untuk mengambil opsi keluar dari BOP, apabila tujuan utama organisasi tersebut tidak terealisasi. “Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para mantan Menlu, Pak Wamenlu *kan* disampaikan oleh Kemenlu atau oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari BoP kalau ternyata BoP tidak merealisasikan apa yang menjadi tujuan utama,” tutur Hidayat.

Tujuan utama itu, lanjut Hidayat, antara lain menghentikan perang, menghadirkan bantuan kemanusiaan, serta menciptakan kondisi agar Palestina dapat merdeka.

“Nah, kalau ternyata perang malah *enggak* dihentikan malah diperlebar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang, untuk kemudian masuk BOP untuk menghentikan perang. Masuk BOP untuk menghadirkan perdamaian, masuk BOP untuk membela Palestina merdeka,” ucapnya. “Jadi saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mempertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60 ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar Indonesia keluar dari BOP,” pungkasnya.

Koding Awal: Tokoh PKS desak Indonesia ke luar dari BoP

Analisis terhadap pemberitaan berjudul “*Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari Board of Peace (BoP)*” menunjukkan bahwa fokus utama pemberitaan diarahkan pada munculnya desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indonesia dalam *Board of Peace (BoP)* usai agresi militer AS- Israel terhadap Iran. Berita tersebut membingkai polemik ini sebagai bagian dari perdebatan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia

di tengah meningkatnya eskalasi konflik internasional. Dalam konstruksi pemberitaan, keanggotaan Indonesia di BoP dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam forum internasional, serta kaitannya dengan berbagai konsekuensi politik dan diplomatik yang dapat memengaruhi posisi Indonesia di mata dunia.

Narasi berita memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP justru dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakan yang dinilai memperluas konflik bersenjata. Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid yang menegaskan bahwa Indonesia jangan sampai menjadi “alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang.” Pernyataan ini menunjukkan adanya penilaian bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam organisasi internasional memiliki implikasi terhadap persepsi publik global, terutama ketika organisasi tersebut dinilai tidak mampu menunjukkan sikap yang tegas terhadap konflik yang berlangsung. Dengan demikian, posisi Indonesia dipandang perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tindakan yang bertentangan dengan semangat perdamaian.

Lebih lanjut, kritik terhadap keberadaan Indonesia di dalam BoP semakin diperkuat melalui pandangan bahwa organisasi tersebut dinilai mengalami pergeseran dari tujuan awal pembentukannya. Hidayat menyampaikan bahwa BoP yang semula diharapkan menjadi wadah untuk membangun dialog dan menciptakan perdamaian justru “mengembangkan perang.” Pernyataan tersebut menjadi landasan penting dalam pemberitaan karena menunjukkan keraguan terhadap efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi yang sesuai dengan nama dan tujuan pendiriannya. Dalam konteks ini, kritik diarahkan pada dinamika konflik internasional, serta pada relevansi

organisasi tersebut sebagai mitra yang sejalan dengan prinsip-prinsip diplomasi Indonesia.

Pemberitaan membangun pemahaman bahwa evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP diposisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan hubungan internasional Indonesia. Amanat untuk menolak penjajahan, menghormati kemanusiaan, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi acuan utama yang harus dijaga dalam setiap keputusan diplomatik.

Secara umum, pemberitaan membingkai evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP sebagai langkah yang penting untuk menjaga konsistensi arah politik luar negeri Indonesia. Narasi yang dibangun memperlihatkan bahwa pemerintah diharapkan mempertimbangkan kepentingan diplomasi jangka pendek, maupun memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap selaras dengan prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia. Dengan demikian, evaluasi terhadap BoP merupakan cara mempertahankan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian serta konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

d. Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak

Tabel 4. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (04:00 WIB)

Judul Berita: Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/04000071/hikmahanto—keanggotaan-ri-di-bop-perlu-ratifikasi-dpr-semoga-ditolak>

JAKARTA, KOMPAS.com - Profesor hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di *Board of Peace* (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah. “Menurut saya perlu dilakukan dengan cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi dengan harapan DPR menolaknya,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

Tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Dia berharap DPR bisa menolak masuknya Indonesia ke BoP.

“Kita bisa tidak menjadi anggota bila proses pengesahan piagam BoP ditolak oleh DPR,” jelas dia.

Hikmahanto berpandangan bahwa secara internasional, Indonesia telah tercatat sebagai anggota BoP berdasarkan ketentuan Pasal 11 Piagam BOP, namun menurut Hikmahanto pengesahan parlemen di dalam negeri tetap perlu.

Koding Awal: Ratifikasi DPR

Analisis berita berjudul “Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak” mengedepankan fokus utama pemberitaan diarahkan pada polemik mengenai keanggotaan Indonesia dalam BoP sekaligus pada pentingnya memastikan setiap kebijakan luar negeri dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku. Berita tersebut membingkai isu keanggotaan Indonesia di BoP sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum tata negara, khususnya terkait proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembahasan mengenai BoP ditempatkan dalam konteks hubungan internasional, serta dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Narasi berita memperlihatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam suatu organisasi internasional memerlukan dasar hukum yang jelas agar memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Kritik disampaikan oleh Hikmahanto Juwana yang menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP “perlu dilakukan dengan cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi.” Pernyataan tersebut merefleksikan bahwa pembentukan komitmen internasional memerlukan keterlibatan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Dalam perspektif ketatanegaraan, mekanisme tersebut menjadi bagian dari menjaga keseimbangan kewenangan antar-lembaga negara sehingga setiap kebijakan strategis memperoleh legitimasi politik sekaligus legitimasi hukum.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun argumentasi bahwa proses ratifikasi merupakan instrumen penting dalam penerapan prinsip *checks and balances* di Indonesia. Keterlibatan DPR dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional melalui proses pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pemberitaan memberikan ruang

terhadap pandangan yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri.

Kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP semakin diperkuat melalui pernyataan Hikmahanto yang menyebut bahwa tanpa persetujuan DPR, perjanjian tersebut “belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama yang disorot mengenai substansi organisasi internasional yang diikuti Indonesia, serta mengenai validitas hukum dari keputusan tersebut. Jadi, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang perlu memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh sistem ketatanegaraan agar memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP diposisikan sebagai bagian dari memperkuat legitimasi hukum sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Pemberitaan membangun kesan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan hubungan internasional sepatutnya mempertimbangkan dinamika politik global, maupun tetap mengacu pada mekanisme demokrasi yang berlaku di dalam negeri. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional dipandang perlu selaras dengan kepentingan nasional, prinsip negara hukum, serta amanat konstitusi agar setiap kebijakan yang diambil memperoleh legitimasi yang kuat, baik secara hukum maupun secara politik.

2. Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam *Board of Peace*

a. SBY, Jokowi, hingga Ma'ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo

Tabel 5. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (20:08 WIB)

Judul Berita: SBY, Jokowi, hingga Ma'ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/20081581/sby-jokowi-hingga-maruf-amin-datangi-istana-penuhi-undangan-prabowo>

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden dan Wakil Presiden mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Mereka datang untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka kompak mengenakan baju batik beragam warna. Pantauan Kompas.com di lokasi, para mantan presiden dan mantan wakil presiden itu masuk melalui pintu depan Istana Merdeka menuju tangga sebelah kanan.

Kedatangannya disambut secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Secara bergiliran, tokoh nasional yang pertama hadir adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Ia datang sekitar pukul 19.00 dengan mengenakan baju batik berwarna abu-abu dan kuning.

Setelahnya, tampak Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Ma'ruf terlihat hadir mengenakan baju kemeja berwarna abu-abu dan peci hitam.

Setelahnya, hadir Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan batik berwarna coklat hitam, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Wakil Presiden ke-11 Boediono. Mereka lalu secara bergiliran memasuki Istana Merdeka melalui tangga di sisi kanan Istana, persis di depan halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto juga terlihat menyapa kehadiran SBY.

“Terima kasih (telah memenuhi undangan),” kata Prabowo, sembari menyalami SBY. Sebagai informasi, Presiden Prabowo mengundang mantan Presiden RI untuk hadir dalam sebuah acara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden, eks wakil presiden, eks menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik di Parlemen.

Alasannya, Prabowo ingin berdiskusi dan mendengar masukan dari para tokoh tersebut.

“Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi bersilaturahmi saling bertukar pandangan. Bapak presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut,” kata Teddy, di Istana, Jakarta, Selasa malam.

Teddy tak mengungkapkan apa saja hal yang dibahas oleh Kepala Negara dan para mantan presiden dan wakil presiden.

Namun, Teddy memastikan berbagai hal akan dibahas termasuk soal situasi geopolitik. “Semuanya dibahas. Ya nanti *kan* belum mulai,” ujar dia.

Koding Awal: Prabowo undang tokoh bahas BoP

Analisis terhadap pemberitaan Kompas.com berjudul “SBY, Jokowi, hingga Ma’ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo” menunjukkan bahwa fokus utama pemberitaan diarahkan pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik internasional. Berita tersebut menempatkan pertemuan di Istana sebagai ruang konsultasi strategis yang bertujuan menghimpun berbagai pandangan dari para pemimpin nasional yang memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan kebijakan luar negeri maupun persoalan politik global. Pertemuan ini menjadi menarik

karena berlangsung setelah Indonesia resmi bergabung dalam BoP, ketika keanggotaan tersebut mulai memunculkan berbagai tanggapan dan kritik di ruang publik.

Narasi berita memperlihatkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya membangun komunikasi yang inklusif dalam merespons perubahan situasi internasional yang semakin kompleks. Alih-alih mengambil langkah secara sepihak, Presiden memilih membuka ruang dialog dengan melibatkan mantan presiden dan mantan wakil presiden sebagai bagian dari proses pertukaran gagasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa isu geopolitik sebagai urusan pemerintahan yang sedang berkuasa, sekaligus sebagai persoalan strategis yang memerlukan pertimbangan dari berbagai perspektif. Hal tersebut ditegaskan melalui pernyataan bahwa Presiden “ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keinginan untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain itu, pemberitaan memberikan penegasan terkait substansi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa “semuanya dibahas, termasuk soal situasi geopolitik.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa isu geopolitik menjadi salah satu agenda penting yang menjadi titik perhatian pemerintah. Dengan demikian, forum konsultasi tersebut menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai perkembangan internasional yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Termasuk pula terkait dinamika konflik di Timur Tengah serta implikasinya terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Dalam konteks polemik mengenai keanggotaan Indonesia di BoP setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, pertemuan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah melakukan evaluasi strategis terhadap arah kebijakan luar negeri. Meskipun berita tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pembahasan difokuskan pada BoP. Artinya, narasi yang disusun menunjukkan adanya keterkaitan antara meningkatnya ketegangan geopolitik dengan ‘kesadaran’ pemerintah untuk mendengarkan berbagai pandangan dari para tokoh nasional. Langkah tersebut mencerminkan kesadaran bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri memiliki konsekuensi diplomatik, politik, maupun persepsi internasional yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Singkat kata, pemberitaan Kompas.com membingkai forum konsultasi tersebut sebagai bentuk pendekatan dialogis yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dinamika politik global. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomasi internasional, stabilitas politik dalam negeri, serta komitmen Indonesia terhadap amanat konstitusi supaya tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan melibatkan berbagai tokoh nasional yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, pemerintah bermaksud membangun legitimasi politik sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tengah situasi geopolitik yang terus berkembang.

b. Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden Hingga Menlu

Tabel 6. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (05:08 WIB)

Judul Berita: Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/05080151/prabowo-bahas-konflik-iran-vs-as-israel-saat-kumpulkan-eks-presiden-hingga>

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membahas konflik yang memanans di Timur Tengah antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS) saat mengumpulkan mantan presiden, wakil presiden hingga menteri luar negeri RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/3/2026). Hal ini diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan tersebut. Ia menyebutkan, diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” kata Hassan, Selasa.

“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” imbuh dia.

Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah pusaran konflik global dalam forum tersebut. Hassan menambahkan, pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.

“Didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil,

minyak, dan gas. Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung,” ungkap Hassan.

Eks Menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini turut mengutip dinamika terbaru mengenai potensi eskalasi konflik. Presiden Prabowo, kata dia, menilai penting untuk membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan dengan para tokoh nasional. “Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini. Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” ujar Hassan.

Hassan menyebutkan, peserta pertemuan memandang konflik tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional. Pertemuan ini turut membahas posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace seiring dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. “Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia.

Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua umum partai koalisi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Koding Awal: Prabowo kumpulkan tokoh bahas konflik BoP

Analisis pemberitaan berjudul “Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu” menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut menempatkan respons pemerintah

terhadap eskalasi konflik antara AS-Israel dengan Iran sebagai isu strategis yang memerlukan pertimbangan secara komprehensif. Fokus utama berita diarahkan pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta mantan menteri luar negeri untuk berdiskusi mengenai perkembangan situasi internasional. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memandang dinamika geopolitik global, termasuk polemik mengenai BoP sebagai persoalan yang memiliki implikasi luas terhadap kepentingan nasional Indonesia. Singkatnya, pemerintahan Prabowo memerlukan masukan dari berbagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam pengambilan kebijakan strategis.

Narasi berita menunjukkan pemerintah memilih membangun ruang konsultasi untuk memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh mengenai dampak konflik terhadap Indonesia maupun terhadap tatanan internasional. Hal tersebut terlihat dari pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang menyampaikan bahwa pemerintah mendiskusikan “implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tertuju pada dampak langsung terhadap kepentingan nasional, maupun pada konsekuensi yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan, keamanan internasional, serta keberlangsungan tata hubungan antarnegara.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi berbagai aspek strategis, mulai dari keamanan regional, hubungan diplomatik, hingga kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melibatkan para tokoh nasional dalam proses konsultasi sebagai cara memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Pendekatan tersebut mencer-

minkan kehati-hatian pemerintah dalam menimbang setiap kemungkinan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari perubahan situasi geopolitik internasional.

Selain membahas dampak konflik, pemberitaan menyorot munculnya pertanyaan mengenai keberlanjutan posisi Indonesia dalam BoP. Isu tersebut mengemuka ketika Hassan Wirajuda menyampaikan bahwa pemerintah akan “berhitung lagi” terkait kemungkinan melemahnya mandat BoP akibat perang di Iran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi tersebut dalam menjalankan tujuan awal pembentukannya sebagai forum yang berorientasi pada perdamaian. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BoP tetap terbuka untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan situasi internasional dan kepentingan nasional.

Berpijak dari penjelasan tersebut, pemberitaan membingkai kebijakan luar negeri Indonesia sebagai proses yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global. Narasi yang dibangun memberikan kesan bahwa pemerintah berada pada fase refleksi dan penyesuaian dalam menentukan arah kebijakan diplomasi, khususnya terkait posisi Indonesia di BoP. Dalam proses inilah, pemerintah bermaksud menjaga keseimbangan antara prinsip perdamaian, kepentingan nasional, serta tuntutan dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri dipertimbangkan secara hati-hati agar tetap selaras dengan komitmen Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia.

c. Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?

Tabel 7. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (05:19 WIB)

Judul Berita: Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/05192291/kala-prabowo-kumpulkan-eks-presiden-hingga-ketum-parpol-apa-yang-dibahas>

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para eks presiden-wakil presiden, eks menteri luar negeri (menlu) hingga ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Parlemen di Istana, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan selama sekitar 3,5 jam itu dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih juga ikut menghadiri pertemuan.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan itu membahas berbagai hal termasuk situasi geopolitik dunia, khususnya usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang disusul serangan balasan Iran ke sejumlah wilayah di Timur Tengah.

“Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global. Khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain,” kata Bahlil usai pertemuan.

Bahlil mengklaim, para petinggi partai politik yang hadir sangat memahami posisi dan langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Selain Bahlil, ketum parpol lain yang hadir dalam pertemuan yaitu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli

Hasan, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzamil Yusuf. “Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita,” kata Bahlil.

Posisi Indonesia di *Board of Peace*

Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan soal keanggotaan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) serta tentang perkembangan di Iran. “Beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada. Yang paling mungkin dari yang ada. Bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu. Mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan ormas-ormas Islam,” tutur dia.

Sementara terkait perkembangan situasi di Iran, Prabowo disebut menekankan soal kesiapan pertahanan Indonesia jika menghadapi krisis. “Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elite kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan itu. Dan beliau sendiri insyaallah akan menyampaikan kepada publik mungkin, ya. Sikap-sikap resmi beliau gitu,” kata Yusuf.

Hal senada juga disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang menyebut Indonesia harus mengantisipasi dan bersiap diri khususnya dalam hal pangan serta energi. Soal *Board of Peace*, Cak Imin menyebutkan bahwa kepentingan nasional akan menjadi prioritas pemerintah. “Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam semua aspek kerjasama dengan siapapun,” ujar dia.

Koding Awal: Prabowo undang eks presiden hingga politisi

Analisis terhadap pemberitaan berjudul “Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?” menunjukkan bahwa konstruksi pemberitaan berfokus pada bagaimana pemerintah menjelaskan alasan di balik pilihan kebijakan tersebut

kepada berbagai tokoh politik nasional. Dalam narasi yang dibangun, langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, serta para ketua umum partai politik, diposisikan sebagai bagian dari proses komunikasi politik untuk menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks.

Pemberitaan memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya membangun pemahaman bersama mengenai tantangan yang dihadapi dalam menentukan posisi Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik internasional. Situasi tersebut dipandang tidak memberikan banyak ruang bagi lahirnya pilihan yang sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, keputusan yang diambil pemerintah diartikulasikan sebagai hasil dari berbagai pertimbangan strategis yang mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta dinamika hubungan internasional yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pemberitaan hasil dari proses penilaian yang mempertimbangkan berbagai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Hal tersebut tergambar secara jelas melalui pernyataan bahwa “Beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada. Yang paling mungkin dari yang ada. Bukan pilihan-pilihan ideal.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dilandasi oleh kebutuhan untuk menentukan langkah yang dinilai paling realistis di tengah situasi internasional yang penuh ketidakpastian. Dengan demikian, narasi berita mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri merupakan hasil dari proses kompromi terhadap berbagai kepentingan yang saling beririsan.

Lebih lanjut, pemberitaan memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha memperoleh dukungan dan pemahaman dari para elite politik nasional terhadap kebijakan yang diambil. Pertemuan yang melibatkan berbagai tokoh lintas pemerintahan dan lintas partai menunjukkan langkah membangun komunikasi politik yang lebih inklusif dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Langkah tersebut sekaligus memberikan kesan bahwa pemerintah membuka ruang untuk mendengarkan pandangan dari tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dalam mengelola hubungan internasional maupun pemerintahan.

Dengan kata lain, berita ini membingkai pertemuan tersebut sebagai ruang legitimasi politik bagi kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya terkait posisi Indonesia dalam BoP. Melalui penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, berita mengkonstruksi pemahaman bahwa keterlibatan Indonesia di BoP diposisikan sebagai pilihan strategis yang lahir dari realitas geopolitik internasional, bukan semata-mata dari pertimbangan idealisme. Dengan demikian, narasi yang disajikan memperkuat citra pemerintah sebagai aktor yang menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

3. Legitimasi *Board of Peace* Dipertanyakan

a. Sebut BOP Jadi *Board of War*, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran

Tabel 8. Berita Kompas.com Edisi 2 Maret 2026 (15:55 WIB)

Judul Berita: Sebut BOP Jadi *Board of War*, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/02/155500265/sebut-bop-jadi-board-of-war-ini-5-desakan-dalam-petisi-bersama-masyarakat>

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indonesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi. Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BOP), rencana pengiriman TNI ke Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim *Board of Peace* (BOP) menjadi *Board of War*.

“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, *Board of Peace* sudah berubah menjadi ‘*Board of War*’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian tertulis dalam petisi tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/3/2026) malam. Mereka juga menilai Ketua BOP yang seharusnya menjaga perdamaian sesuai piagam organisasi justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut.

Karena itu, dalam konteks ini, Indonesia dinilai sudah sepatutnya mempertimbangkan untuk menarik diri dari BOP.

5 Poin Penting Petisi Masyarakat Sipil

Koalisi menolak perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat dan mendesak DPR serta pemerintah mengevaluasi seluruh kesepakatan yang dinilai timpang, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Piagam BOP yang dianggap tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB 2803. Mereka juga menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan menilai rangkaian kebijakan tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke arah imperialisme sehingga perlu dikoreksi.

Berikut ini 5 poin penting dalam petisi tersebut yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia, di antaranya:

Kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika karena telah merugikan bangsa Indonesia.

Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersifat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.

Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepakatan Indonesia dalam Piagam BOP, karena BOP yang dibentuk di Davos bukanlah BOP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803.

Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BOP tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.

Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP membuat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu, langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat dan bangsa Indonesia.

Indonesia bisa saja masuk ke jurang imperialisme

Lebih jauh, dalam petisi masyarakat sipil tersebut, para akademisi menilai kebijakan pemerintah terkait kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat serta keputusan Indonesia bergabung dalam BOP telah menyeret Indonesia ke dalam jurang imperialisme. Petisi masya-

rakat sipil juga menilai pemerintah minim membuka ruang partisipasi publik dalam menyepakati dua kebijakan strategis tersebut. Padahal isu Palestina dan perjanjian dagang menyangkut kepentingan besar rakyat Indonesia.

Sehingga, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu melalui mekanisme formal di DPR maupun pelibatan langsung masyarakat.

Dalam kasus Piagam BOP, petisi masyarakat sipil menilai pemerintah langsung menandatangani piagam di Davos.

Sementara dalam perjanjian dagang dengan AS, kesepakatan diteken dengan partisipasi publik dan konsultasi DPR yang sangat terbatas, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat Konstitusi. Selain itu, mereka menyoroti adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal global Presiden Donald Trump karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Amerika dan atau tanpa persetujuan Kongres AS.

Petisi masyarakat sipil memandang dua proses tersebut menunjukkan Presiden Trump melakukan *fait accompli* terhadap Indonesia, sementara Presiden Prabowo dinilai mengabaikan pentingnya partisipasi masyarakat. Secara substansial, kebijakan luar negeri terkait perjanjian dagang dan keikutsertaan Indonesia dalam BOP disebut berpotensi berdampak signifikan terhadap kedaulatan negara, lingkungan hidup, hak asasi manusia, sumber kehidupan rakyat, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Koding Awal: BoP menjadi *board of war*

Analisis berita berjudul “Sebut BoP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran” menunjukkan bahwa fokus utama berita pada munculnya kritik dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan relevansi BoP sebagai forum yang mengusung nilai-nilai perdamaian di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara AS-Israel, dan Iran. Dalam kon-

struksi pemberitaan, BoP dipersepsikan sebagai simbol yang diperdebatkan karena dinilai tidak mampu mencerminkan tujuan normatif yang selama ini melekat pada identitas organisasi tersebut.

Narasi berita memperlihatkan kontradiksi antara citra BoP sebagai organisasi yang mengedepankan perdamaian dengan realitas politik internasional yang berkembang setelah terjadinya serangan militer. Kontradiksi tersebut menjadi dasar munculnya kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa keberadaan BoP berpotensi memberikan legitimasi terhadap tindakan yang memperluas konflik. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa “*Board of Peace* sudah berubah menjadi ‘*Board of War*’.” Ungkapan tersebut memiliki makna simbolik yang kuat karena mengubah penyebutan nama organisasi, sekaligus merepresentasikan perubahan persepsi publik terhadap fungsi dan kredibilitas BoP. Penggunaan istilah tersebut menjadi bentuk kritik yang menegaskan bahwa organisasi yang semestinya berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai, justru dipandang tidak mampu menjalankan peran tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, pemberitaan memperkuat konstruksi kritik melalui petisi bersama yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil. Dalam petisi itu dinyatakan bahwa pihak yang “seharusnya menjaga perdamaian justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut.” Pernyataan ini menunjukkan penilaian bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen normatif yang diklaim oleh aktor-aktor internasional dengan tindakan nyata yang terjadi di lapangan. Kritik yang disampaikan ditujukan kepada organisasi BoP sebagai institusi, serta kepada para aktor yang terlibat di dalamnya dan dinilai gagal mempertahankan konsistensi antara prinsip perdamaian dengan praktik kebijakan yang dijalankan.

Dalam konteks tersebut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa isu yang diperdebatkan terkait makna perdamaian itu sendiri dalam praktik politik global. Ketika operasi militer terus berlangsung dan eskalasi konflik semakin meningkat, narasi mengenai perdamaian dipandang kehilangan kekuatan moral karena tidak diikuti oleh tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana simbol dan retorika politik dapat mengalami perubahan makna ketika berhadapan dengan realitas hubungan internasional yang penuh kepentingan dan persaingan kekuasaan.

Dengan demikian, narasi membingkai BoP sebagai organisasi yang menghadapi krisis legitimasi di mata sebagian masyarakat sipil. Retorika perdamaian yang selama ini menjadi identitas utama organisasi dipersepsikan mengalami kontradiksi dengan praktik militer yang berkembang di lapangan. Karena itu, berita ini membangun kesan bahwa perdamaian sebagai bahasa politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, sehingga memunculkan tuntutan agar setiap komitmen terhadap perdamaian diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan tindakan yang konsisten.

b. Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat Board of Peace

Tabel 9. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (12:04 WIB)

Judul Berita: Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat Board of Peace

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/12042801/serangan-as-israel-ke-iran-dinilai-cederai-semangat-board-of-peace>

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran telah mencederai semangat dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, serangan kedua negara tersebut ke Iran telah merusak komitmen internasional terhadap perdamaian. “Semangat Board of Peace seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan perang. Peristiwa ini mencederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia,” ujar Soleh dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, tindakan AS dan Israel harus disanksi tegas karena sudah menyerang kedaulatan sebuah negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), desak Soleh, harus segera bertindak, mengingat Iran merupakan anggota sah PBB yang hak-haknya dijamin oleh hukum dan konvensi internasional.

“Iran adalah anggota PBB yang memiliki hak dan kedaulatan yang harus dihormati. PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat,” ujar Soleh.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyorot bahwa dugaan kejahatan perang yang dilakukan AS maupun Israel berulang kali. Namun hingga kini, kedua negara itu belum mendapatkan sanksi yang setimpal dari komunitas internasional. “Dunia internasional tidak boleh terus menerus membiarkan praktik-praktik yang melanggar

hukum internasional terjadi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak,” ujar Soleh.

Diberitakan sebelumnya, Israel menyerang Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Laporan Associated Press menyebutkan, serangan terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Amerika Serikat (AS) disebut turut terlibat dalam serangan tersebut. Informasi itu disampaikan oleh sejumlah pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui operasi tersebut.

Serangan itu terjadi saat AS mengerahkan armada besar jet tempur dan kapal perang ke kawasan tersebut untuk menekan Iran agar mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Kini, kantor berita Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei. Namun, tidak ada detail seputar kematiannya yang diumumkan. Menyusul kematian Khamenei, Iran mendeklarasikan 40 hari masa berkabung dan tujuh hari libur nasional.

Koding Awal: Komitmen BoP ‘tercederai’

Analisis berita berjudul “Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat Board of Peace” menunjukkan pertentangan antara nilai-nilai perdamaian yang digaungkan oleh pimpinan BoP dengan realitas konflik bersenjata yang terjadi setelah serangan AS-Israel terhadap Iran. Dalam konstruksi berita, peristiwa tersebut sebagai bagian dari dinamika geopolitik di Timur Tengah, maupun sebagai momentum yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi organisasi internasional dalam menjalankan tujuan yang diusungnya.

Narasi berita memperlihatkan bahwa tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel dipandang tidak sejalan dengan semangat diplomasi yang menjadi dasar pembentukan BoP. Organisasi yang membawa identitas sebagai forum perdamaian seharusnya mampu mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi,

dan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, ketika eskalasi kekerasan tetap terjadi dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki keterkaitan dengan BoP, muncul penilaian bahwa terdapat kesenjangan antara komitmen normatif dengan praktik politik di lapangan. Pandangan tersebut ditegaskan oleh Oleh Soleh yang menyatakan bahwa “Semangat *Board of Peace* seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan perang.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa konsep perdamaian harus tercermin secara nyata dalam kebijakan dan tindakan para pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun kritik terhadap praktik politik internasional yang dinilai masih mengandalkan penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen penyelesaian konflik. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan karena nilai-nilai perdamaian yang sering dikemukakan dalam berbagai forum internasional dipersepsikan tidak diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, narasi berita menempatkan konflik di Timur Tengah sebagai contoh bagaimana bahasa diplomasi dan komitmen terhadap perdamaian bisa dipandang kehilangan makna ketika tindakan yang diambil justru mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata dan memperbesar eskalasi konflik.

Kritik tersebut semakin dipertegas melalui penyebutan bahwa serangan AS-Israel merika terhadap Iran telah “mencederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik dapat memengaruhi upaya masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Dalam konteks ini, tindakan militer dipersepsikan bertentangan dengan cita-cita bersama untuk membangun tatanan interna-

sional yang lebih damai dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional.

Secara umum, pemberitaan membingkai retorika perdamaian internasional sebagai konsep yang menghadapi tantangan serius akibat praktik politik yang berkembang di lapangan. Nilai-nilai perdamaian dipandang kehilangan makna moral ketika tindakan nyata justru ditandai oleh meningkatnya eskalasi kekerasan, penggunaan kekuatan militer, serta pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Karena itu, berita ini mengkonstruksi pemahaman bahwa kredibilitas organisasi maupun aktor internasional dalam mendukung perdamaian bergantung pada konsistensi antara komitmen normatif yang disampaikan dan implementasinya dalam kebijakan serta tindakan nyata di tengah dinamika geopolitik global.

4. Delegitimasi Kepemimpinan Internasional dalam BoP

a. Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari *Board of Peace*

Tabel 10. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (09:23 WIB)

Judul Berita: Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari *Board of Peace*

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/09230991/donald-trump-dan-netanyahu-jadi-pemantik-perang-indonesia-didesak-keluar>

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah negosiasi terkait senjata nuklir di Jenewa, Swiss, Jumat (27/2/2026) antara Iran dan Amerika Serikat

mengalami kebuntuan, Amerika Serikat bersama Israel memantik peperangan. Sabtu (28/2/2026) pagi, Israel meluncurkan serangan ke Ibu Kota Iran, Teheran. Serangan itu menasar langsung kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei tewas dalam serangan tersebut, membuat Iran murka dan membalas dengan rudal balistik, menasar semua fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk di Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Serangan ini Sangat Jelas Dimotori oleh Amerika Serikat

Presiden AS, Donald Trump sendiri menyatakan serangan hari Sabtu yang menewaskan Khamenei adalah serangan yang hebat. Melalui unggahan di Truth Social, Trump mengumumkan kematian Khamenei yang telah memimpin Iran sejak 1989. “Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, sudah mati,” tulisnya. Ia menambahkan bahwa Khamenei “tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan kami yang sangat canggih dan, bekerja sama erat dengan Israel, tidak ada yang bisa ia lakukan, atau para pemimpin lain yang turut terbunuh bersamanya.” Namun yang menjadi ironi, ucapan ini datang dari seorang Chairman, pemimpin tertinggi dari organisasi Dewan Perdamaian yang baru dibentuk, yakni *Board of Peace*.

Trump diketahui sebagai penggagas *Board of Peace*, lembaga perdamaian yang baru saja disahkan untuk mengemban mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya perdamaian di Gaza, Palestina. Setelah serangan AS-Israel terhadap Iran tersebut, muncul desakan agar pemerintah Indonesia segera mengevaluasi pilihan bergabung dalam *Board of Peace*.

Runtuhnya Legitimasi *Board of Peace*

Suara paling keras datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, MUI mengatakan bahwa “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya” setelah menjadi biang kerok perang melawan Iran. “Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti yang kasat mata bahwa Trump baik sebagai presiden maupun *chairman* BoP bukanlah orang yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian,” kata Sudarnoto kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2026).

BoP kini tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan perdamaian dan hanya berkamufase di balik cara-cara imperialis ala Trump. Atas dasar itu, MUI mendesak agar Presiden Prabowo Subianto memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia dalam keanggotaan BoP. Alasannya, Indonesia wajib menciptakan perdamaian dunia seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Cara politik bebas aktif tidak bisa lagi menjadi alasan Indonesia menjadi anggota BoP. Langkah diplomatik taktis dan terukur justru dinilai lebih baik untuk memperjuangkan perdamaian dunia, termasuk terkait isu Palestina.

“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan *civil society* Indonesia *Insyallah* akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah terhormat. Akan terbuka celah atau peluang bagi Indonesia untuk ciptakan perdamaian sejati,” katanya.

Jadi Momentum Meninjau kembali *Board of Peace*

Hal senada disampaikan oleh *Associate Professor in Political Science & International Relations* Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengatakan, serangan Israel-AS terhadap Iran menjadi refleksi terhadap negara-negara Islam yang independen, salah satunya Indonesia dalam kepesertaan *Board of Peace*. “Bagi negara-negara Islam yang relatif independen seperti Turki dan Indonesia, momentum ini menjadi ruang refleksi strategis untuk meninjau kembali kerja sama BoP terkait Gaza dan arsitektur diplomasi kawasan,” ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (1/3/2026).

Alasannya, serangan terhadap Iran mempertajam kontradiksi retorika stabilitas kawasan dan praktik militer AS-Israel. Hal ini, kata dia, menguji kredibilitas narasi perdamaian yang digembar-gemborkan oleh BoP. Terlebih saat ini, dunia seperti bergeming atas konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Seolah *membeo* oleh Negeri Paman Sam, dan ini akan berdampak buruk pada kondisi geopolitik secara global. Umam mengatakan, apa yang terjadi di Iran tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Venezuela. Trump telah merusak keseimbangan tata kelola keamanan internasional.

“Jika apa yang terjadi di Timur Tengah ini dianggap sebagai hal normal, dan dunia berdiam diri, maka langkah unilateral ini berpotensi besar menysasar ke belahan dunia lain, termasuk Greenland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya,” ucapnya.

BoP sebagai *Kerangkeng*

Pandangan lebih ekstrem datang dari Pakar Timur Tengah sekaligus Guru Besar Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia, Yon Machmudi.

Pasca serangan Iran, ia melihat BoP bukan lagi sebagai organisasi yang menjunjung perdamaian, melainkan sebagai *kerangkeng* negara-negara Islam untuk melegitimasi tindakan Donald Trump. “Ini kan seperti negara-negara dunia Islam termasuk Indonesia kan sudah dikonsolidasikan Trump dan di situ ada Israel di dalamnya,” imbuhnya. “Maka bisa diasumsikan Amerika dan Israel berani untuk melakukan serangan itu karena anggotanya bahwa tidak akan ada protes keras dari negara-negara anggota OKI terutama dari dunia Arab dan Indonesia yang sudah masuk BoP,” tambah Yon.

Yon mengatakan, negara Arab dan dunia Islam “seakan sudah dikunci di dalam kamar BoP,” sehingga tidak bisa secara bebas leluasa menyampaikan kecaman terhadap AS-Israel. Padahal secara terang-terangan, AS-Israel melanggar hukum internasional dengan cara menyerang kedaulatan Iran. Dia juga mengkritisi sikap Indonesia yang tiba-tiba “lembek” dalam kasus serangan Iran vs AS-Israel ini.

Pemerintah Indonesia seperti tidak melihat inti masalah, yakni serangan terhadap kedaulatan Iran. Indonesia justru melipir menyalahkan negosiasi senjata nuklir yang gagal dilakukan di Jenewa. “Maka tentu saat ini ya harus mulai dievaluasi sejauh mana efektivitas keberadaan Indonesia di BoP. Apakah akan ya benar-benar berorientasi ditujukan BoP itu *endingnya* untuk kemerdekaan Palestina atau malah sebaliknya diawali dengan menghancurkan ya menghentikan kelompok-kelompok perlawanan ya terutama negara Iran dan *proxy-proxynya*,” imbu Yon.

Koding Awal: Aktor ‘pemantik perang’

Analisis terhadap pemberitaan berjudul “Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari *Board of Peace*” mencerminkan berita ini mengedepankan kritik terhadap figur-figur yang dipandang memiliki posisi sentral dalam BoP, khususnya Donald Trump sebagai pimpinan forum tersebut. Pemberitaan mempersoalkan keberadaan BoP sebagai organisasi internasional, sekaligus menempatkan kepemimpinan organisasi sebagai faktor yang menentukan kredibilitas dan legitimasi forum tersebut. Dalam konstruksi berita, serangan militer AS-Israel terhadap Iran menjadi titik balik yang memunculkan berbagai kritik terhadap kepemimpinan BoP, terutama karena tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan utama organisasi yang mengusung nilai-nilai perdamaian.

Narasi berita memperlihatkan bahwa krisis yang dihadapi BoP berkaitan dengan efektivitas organisasi dalam merespons konflik internasional, serta menyangkut kepercayaan publik terhadap para pemimpin di dalamnya. Hal ini terlihat dari pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut bahwa “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kritik yang muncul berkembang menjadi penilaian terhadap landasan moral yang menjadi dasar keberadaan BoP. Dalam konteks ini, legitimasi organisasi dipersepsikan negatif ketika tindakan para aktor yang terlibat dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai perdamaian yang selama ini dikedepankan.

Lebih lanjut, pemberitaan mengarahkan perhatian pembaca pada sosok Donald Trump sebagai pemimpin yang dinilai memiliki tanggung jawab moral atas arah organisasi. Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan bahwa Trump “bukanlah orang yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian” dan bahkan menyebutnya

sebagai “perusak brutal perdamaian.” Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa kritik diarahkan pada kebijakan yang diambil, sekaligus pada karakter kepemimpinan yang dipersepsikan tak selaras dengan misi utama BoP. Dengan demikian, pemberitaan membangun hubungan erat antara kualitas kepemimpinan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi internasional yang dipimpinnya.

Narasi yang disusun menunjukkan pergeseran persepsi terhadap kepemimpinan global. Figur yang semula diposisikan sebagai mediator dan penggerak terciptanya perdamaian internasional mulai dipandang sebagai bagian dari dinamika konflik yang berlangsung. Pergeseran persepsi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin internasional dibentuk oleh jabatan/posisi formal maupun oleh konsistensi antara komitmen terhadap perdamaian dengan tindakan nyata dalam menghadapi konflik antarnegara. Ketika tindakan yang muncul dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan internasional cenderung berkurang.

Dengan kata lain, berita tersebut mengkonstruksi BoP sebagai organisasi yang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan legitimasi politik dan moralnya. Kritik yang diarahkan kepada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa krisis kepercayaan terhadap organisasi erat melekat dari penilaian terhadap para pemimpinnya. Dalam konteks ini, BoP dipersepsikan sebagai representasi dominasi politik dan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Melalui konstruksi tersebut, berita membangun pemahaman bahwa efektivitas dan kredibilitas suatu organisasi internasional bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai perdamaian dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Berdasarkan analisis tematik terhadap 10 berita kontroversi Indonesia dalam BoP, memperlihatkan pergulatan cara pandang publik dan elite politik Indonesia dalam memaknai posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Dengan menggunakan pendekatan Braun & Clarke (2012), empat tema yang muncul mencerminkan keterhubungan yang kuat satu sama lain, terutama terkait krisis legitimasi perdamaian internasional dan respons politik Indonesia terhadapnya.

Secara keseluruhan, tidak ada tema yang mendominasi dari 10 berita yang ditayangkan Kompas.com. Tematik evaluasi kebijakan Indonesia (4 berita) nyaris berimbang dengan tematik justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP. Tematik evaluasi berisi desakan, kritik, dan protes dari para pemangku kepentingan agar Indonesia meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dan bahkan segera ke luar dari BoP. Desakan itu datang dari mulai dari anggota DPR, akademisi, tokoh ormas Islam, hingga masyarakat sipil. Narasi evaluatif ini antara lain tampak ketika TB Hasanuddin menyebut bahwa “partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas aktif”, sementara Hikmahanto Juwana menekankan bahwa keanggotaan Indonesia “perlu dilakukan dengan cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi.” Dalam konteks ini, BoP diposisikan sebagai isu yang menyentuh langsung konsistensi politik luar negeri Indonesia, amanat konstitusi, dan legitimasi demokrasi domestik.

Di sisi lain, muncul tema legitimasi BoP dipertanyakan. Serangan AS-Israel terhadap Iran menjadi titik balik yang memicu keraguan terhadap kredibilitas BoP sebagai lembaga perdamaian. MUI secara tegas menyatakan bahwa BoP “tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina.” Kritik ini menunjukkan persepsi bahwa

institusi yang membawa nama perdamaian justru gagal menjaga nilai-nilai yang menjadi dasar keberadaannya. Dalam sejumlah berita, legitimasi BoP mulai terkikis karena publik melihat adanya ketimpangan antara mandat normatif organisasi dan praktik politik negara-negara dominan di dalamnya.

Tema berikutnya adalah delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP. Kritik diarahkan kepada institusi, serta kepada figur-figur utama yang memimpin ‘arsitektur’ perdamaian tersebut, terutama Donald Trump. MUI bahkan menyebut Trump sebagai “perusak brutal perdamaian.” Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kepemimpinan internasional dipandang kehilangan otoritas moral ketika aktor yang mengusung narasi perdamaian justru terlibat dalam operasi militer. Dalam perspektif tematik, delegitimasi terhadap pemimpin global menjadi bagian penting dalam pembentukan persepsi publik terhadap BoP.

Hal menarik, tema justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP tampil dalam tiga berita. Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo ‘sadar’ akan desakan publik terkait bergabungnya Indonesia dalam BoP. Presiden mengklaim bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional bentukan Donald Trump merupakan pilihan realistis di tengah situasi global yang kompleks. Pernyataan bahwa keputusan tersebut merupakan “pilihan yang paling mungkin dari yang ada” menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi politik atas langkah diplomasi pemerintah.

Dengan demikian, 10 berita ini memperlihatkan bahwa BoP menjadi ruang tarik-menarik antara idealisme perdamaian, kepentingan geopolitik, dan identitas politik luar negeri Indonesia. Narasi Kompas.com merefleksikan kegelisahan kolektif bahwa perdamaian dunia

membutuhkan konsistensi moral yang tercermin dalam tindakan nyata.

Berikut ini pemberitaan seputar kontroversi Indonesia dalam BoP pada Kompas.com (Maret 2026) tertera dalam Tabel 11.

Tabel 11. Kategorisasi Tematik Berita Kontroversi Indonesia dalam Board of Peace pada Kompas.com

No	Judul Berita	Koding Awal	Kategori Tema
1.	MUI Desak RI Keluar dari <i>Board of Peace</i> Usai Serangan AS-Israel ke Iran	Ormas Islam desak RI ke luar dari BoP	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
2.	Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran	Wakil rakyat desak RI ke luar dari BoP	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
3.	Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan <i>Cabut</i> dari BoP	Tokoh PKS desak RI ke luar dari BoP	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
4.	Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak	Ratifikasi DPR	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
5.	SBY, Jokowi, hingga Ma'ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo	Prabowo undang tokoh bahas BoP	Justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP
6.	Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu	Prabowo kumpulkan tokoh untuk diskusi BoP	Justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP
7.	Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?	Prabowo undang eks presiden hingga politisi	Justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP
8.	Sebut BOP Jadi <i>Board of War</i> , Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran	BoP menjadi <i>Board of War</i>	Legitimasi BoP dipertanyakan
9.	Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat <i>Board of Peace</i>	Komitmen BoP tercederai	Legitimasi BoP dipertanyakan
10.	Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari <i>Board of Peace</i>	Aktor 'pemantik perang'	Deligitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Berdasarkan Tabel 11, pemberitaan Kompas.com memperlihatkan struktur tematik yang saling terhubung. Struktur tersebut kemudian membentuk satu alur mengenai krisis legitimasi BoP serta posisi dilematis Indonesia di tengah konflik global. Tema-tema yang muncul saling menguatkan dan membentuk keterjalinan isu antara perdamaian, geopolitik, legitimasi internasional, hingga politik luar negeri Indonesia.

Struktur tematik diawali dari evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP. Berbagai aktor politik, akademisi, dan masyarakat sipil mendorong pemerintah meninjau ulang keterlibatan Indonesia. Pernyataan bahwa keanggotaan BoP “perlu ratifikasi DPR” dan kekhawatiran bahwa Indonesia menjadi “alat stempel legitimasi perang” menunjukkan adanya kecemasan nasional terhadap arah politik luar negeri Indonesia.

Tematik evaluasi kebijakan tersebut disusul oleh tematik justifikasi kebijakan. Dalam hal ini berisi penjelasan pemerintah Indonesia yang bermaksud membangun pemahaman bersama mengenai tantangan yang dihadapi dalam menentukan posisi Indonesia dalam BoP di tengah meningkatnya eskalasi konflik internasional.

Selanjutnya struktur tematik yang muncul adalah keraguan terhadap legitimasi BoP pasca agresi militer AS-Israel ke Iran. MUI menilai BoP “tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” sementara koalisi masyarakat sipil bahkan menyebutnya berubah menjadi “*Board of War*.” Keterjalinan isu kemudian menyentuh retorika damai dan praktik militer di lapangan. BoP yang dibangun atas nama perdamaian justru dipersepsikan hadir bersamaan dengan eskalasi perang. Oleh Soleh menyatakan bahwa “semangat *Board of Peace* seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perda-

maian, bukan pembenaran atas tindakan perang.” Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana Kompas.com membangun narasi tentang benturan antara idealisme diplomasi dan realitas kekerasan geopolitik.

Dari titik ini, tema berkembang ke arah delegitimasi kepemimpinan internasional, terutama terhadap Donald Trump sebagai figur sentral BoP. Kritik bahwa Trump dan Netanyahu adalah “pemantik perang” memperlihatkan bagaimana sosok pemimpin diposisikan sebagai representasi krisis moral institusi internasional itu sendiri.

Dengan demikian, keterjalinan antar tema dalam Kompas.com membentuk satu narasi besar bahwa krisis BoP menjadi momentum refleksi bagi Indonesia untuk menegaskan kembali identitas politik luar negeri yang ‘bebas aktif’, berdaulat, dan berpihak pada perdamaian substantif, bukan sekadar simbolik ataupun retorika belaka.

Representasi Editorial Kompas.com: Ideologi Media dan Kebijakan Redaksional

Analisis tematik terhadap pemberitaan Kompas.com mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP menunjukkan bahwa realitas yang dikonstruksi media ini lebih diarahkan pada bagaimana Indonesia memaknai dan merespons dinamika geopolitik global dibandingkan pada penilaian terhadap BoP sebagai organisasi internasional. Interpretasi terhadap empat tema yang dihasilkan memperlihatkan bahwa pemberitaan berfokus pada posisi, pertimbangan, dan konsekuensi kebijakan luar negeri Indonesia. Di sinilah, isu BoP memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai pilihan diplomatik di tengah perubahan geopolitik global.

Dalam perspektif konstruktivis, media bukan sebagai saluran yang memantulkan realitas secara objektif, melainkan sebagai ‘aktor’

yang mengonstruksi makna melalui penyusunan narasi (Hågvar et al., 2026). Dalam konteks ini, Kompas.com mengarahkan perhatian editorial pada bagaimana Indonesia sebaiknya mengambil sikap ketika prinsip-prinsip politik luar negeri berhadapan dengan dinamika geopolitik internasional. Pembaca memperoleh informasi mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah, sekaligus diajak memahami konsekuensi politik, diplomatik, ekonomi, dan moral yang menyertai setiap pilihan kebijakan pemerintah.

Interpretasi terhadap keseluruhan tema menunjukkan bahwa Kompas.com membangun ruang pemberitaan yang menghadirkan beragam perspektif. Di satu sisi, media memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan argumentasi dan pertimbangan strategis yang melandasi keterlibatan Indonesia dalam BoP, termasuk melalui konsultasi Presiden Prabowo Subianto dengan mantan presiden, mantan menteri luar negeri, dan pimpinan partai politik. Di sisi lain, Kompas.com memuat pandangan kritis dari anggota DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh keagamaan yang mempertanyakan relevansi maupun implikasi kebijakan tersebut. Keberagaman sumber ini menunjukkan bahwa pemberitaan merepresentasikan berbagai pemaknaan yang berkembang di ruang publik.

Pilihan editorial tersebut mencerminkan karakter jurnalisme Kompas.com yang mengedepankan dialog daripada konfrontasi (Wijayanto & Masduki, 2023). Kritik terhadap kebijakan pemerintah ditempatkan sebagai bagian dari proses demokratis untuk mengevaluasi kebijakan publik, bukan sebagai upaya mendelegitimasi pemerintah (Purwanti et al., 2025). Sebaliknya, argumentasi pemerintah juga tidak diposisikan sebagai kebenaran yang harus diterima tanpa ruang diskusi. Melalui penyajian berbagai sudut pandang, Kompas.com

memberikan kesempatan kepada pembaca untuk membangun pemahamannya sendiri terhadap isu yang diperdebatkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ideologi editorial Kompas.com dekat dengan tradisi jurnalisme deliberatif yang memosisikan media sebagai ruang pertukaran gagasan dan pembentukan makna publik. Orientasi tersebut tercermin dari keberagaman sumber informasi, keterbukaan terhadap argumentasi yang berbeda, serta menghubungkan isu internasional dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Pilihan ini sejalan dengan karakter Kompas yang dikenal mengedepankan moderasi, rasionalitas, dan kehati-hatian dalam memberitakan isu-isu politik yang sensitif (Ansori et al., 2024; Besman et al., 2025).

Berdasarkan interpretasi tersebut, representasi editorial Kompas.com dalam isu BoP merefleksikan ideologi media yang berorientasi pada kepentingan publik, keberimbangan informasi, dan penghormatan terhadap proses demokrasi. Alih-alih mengarahkan pembaca pada satu kesimpulan tertentu, Kompas.com mengonstruksi ruang diskursif sehingga berbagai pemaknaan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dipertemukan dan diperdebatkan secara terbuka. Dalam perspektif konstruktivis, realitas mengenai BoP sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi berbagai aktor, kepentingan, dan narasi dalam pemberitaan.

Implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Interpretasi terhadap tema-tema yang dihasilkan melalui analisis tematik menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP membangun pemahaman mengenai bagaimana politik luar negeri Indonesia diposisikan di tengah peru-

bahan geopolitik global. Dalam perspektif konstruktivis, media merupakan ruang tempat makna sosial diproduksi dan dinegosiasikan (Wijayanto & Masduki, 2023). Oleh karena itu, implikasi pemberitaan Kompas.com sebagai konstruksi diskursif yang membentuk cara publik memaknai posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Interpretasi terhadap keseluruhan tema memperlihatkan bahwa Kompas.com mengonstruksi politik luar negeri Indonesia sebagai kebijakan yang bertumpu pada kepentingan nasional sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai yang menjadi identitas diplomasi Indonesia. Hal ini tercermin dari pemberitaan yang menampilkan pertimbangan pemerintah, respons berbagai aktor domestik, serta konsekuensi yang mungkin timbul dari keterlibatan Indonesia dalam BoP.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki peran penting dalam pembentukan legitimasi kebijakan luar negeri. Beragam pandangan dari pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh keagamaan merepresentasikan keputusan diplomatik sebagai isu yang layak diperdebatkan secara terbuka. Kehadiran berbagai perspektif tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi politik luar negeri bersumber dari kewenangan konstitusional pemerintah, juga dibangun melalui dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks demokrasi, konstruksi ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bagian dari diskursus publik yang dapat dikritisi dan dievaluasi bersama.

Di sisi lain, pemberitaan Kompas.com mengonstruksi bahwa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia erat kaitannya dengan dinamika tata kelola global. Tema mengenai legitimasi BoP dan delegitimasi kepemimpinan internasional menunjukkan bahwa kredibilitas organisasi internasional ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan

normatif yang diusung dan konsistensi para aktor dalam menjalankan mandatnya. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Indonesia sebagai keputusan yang mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus keselarasan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut.

Lebih jauh, keseluruhan pemberitaan mengonstruksi prinsip politik luar negeri **'bebas aktif'** sebagai kerangka normatif dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Argumentasi yang berkembang memperlihatkan bahwa konsistensi terhadap prinsip tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai langkah diplomasi Indonesia, terutama dalam menjaga komitmen terhadap perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik melalui dialog.

Berdasarkan interpretasi tersebut, implikasi analisis tematik ini terletak pada cara media mengonstruksi pemahaman publik mengenai arah politik luar negeri Indonesia. Kompas.com menghadirkan ruang diskursif yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai kebijakan Indonesia dalam BoP. Dengan demikian, temuan ini memper-tegas bahwa media berfungsi sebagai penyampai informasi, sekaligus arena pembentukan makna mengenai identitas, orientasi, dan legitimasi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika hubungan internasional (Setiawan, 2019).

B. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP

Pemberitaan Republika.co.id edisi 1-4 Maret 2026 mencakup 10 berita yang dipilih secara purposif dengan menggunakan analisis tematik Braun dan Clarke (2012). Analisis tematik memiliki keluwesan dalam pendekatan metodologis, memberi ruang bagi penafsiran, serta mengakui keterlibatan subjektivitas peneliti dalam proses

analisis (Pearson, 2025). Dalam konteks ini, analisis tematik menekankan pentingnya reflektivitas, transparansi proses analitik, serta kepekaan konteks dalam menghasilkan temuan yang kredibel dan bermakna secara akademik.

Hasil pengkodean menunjukkan tiga kategori tema meliputi: Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP (lima berita), Legitimasi BoP Dipertanyakan (tiga berita), Delegitimasi Kepemimpinan Internasional (dua berita). Distribusi tersebut menunjukkan variasi penekanan dalam pemberitaan yang bisa ditelusuri lebih lanjut pada masing-masing tematik berikut ini.

- 1. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP
 - a. Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran

Tabel 12. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (09:25 WIB)

Judul Berita: Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tbaxet377/ini-kekhawatiran-pakar-jika-indonesia-tetap-di-bop-saat-amerika-israel-menyerang-iran>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Indonesia masuk dalam *Board of Peace* (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat menuai kontroversi. Penentangan semakin kencang saat AS bersama Israel menyerang Iran. Dewan Perdamaian yang sejatinya mendorong upaya stabilitas pertahanan dan keamanan justru mengarah sebaliknya.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional Hendra Maulana Saragih mengatakan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Perdamaian atau *Board of Peace* (BoP) perlu waspada terhadap benturan kepentingan antarnegara di tengah konflik global.

Ia menjelaskan politik bebas aktif Indonesia harus menjaga kedaulatan di tengah gempuran konflik kepentingan karena negara mempunyai hubungan diplomatik dengan banyak negara lain.

“Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga,” ucap dia kepada Antara, Selasa.

Indonesia dalam setiap kebijakan, ujar dia, harus dipikirkan dengan matang untuk menghindarkan pengaruh kebijakan luar negeri yang dapat merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Di tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat, 65 tokoh dan 70 lebih organisasi sipil mendesak Indonesia untuk keluar dari BoP.

Hendra menjelaskan desakan tersebut dapat menjadi masukan untuk Indonesia meninjau kembali komitmen menjaga perdamaian di tengah konflik saat ini. “Justu ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang,” ujarnya.

Diketahui, 65 tokoh yang terdiri atas ahli hukum, akademisi, budayawan, pakar, hingga rohaniawan bersama 79 organisasi masyarakat sipil menerbitkan petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru” pada Minggu (1/3).

Petisi itu merespons berbagai macam kebijakan luar negeri Indonesia berupa penolakan pengiriman satuan keamanan di Gaza sejumlah 8.000 personel TNI, dan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau *agreement on reciprocal trade* (ART).

Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) juga menjadi perhatian utama dalam petisi tersebut saat ini. Mereka menilai Dewan Perdamaian seharusnya dapat menjaga perdamaian, tetapi konflik geopolitik di Timur Tengah itu tidak berakhir damai.

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI di Gaza.

Koding Awal: Kontroversi Indonesia dalam BoP

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul “*Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran*” menunjukkan bahwa berita tersebut mengarahkan pembaca membangun ruang refleksi mengenai pentingnya pemerintah meninjau kembali posisi Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara AS-Israel dan Iran. Fokus utama berita pada pandangan pakar hubungan internasional yang menilai bahwa perubahan situasi geopolitik global menuntut pemerintah untuk mengevaluasi setiap kebijakan luar negeri secara cermat agar tetap selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Narasi berita memperlihatkan bahwa keberlanjutan keanggotaan Indonesia dalam BoP diposisikan sebagai isu yang membutuhkan pertimbangan strategis. Hendra Maulana Saragih menekankan bahwa Indonesia harus mewaspadai potensi benturan kepentingan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam organisasi internasional di tengah konflik global. Pandangan itu terlihat dalam pernyataannya bahwa “Di antara kekhawatiran tentang Indo-

nesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia sepatutnya berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian utama pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisi yang independen dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Lebih lanjut, pemberitaan mengonstruksi bahwa setiap keputusan dalam kebijakan luar negeri idealnya mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara. Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan BoP dipandang sebagai langkah yang rasional untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya persepsi bahwa Indonesia berpihak pada kepentingan tertentu. Narasi ini menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika dinamika konflik internasional berpotensi memengaruhi stabilitas hubungan bilateral maupun posisi Indonesia di tingkat global.

Di sisi lain, narasi memberikan ruang terhadap berkembangnya aspirasi masyarakat sipil yang mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keanggotaan Indonesia di BoP. Keberadaan petisi yang didukung oleh puluhan tokoh dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan bahwa isu tersebut berkembang menjadi perhatian publik yang lebih luas. Namun demikian, berita membingkai desakan tersebut sebagai bagian dari masukan yang patut dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Hendra bahwa “Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia berpikir ulang.” Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa situasi konflik yang berlangsung dipandang sebagai momentum untuk melakukan

evaluasi secara menyeluruh terhadap arah kebijakan Indonesia dalam BoP.

Secara keseluruhan, Republika.co.id dalam berita ini mengkonstruksi keberlanjutan Indonesia di dalam BoP sebagai kebijakan yang selayaknya dievaluasi secara hati-hati di tengah perubahan lanskap geopolitik internasional. Narasi yang dibangun menekankan pentingnya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, melindungi kepentingan nasional, serta mempertahankan hubungan diplomatik yang seimbang dengan berbagai negara. Dengan demikian, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian, kedaulatan nasional, dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

b. Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP

Tabel 13. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (16:57 WIB)

Judul Berita: Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tbbibp393/giliran-purnawirawan-jenderal-desak-ri-mundur-dari-bop?>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seruan pembatalan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian alias *Board of Peace* (BoP) terus mengemuka selepas Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Yang terkini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak hal itu sekaligus meminta DPR menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza.

“FPP-TNI mendesak DPR RI untuk menolak secara tegas pengiriman pasukan TNI ke Gaza dan skema IDF,” bunyi pernyataan yang dilansir Selasa tersebut. Selain itu, FPP-TNI juga menolak keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian dan mendesak Pemerintah Indonesia menarik diri dari struktur BoP.

Pernyataan itu diteken Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Organisasi itu utamanya menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota TNI dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza. FPP-TNI menilai DPR harus menolak setiap persetujuan politik terhadap penerjunan tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Republik Indonesia.

Dengan bergabung dengan ISF, prajurit TNI berpotensi melanggar konstitusi karena melanggar penjajahan Israel di Palestina. Keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan penjaga perdamaian.

Selain itu, keterlibatan dalam BoP dan ISF juga berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, dan mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia.”

Soal pengiriman pasukan TNI, FPP-TNI mengingatkan, bukan saja karena mandat PBB, tetapi juga atas dasar persetujuan negara-negara yang bertikai, sepanjang sah menurut hukum internasional dan disetujui secara konstitusional oleh negara Indonesia.

Tanpa mandat PBB, pasukan asing di Gaza berpotensi dipersepsikan sebagai pasukan pendudukan, instrumen stabilisasi kepentingan asing, dan bukan pasukan perdamaian netral. “Konsekuensinya, prajurit

TNI berhadapan langsung dengan rakyat Palestina, Indonesia kehilangan legitimasi historis sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, dan reputasi internasional Indonesia runtuh di dunia Islam,”

Sedangkan keterlibatan Indonesia dalam BoP juga berpotensi menimbulkan dampak serius. Pertama, Indonesia masuk orbit keamanan kekuatan besar. Kemudian mengubah posisi Indonesia dari negara nonblok menjadi bagian arsitektur keamanan global tertentu.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi target konflik, terancam teror, rentan terhadap tekanan politik dan sanksi ekonomi. “Kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan geopolitik yang menempatkan Indonesia dalam konflik yang bukan perang rakyat Indonesia,” bunyi pernyataan itu.

Seruan dari para purnawirawan ini adalah yang terkini dari gelombang seruan agar Indonesia mundur dari BoP menyusul aksi serampangan Presiden AS Donald Trump menyerang Iran.

Agresi militer yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Islam Iran membuktikan keraguan internasional selama ini atas adanya *Board of Peace* (BoP) atau Dewan Perdamaian. AS merupakan dedengkot, sekaligus pemimpin BoP yang dikampanyekan sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, dan Israel sebagai salah satu anggotanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia TB Hasanuddin mengatakan penyerangan militer terbuka terhadap Iran menunjukkan watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamaian. TB Hasanuddin menilai, penyerangan Israel-AS terhadap Iran juga menunjukkan pepesan kosong pembentukan BoP untuk membuat perdamaian bagi Bumi Palestina.

“Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justru menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas,” kata Hasanuddin kepada Republika melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Kata TB Hasanuddin, penyerangan militer terbuka Israel-AS terhadap Iran bukanlah peristiwa yang biasa. Justeru kata politikus PDI Perjuangan itu ambisi perang untuk menghancurkan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei oleh Presiden AS Donald Trump bersama penjahat Benjamin Netanyahu itu bak menyiram bahan bakar baru untuk terus ‘membakar’ situasi di kawasan Timur Tengah. Dan situasi tersebut, juga bakal berdampak langsung terkait upaya membuat perdamaian di Palestina yang belakangan dikoar-koarkan oleh BoP.

“Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar memiliki niat yang tulus untuk perdamaian,” kata Hasanuddin.

Pemerintah Indonesia Diminta Tegas

Terkait perang AS bersama Israel terhadap Iran yang sudah terjadi saat ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini, kata TB Hasanuddin menganut paham konstitusional yang menolak segala macam bentuk agresi, dan penjajahan, serta mendukung perdamaian dunia.

“Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia. Apalagi pemerintah kita sudah berpartisipasi jauh selama ini tentang isu-isu perdamaian di Timur Tengah,” kata TB Hasanuddin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung, pun semestinya dapat menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran atas situasi saat ini. Pujian setinggi langit terhadap Presiden Prabowo dalam lawatan-lawatan diplomasinya ke banyak negara selama ini, harus menjadi modal yang kuat untuk terlibat langsung dalam upaya penghentian agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan AS, maupun Zionis Israel selama ini.

“Melalui partisipasi dalam BoP, sudah saatnya aktivisme diplomasi kita (Indonesia) yang aktif dalam bulan-bulan terakhir ini, menunjukkan hasil apakah benar kita dipandang dan memiliki posisi strategis secara global, atau malah masih jauh panggang dari api,” ujar TB Hasanuddin.

Koding Awal: Purnawirawan jenderal desak RI mundur dari BoP

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul “*Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP*” menempatkan polemik keanggotaan Indonesia di BoP sebagai persoalan yang menyangkut aspek pertahanan negara, konstitusi, dan arah politik luar negeri Indonesia. Melalui pemberian ruang yang luas terhadap pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), berita membangun narasi bahwa kebijakan pemerintah untuk tetap terlibat dalam BoP sepatutnya ditinjau kembali karena dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi strategis bagi kepentingan nasional.

Narasi berita menggambarkan bahwa evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP didasarkan pada kekhawatiran akan bergesernya posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam pemberitaan ditegaskan bahwa “Keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, dan mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu utama yang diangkat mengenai kemungkinan berkurangnya ruang independensi Indonesia dalam menentukan sikap terhadap berbagai persoalan global. Dengan

demikian, pemberitaan membingkai evaluasi kebijakan sebagai langkah untuk memastikan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip nonblok dan tidak terseret dalam kepentingan kekuatan besar.

Selain itu, berita menghubungkan keanggotaan Indonesia di BoP dengan rencana pengiriman pasukan TNI dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Hubungan tersebut memperluas ruang diskusi bahwa keputusan politik luar negeri erat dengan implikasi terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Pemberitaan menampilkan pandangan FPP-TNI bahwa keterlibatan Indonesia dalam skema tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dengan menghadirkan argumentasi tersebut, *Republika.co.id* membangun kesan bahwa evaluasi terhadap BoP sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan legitimasi konstitusional.

Di sisi lain, berita menghadirkan pandangan anggota DPR TB Hasanuddin yang menilai bahwa serangan militer AS-Israel terhadap Iran semakin memperkuat keraguan terhadap komitmen perdamaian yang diklaim oleh BoP. Pernyataannya bahwa “kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian” menunjukkan penilaian bahwa perkembangan konflik memengaruhi persepsi terhadap efektivitas organisasi tersebut. Namun, pemberitaan juga menampilkan harapan agar pemerintah memanfaatkan posisi Indonesia di BoP sebagai sarana untuk memperkuat diplomasi dalam mendorong penghentian konflik. Di sini, berita memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan sebagai kesempatan menilai sejauh mana keanggotaan tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan agenda perdamaian.

Secara keseluruhan, Republika.co.id membingkai keberlanjutan Indonesia di dalam BoP sebagai kebijakan yang memerlukan peninjauan secara menyeluruh di tengah perubahan situasi geopolitik internasional. Evaluasi tersebut diposisikan sebagai upaya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, mempertahankan kedaulatan negara, serta memastikan bahwa setiap langkah diplomasi sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia.

c. **Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace**

Tabel 14. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (21:23 WIB)

Judul Berita: Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tbbumf409/agresi-asisrael-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-board-of-peace-part2>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membawa Indonesia keluar dari *Board of Peace* (BoP) menyusul krisis di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang terjadi akibat perang terbuka Zionis Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Republik Islam Iran. Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, BoP sudah tak lagi relevan untuk tetap diharapkan sebagai Dewan Perdamaian di Gaza, Palestina menyusul agresi yang dilakukan Zionis dan AS terhadap Iran.

Menurut Connie mengatakan, agresi terhadap Iran yang dimotori oleh AS-Zionis sebagai Ketua dan anggota BoP membuktikan Dewan Perdamaian tersebut hanya bertujuan untuk perang, bukan untuk mendorong perdamaian. Agresi Paman Sam-Zionis ke Negeri Para Mullah yang berdampak lebar ke negara-negara Teluk Arab, menurut Connie menjadi jalan keluar bagi Presiden Prabowo untuk segera menarik diri dari BoP.

“Bapak Presiden Prabowo, dengan segala hormat, ini adalah kesempatan exit door ini bagi Indonesia untuk keluar dari *Board of Paeece*. Karena BoP ini sudah bukan lagi judulnya *Board of Peace*, tetapi sudah menjadi *Board of War* dengan kejadian di Iran ini,” kata Connie melalui siaran video yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Connie, Presiden Prabowo harus mengembalikan doktrin militer, dan geopolitik Indonesia sebagai negara inisiator nonblok. “Tolong Bapak Prabowo, kita memerlukan exit door, dan kita kembali pada posisi kita sebagai nonalignment, atau non-blok,” ujar dia.

Karena menurut Connie peran Indonesia sebagai negara nonblok dapat lebih mudah untuk tetap membawa persoalan, Gaza di Palestina sesuai tujuan perdamaian. “Posisi kita sebagai *non-alignment* atau nonblok akan lebih cantik mainnya, lebih indah, dan lebih firm mainnya,” ujar Connie.

Ia mengatakan, sejak awal, BoP yang dibuat atas kemauan Presiden AS Donald Trump itu memang sulit untuk dipercaya untuk membawa misi perdamaian. Dan Presiden Prabowo semestinya tak gampang untuk membawa Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian *adhoc* diluar mekanisme Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu.

“Sekali lagi, *please*, mundur dari *Board of Peace* yang menjadi *Board of War* ini, dan kembali ke *non-alignment*,” ujar Connie.

Perang terbuka AS-Israel dengan Iran terjadi sejak Sabtu (28/2/2026). Duet penjajah ‘Zionis-Paman Sam’ membuka peperangan dengan membombardir Ibu Kota Teheran, dan berujung pada syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, termasuk para jenderal dan petinggi-petinggi militer Iran. Istri, menantu, dan cucu

Ali Khamenei, pun ikut wafat dalam penyerangan itu. Penyerangan yang dilakukan AS-Israel, pun menyebar ke 24 provinsi di Iran.

Sampai hari keempat (3/3/2026) serangan yang dilakukan terhadap Iran, mencatatkan korban jiwa sedikitnya 550 orang yang kebanyakan adalah warga sipil. Republik Islam Iran bertahan atas serangan itu, dan melakukan perlawanan dengan membalas penyerangan ke wilayah pendudukan Israel.

Serangan balasan dari Iran, juga dengan mengirimkan *drone-drone* penyerbu serta rudal-rudal berdaya ledak besar ke pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di wilayah Uni Emirates Arab (UEA), Qatar, Kuwait, dan di Arab Saudi, juga di Jordania. Belakangan, negara-negara Arab yang wilayahnya dijadikan pangkalan militer AS untuk menyerang Iran, marah karena wilayahnya juga turut diserang Iran. Beberapa negara tersebut, bahkan mengancam akan ikut membantu AS dan Zionis Israel untuk menggempur Iran.

Koding Awal: Agresi AS-Israel ke Iran

Analisis terhadap pemberitaan Republika berjudul “Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace” menunjukkan bahwa berita tersebut membingkai eskalasi konflik antara AS- Israel, dan Iran sebagai momentum yang mendorong pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali keberlanjutan keanggotaannya dalam BoP. Fokus utama berita diarahkan pada pandangan pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang menilai bahwa perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah mengubah konteks keberadaan BoP sehingga kebijakan Indonesia patut dievaluasi berdasarkan kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri yang selama ini dianut.

Narasi berita mengartikulasikan bahwa agresi militer terhadap Iran diposisikan sebagai indikator yang memperkuat keraguan terhadap relevansi BoP sebagai forum yang mengusung agenda perdamaian. Dalam pemberitaan ditegaskan bahwa “Bapak Presiden Prabowo, dengan segala hormat, ini adalah kesempatan *exit door* ini bagi Indonesia untuk keluar dari *Board of Peace*. Karena BoP ini sudah bukan lagi judulnya *Board of Peace*, tetapi sudah menjadi *Board of War* dengan kejadian di Iran ini.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi sebagai titik evaluasi bagi Indonesia untuk menilai kembali manfaat dan konsekuensi dari keterlibatannya di dalam organisasi tersebut. Melalui konstruksi ini, Republika.co.id membingkai evaluasi kebijakan sebagai respons yang rasional terhadap perubahan kondisi geopolitik yang semakin kompleks.

Selain menyorot evaluasi terhadap BoP, berita ini menghubungkan persoalan tersebut dengan identitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dan memiliki sejarah panjang dalam Gerakan Non-Blok. Connie menegaskan, “Tolong Bapak Prabowo, kita memerlukan *exit door*, dan kita kembali pada posisi kita sebagai *nonalignment*, atau non-blok.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa peninjauan kembali keanggotaan Indonesia di BoP sebagai upaya untuk mengembalikan independensi diplomasi nasional. Dengan demikian, keberlanjutan Indonesia di dalam BoP melibatkan efektivitas organisasi dalam menciptakan perdamaian, sekaligus kesesuaiannya dengan arah politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan kemandirian dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun kesan bahwa posisi Indonesia sebagai negara nonblok dinilai memberikan ruang diplomasi yang lebih luas dalam berkontribusi terhadap penyelesaian konflik

di Palestina maupun kawasan Timur Tengah. Dalam perspektif tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan BoP sebagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan. Narasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa setiap perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kredibilitas diplomasi, dan perkembangan lingkungan strategis internasional.

Secara umum, Republika.co.id melalui berita ini membingkai agresi AS- Israel terhadap Iran sebagai momentum yang mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan Indonesia di dalam BoP. Melalui penggunaan pandangan ahli pertahanan sebagai sumber utama, berita membangun pemahaman bahwa peninjauan kembali keanggotaan Indonesia merupakan bagian untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, mempertahankan independensi diplomasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan internasional tetap selaras dengan kepentingan nasional dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.

d. Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS

Tabel 15. Berita Republika.co.id Edisi 4 Maret 2026 (02:47 WIB)

Judul Berita: Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS

Sumber: <https://rejogja.republika.co.id/berita/tbc163282/akademisi-ugm-desak-evaluasi-ri-gabung-bop-dan-perjanjian-dagang-dengan-as>

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan sikap kritis terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keikutsertaan dalam *Board of Peace* (BoP) serta penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) dengan Amerika Serikat. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. M. Baiquni di kampus UGM, Senin (2/3/2026).

Dalam pernyataannya, kalangan akademisi menilai kedua kebijakan tersebut berpotensi menggerus kedaulatan negara dan menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam *Board of Peace* dan penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Menyerukan segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian ART,” kata Baiquni saat membacakan pernyataan sikap akademisi dan civitas UGM, Senin (2/3/2026).

Kebijakan luar negeri ini, disebutnya merugikan dan mengancam kedaulatan negara Indonesia. UGM menilai persoalan dalam perjanjian ART tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi yang dianggap timpang. Dalam kajiannya, kampus menyebut keuntungan terbesar lebih condong ke pihak Amerika Serikat, sementara Indonesia berpotensi memikul kewajiban yang luas, baik di level pemerintah maupun masyarakat. “Ini harus kita cegah dan

juga memprihatinkan adanya penandatanganan ART yang ternyata dalam analisis kami merugikan kedaulatan Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, UGM menyoroti orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dipandang cenderung berpihak pada agresor. Hal itu tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam BoP yang berujung pada konflik. Akademisi menilai situasi tersebut semakin menguatkan urgensi evaluasi ulang ART sebelum berdampak lebih jauh terhadap posisi Indonesia di kancah global. Implementasi ART disebut memerlukan sumber daya besar, mencakup pembiayaan, waktu, dan tenaga.

Penyesuaian regulasi dinilai tak terhindarkan, mulai dari revisi undang-undang, Keppres, PP, Perpres, hingga Permen, serta penyusunan aturan baru. Selain itu, potensi dampak ekonomi dinilai bisa terasa dalam horizon jangka pendek maupun panjang.

“Berbagai klausul yang termuat di dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri bebas dan aktif,” katanya.

Kalangan akademisi juga menilai ART memuat kewajiban untuk patuh pada kebijakan yang akan datang, meski kebijakan tersebut belum dirumuskan. Mereka menyoroti adanya kemungkinan kebijakan ditetapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat, termasuk potensi penerapannya terhadap Indonesia dalam hubungannya dengan negara ketiga.

Sementara pada poin kelima, Baiquni menekankan perlunya analisis komprehensif berbasis evidence-based policy terhadap setiap butir kesepakatan ART, terutama terkait dampaknya bagi ekonomi nasional dan kedaulatan negara. Mengingat cakupannya yang luas lintas sektor, pendekatan multidisiplin dinilai menjadi keharusan.

Dewan Guru Besar UGM juga memandang pemerintah perlu bersikap arif dengan menempatkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara sebagai prioritas utama, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Kompleksitas ART, termasuk putusan Mahkamah Agung USA, dinilai patut menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan final diambil.

Jika proses ratifikasi tidak selaras dengan tujuan undang-undang maupun UUD 1945, opsi renegosiasi, penundaan, hingga pembatalan perjanjian disebut perlu dipertimbangkan.

“Kami mengimbuu akademisi kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multidisiplin terkait dengan dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan diseminasi keilmuan, hasil-hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan, agar masyarakat ikut mencermati, cerdas dan menjadi rakyat berdaulat,” ungkap dia. “Para akademisi UGM siap mendukung setiap upaya memperkuat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidupan,” ucap Baiquni membacakan poin ketujuh pernyataan sikap.

Soroti Ketimpangan Substansi ART

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, mengungkapkan terdapat 211 frasa “Indonesia shall” yang mengindikasikan kewajiban Indonesia menjalankan berbagai ketentuan perjanjian. Sementara itu, hanya sembilan frasa serupa yang merujuk pada kewajiban pihak Amerika Serikat.

“Narasi yang dikembangkan seolah ART fokus pada kebijakan tarif, namun 95 persen pasal-pasal ART mengatur kebijakan non-tarif hingga menjangkau bidang politik, keamanan, dan kedaulatan negara,” katanya.

Ia juga menyoroti sejumlah pasal yang dinilai memberi kewenangan dominan kepada pemerintah Amerika Serikat, termasuk dalam menentukan kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan perjanjian. Selain itu, terdapat klausul yang memungkinkan transmisi kebijakan Amerika Serikat kepada negara ketiga melalui Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menempatkan Indonesia pada posisi rentan dalam hubungan internasional, termasuk membuka peluang retaliasi dari negara lain.

“Politik bebas aktif yang dianut Indonesia sejak merdeka dan peran Indonesia sebagai inisiator Dasa Sila Bandung patut dipertanyakan,” ucap dia.

Sedangkan dari sisi tata kelola, ART disebut berimplikasi pada kebutuhan amendemen besar-besaran terhadap regulasi nasional. Sedikitnya 117 produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga regulasi otoritas sektor keuangan, dinilai perlu disesuaikan atau disusun ulang. Akademisi menilai konsekuensi tersebut bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan kebijakan publik dalam jangka panjang.

“Hal ini adalah ‘badai revolusi kelembagaan’ yang membutuhkan sumber daya sangat besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Wening Udas-moro, menegaskan, sikap kritis yang disampaikan sivitas akademika UGM sepenuhnya dilandasi pertimbangan akademik dan tidak terkait kepentingan tertentu. Seruan peninjauan ulang ART tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum kajian ilmiah, dengan rencana menyampaikan hasilnya pada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan.

“Kita berharap ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang didengarkan supaya apa? Supaya kita betul-betul sebagai bangsa itu mandiri, berdaulat tidak hanya sebuah stempel, tapi sebuah kenyataan, jadi identitas bahwa kita mandiri dan berdaulat,” katanya.

Koding Awal: Evaluasi RI dalam BoP dan ART

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul “Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS” menunjukkan bahwa berita tersebut membingkai keikutsertaan Indonesia di dalam BoP sebagai bagian dari kebijakan luar negeri untuk dikaji kembali berdasarkan pertimbangan akademik, kepentingan nasional, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam konstruksi berita, evaluasi terhadap BoP sebagai hasil refleksi

ilmiah yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara di tengah perubahan dinamika geopolitik global.

Narasi berita menunjukkan kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP dibangun melalui argumentasi yang berangkat dari perspektif akademik. Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia semestinya dievaluasi karena berpotensi menggeser prinsip dasar diplomasi nasional yang selama ini menjadi identitas Indonesia dalam hubungan internasional. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa “Menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam *Board of Peace* dan penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Menyerukan segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian ART.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP diposisikan sebagai kebijakan yang selayaknya dievaluasi karena dinilai berpotensi memengaruhi independensi politik luar negeri dan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa evaluasi terhadap BoP menyangkut konsistensi Indonesia dalam mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam narasi yang disusun, keterlibatan Indonesia di BoP dipersepsikan dapat memunculkan kesan keberpihakan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, sehingga berpotensi mengurangi posisi Indonesia sebagai negara yang dikenal menjunjung sikap independen dalam hubungan internasional. Dengan demikian, evaluasi kebijakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan diplomatik tetap sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara yang me-

ngedepankan perdamaian dan tidak terikat pada kepentingan blok kekuatan tertentu.

Selain itu, pemberitaan menempatkan pendekatan berbasis kajian ilmiah sebagai landasan penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Akademisi UGM mendorong agar setiap keputusan strategis didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap BoP pada pertimbangan akademik yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

Dengan demikian, Republika.co.id dalam berita ini membingkai keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan luar negeri yang memerlukan evaluasi secara mendalam melalui perspektif akademik. Narasi yang dibangun menegaskan bahwa peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, memperkuat kedaulatan negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap berpijak pada kepentingan nasional dan pertimbangan ilmiah. Artinya, evaluasi terhadap BoP diposisikan sebagai proses reflektif untuk menjaga arah diplomasi Indonesia agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi dan dinamika hubungan internasional yang terus berkembang.

e. **UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot**

Tabel 16. Berita Republika.co.id Edisi 4 Maret 2026 (07:40 WIB)

Judul Berita: UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot

Sumber: <https://rejogja.republika.co.id/berita/tbcn6t291/uii-kritik-sikap-pemerintah-soalkonflik-di-kawasan-timur-tengah-bop-dan-art-ikut-disorot>

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah serta perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam keterangan yang dibagikan, Rektor UII, Fathul Wahid, yang mewakili sivitas akademika UII, menilai Pemerintah RI belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam merespons serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.

Sikap pemerintah tersebut, mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Fathul juga menyatakan, keprihatinan mendalam UII atas berbagai kebijakan dan langkah politik lain yang berpotensi melemahkan, kedaulatan negara dalam kerja sama ekonomi internasional, mencederai komitmen konstitusional terhadap penolakan segala bentuk penjajahan, membatasi kebebasan sipil melalui kriminalisasi aktivis, mengabaikan hak-hak warga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional serta menghadirkan kebijakan publik yang belum sepenuhnya akuntabel dan transparan.

“Kami, warga Universitas Islam Indonesia (UII), menyesalkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam menyikapi serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Republik Islam Iran,” katanya, dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (3/3/2026).

UII mendesak pemerintah segera mengutuk serangan tersebut dan secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan mekanisme multilateral. Serangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, serta berpotensi memperluas konflik yang mengganggu stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

“Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan mekanisme multilateral,” ujarnya.

Selain isu geopolitik, UII juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (*Board of Peace*) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut UII, keterlibatan tersebut berpotensi mereduksi prinsip bebas aktif dan mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Selain itu, UII juga mendesak pemerintah membatalkan perjanjian dagang *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) dengan Amerika Serikat.

Fathul mengatakan, perjanjian itu perlu dievaluasi secara terbuka dan transparan karena berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.

“Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa,” kata Fathul.

Suarakan Berbagai Hal

Selain menyoroti situasi global, UII juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman suara kritis. Kampus menilai, demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai, serta mendesak adanya komitmen terhadap reformasi Polri.

“Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara, khususnya kalangan muda dan mahasiswa yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa,” ujarnya.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga menjadi sorotan, termasuk pembangunan di Papua, yang menurut UII harus menghormati hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Negara, kata Fathul, wajib memastikan pembangunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran atau perampasan ruang hidup warga.

Lebih lanjut, Fathul mengatakan kampusnya mendorong agar adanya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut perlu ditinjau secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kebijakan publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan kesehatan.

“Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia. Semoga pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia,” ujarnya.

Koding Awal: Lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri

Analisis berita berjudul “UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot” membingkai keterlibatan Indonesia di dalam BoP sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang selayaknya ditinjau kembali di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Melalui pandangan sivitas

akademika Universitas Islam Indonesia (UII), berita membangun narasi bahwa evaluasi terhadap BoP menjadi penting untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta komitmen konstitusional terhadap perdamaian dunia.

Narasi berita memperlihatkan bahwa kritik yang disampaikan UII bertolak dari penilaian terhadap respons pemerintah Indonesia atas serangan militer AS- Israel terhadap Iran. Dalam pemberitaan dinyatakan bahwa “Kami, warga Universitas Islam Indonesia (UII), menyayangkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam menyikapi serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Republik Islam Iran.” Pernyataan tersebut mendorong agar pemerintah menjaga konsistensi pelaksanaan politik luar negeri yang selama ini menjadi identitas Indonesia. Dengan demikian, evaluasi terhadap BoP diposisikan sebagai bagian refleksi arah kebijakan luar negeri di tengah dinamika konflik internasional.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa keikutsertaan Indonesia di dalam BoP dipandang memiliki implikasi terhadap independensi diplomasi nasional. UII menilai keterlibatan tersebut berpotensi mengurangi konsistensi Indonesia dalam mempertahankan prinsip bebas aktif serta dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Narasi ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BoP pada pertimbangan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri melibatkan instrumen hubungan antarnegara, sekaligus sebagai representasi identitas dan komitmen moral Indonesia dalam percaturan internasional.

Berita ini menempatkan suara akademisi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan tersebut, *Republika.co.id* membangun kesan bahwa evaluasi terhadap BoP merupakan bagian dari proses demokratis yang melibatkan kontribusi perguruan tinggi dalam memberikan masukan berbasis pengetahuan. Hal ini diperkuat melalui pernyataan bahwa “Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama evaluasi mengarah pada mempertanyakan keanggotaan Indonesia di BoP, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap dilandasi prinsip kemandirian, kesetaraan, dan kepentingan nasional.

Pendek kata, dalam berita ini *Republika.co.id* mengkonstruksi evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di dalam BoP sebagai langkah penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya kompleksitas geopolitik global. Narasi yang dibangun menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor yang berperan dalam mengawal arah kebijakan luar negeri melalui kritik akademik yang konstruktif. Jadi, evaluasi terhadap BoP sebagai cara untuk memastikan bahwa setiap keputusan diplomatik tetap sejalan dengan amanat konstitusi, kepentingan nasional, dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.

2. Legitimasi *Board of Peace* Dipertanyakan
- a. Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian

Tabel 17. Berita [Republika.co.id](https://news.republika.co.id) Edisi 1 Maret 2026 (10:52 WIB)

Judul Berita: Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tb7c44393/anggota-dpr-agresi-asisrael-ke-iran-bukti-bop-tidak-bawa-perdamaian>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Agresi militer yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Islam Iran membuktikan keraguan internasional selama ini atas adanya *Board of Peace* (BoP) atau Dewan Perdamaian. AS merupakan dedengkot, sekaligus pemimpin BoP yang dikampanyekan sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, dan Israel sebagai salah satu anggotanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia TB Hasanuddin mengatakan penyerangan militer terbuka terhadap Iran menunjukkan watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamaian. TB Hasanuddin menilai, penyerangan Israel-AS terhadap Iran juga menunjukkan pepesan kosong pembentukan BoP untuk membuat perdamaian bagi Bumi Palestina.

“Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justru menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas,” kata Hasanuddin kepada *Republika* melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Kata TB Hasanuddin, penyerangan militer terbuka Israel-AS terhadap Iran bukanlah peristiwa yang biasa. Justeru kata politikus PDI Perjuangan itu ambisi perang untuk menghancurkan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei oleh Presiden AS Donald Trump bersama penjahat Benjamin Netanyahu itu bak menyiram bahan bakar baru untuk terus ‘membakar’ situasi di kawasan Timur Tengah. Dan situasi tersebut, juga bakal berdampak langsung terkait upaya membuat perdamaian di Palestina yang belakangan dikoar-koarkan oleh BoP.

“Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar memiliki niat yang tulus untuk perdamaian,” kata Hasanuddin.

Pemerintah Indonesia Diminta Tegas

Terkait perang AS bersama Israel terhadap Iran yang sudah terjadi saat ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini, kata TB Hasanuddin menganut paham konstitusional yang menolak segala macam bentuk agresi, dan penjajahan, serta mendukung perdamaian dunia.

“Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia. Apalagi pemerintah kita sudah berpartisipasi jauh selama ini tentang isu-isu perdamaian di Timur Tengah,” kata TB Hasanuddin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung, pun semestinya dapat menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran atas situasi saat ini. Pujian setinggi langit terhadap Presiden Prabowo dalam lawatan-lawatan diplomasinya ke banyak negara selama ini, harus menjadi modal yang kuat untuk terlibat langsung dalam upaya penghentian agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan AS, maupun Zionis Israel selama ini.

“Melalui partisipasi dalam BoP, sudah saatnya aktivisme diplomasi kita (Indonesia) yang aktif dalam bulan-bulan terakhir ini, menunjukkan hasil apakah benar kita dipandang dan memiliki posisi strategis secara global, atau malah jauh panggang dari api,” ujar TB Hasanuddin.

Koding Awal: BoP ‘pepesan kosong’

Analisis berita berjudul “Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian” menunjukkan serangan militer AS- Israel terhadap Iran menjadi peristiwa yang memicu keraguan terhadap kredibilitas BoP sebagai forum yang mengusung misi perdamaian. Dalam berita tersebut, tindakan militer yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki posisi penting di dalam BoP dipandang bertolak belakang dengan tujuan utama organisasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi antara nilai yang diklaim dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Narasi berita memperlihatkan bahwa legitimasi BoP dipersoalkan karena organisasi tersebut dinilai gagal menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan TB Hasanuddin bahwa “Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justru menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tindakan militer selain dipandang memperburuk situasi keamanan kawasan, serta mengurangi kepercayaan terhadap organisasi yang selama ini mengusung agenda perdamaian. Dengan demikian,

legitimasi BoP dipertanyakan karena terdapat ketidaksesuaian antara tujuan normatif organisasi dan realitas yang berkembang dalam hubungan internasional.

Tema tersebut semakin menguat ketika pemberitaan mengaitkan konflik Iran dengan keberadaan para aktor utama di dalam BoP. TB Hasanuddin menyatakan bahwa “Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar memiliki niat yang tulus untuk perdamaian.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keraguan terhadap BoP diarahkan pada institusinya, sekaligus pada kepemimpinan dan aktor-aktor yang berada di dalam organisasi tersebut. Dalam konteks ini, kredibilitas organisasi dipandang dipengaruhi oleh tindakan para pemimpinnya, sehingga setiap keputusan politik yang berujung pada konflik turut memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi BoP.

Di sisi lain, berita menunjukkan harapan agar pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih jelas dalam merespons perkembangan tersebut. Desakan agar Presiden dan Menteri Luar Negeri menyampaikan sikap resmi mencerminkan pandangan bahwa Indonesia idealnya mempertahankan konsistensinya sebagai negara yang menolak agresi serta mendukung penyelesaian konflik melalui perdamaian. Meskipun demikian, fokus utama pemberitaan tetap berada pada munculnya keraguan terhadap kemampuan BoP dalam menjalankan mandat yang selama ini diklaim sebagai dasar pembentukannya.

Dengan demikian, tema **legitimasi *Board of Peace* dipertanyakan** terbentuk melalui rangkaian narasi yang menempatkan agresi militer AS- Israel terhadap Iran sebagai bukti adanya ketidaksesuaian antara tujuan perdamaian yang diusung BoP dengan praktik politik yang dilakukan oleh aktor-aktor utamanya. Kondisi tersebut menghadirkan pemaknaan bahwa legitimasi sebuah organisasi internasional dipengaruhi oleh visi dan misinya, maupun oleh konsistensi tindakan para anggotanya dalam mewujudkan nilai-nilai perdamaian yang mereka deklarasikan.

b. AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai *Board of Peace* Bukan Instrumen Perdamaian

Tabel 18. Berita *Republika.co.id* Edisi 3 Maret 2026 (23:20 WIB)

Judul Berita: AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai *Board of Peace* Bukan Instrumen Perdamaian

Sumber: <https://khazanah.republika.co.id/berita/tbc01g430/asisrael-serang-iran-awg-menilai-board-of-peace-bukan-instrumen-perdamaian>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serangan militer gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran sejak 28 Februari 2026 memicu eskalasi konflik besar di kawasan Timur Tengah dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Aqsa Working Group (AWG) melihat bahwa serangan AS-Israel tersebut sebagai bukti bahwa *Board of Peace* (BoP) yang dibentuk Donald Trump bukan instrumen perdamaian global.

Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Zionis Israel akhirnya melakukan serangan militer dan melanggar kedaulatan Republik Islam Iran dimulai pada 28

Februari 2026 yang mengakibatkan Ali Khamenei menjadi martir. Pelanggaran itu memicu serangan balasan Iran ke wilayah pendudukan Zionis Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Ia menilai, situasi ini tidak dapat dipisahkan dari konteks penjajahan dan genosida di Palestina. Iran merupakan salah satu dari sedikit negara Muslim yang secara konsisten dan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina serta menolak intervensi asing.

“Ketegangan antara Iran dan Amerika-Israel saat ini dimanfaatkan oleh kedua aktor tersebut untuk memperkeruh stabilitas keamanan Timur Tengah dan mengalihkan perhatian dunia, dampaknya Zionis Israel berpotensi semakin leluasa melakukan berbagai tindakan represif di Palestina,” kata Anshorullah kepada Republika, Senin (2/3/2026).

Anshorullah mengungkapkan, terbukti pembatasan ketat oleh pasukan Zionis Israel menyebabkan Masjid Al Aqsa tidak dipenuhi jamaah sholat tarawih pada 28 Februari 2026, sebuah catatan kelam bagi umat Islam. Masjid Ibrahimy juga diblokir total dengan dalih keamanan menyusul serangan balasan Iran ke Israel (wilayah Palestina yang dijajah).

Sementara itu, serangan Zionis Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat kian meningkat, namun minim sorotan media karena perhatian dunia tersita oleh eskalasi konflik Amerika-Israel dengan Iran. Oleh karena itu, AWG mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut.

Pertama, AWG mengutuk serangan militer Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional. Tindakan militer semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam tatanan global yang berlandaskan hukum.

“Kedua, serangan tersebut adalah manifestasi nyata pertama dari *Board of Peace* sekaligus membuktikan bahwa BoP bukanlah instrumen perdamaian, melainkan imperialism,” ujar Anshorullah.

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan Amerika-Israel juga memper tegas bahwa tujuan BoP bukan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sebaliknya, untuk memperkuat penjajahan Zionis Israel di

Palestina dan Masjid Al Aqsa dalam rangka meretas Israel Raya (Greater Israel).

Karena itu, *Board of Peace* semakin absurd dan kehilangan legitimasi moral dan hukum. Ketiga, AWG kembali menekankan agar Presiden Prabowo Subianto segera menarik diri dari *Board of Peace*.

Serangan militer AS-Israel ke negara berdaulat seperti Iran semakin membuktikan bahwa BoP tidak mampu menjaga stabilitas dunia, bahkan sang inisiator yakni Donald Trump menjadi aktor utama penyerangan terhadap Iran.

“Keempat, kekacauan dan intervensi yang dilakukan oleh kekuatan hegemonik di berbagai belahan dunia termasuk di Iran, Venezuela, dan wilayah lain, merupakan upaya terkoordinasi untuk menjaga hegemoni mereka dan melanggengkan penjajahan di Palestina, khususnya terhadap Masjid Al-Aqsa dan umat Palestina yang tertindas, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga melanggengkan penderitaan rakyat tak berdosa,” kata Anshorullah.

Kelima, AWG menyayangkan sikap sejumlah negara Arab dan negara Teluk yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi serangan militer AS-Israel. Persatuan umat, solidaritas Islam, dan upaya perdamaian sejati jauh lebih penting dan mendesak daripada tindakan yang justru memperluas eskalasi konflik dan merusak stabilitas kawasan.

Anshorullah menegaskan, yang keenam, AWG menyerukan kepada seluruh komunitas internasional termasuk PBB dan OKI, organisasi masyarakat sipil, serta para pemimpin negara untuk bersatu menghentikan agresi militer AS-Israel ke Iran dan negara manapun di dunia, termasuk Palestina. Seluruh pihak bertanggungjawab untuk memperjuangkan perdamaian berkelanjutan, menghormati kedaulatan negara, serta menghentikan praktik agresi yang merusak tatanan global.

“Aqsa Working Group menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya banyak warga Iran dan pemimpin mereka, Ali Khamenei,” ujar Anshorullah.

Koding Awal: BoP bukan instrumen perdamaian

Analisis berita Republika.co.id berjudul “AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai Board of Peace Bukan Instrumen Perdamaian” menunjukkan rangkaian narasi yang menempatkan serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memunculkan keraguan terhadap kredibilitas BoP sebagai organisasi yang mengusung agenda perdamaian. Kehadiran *Board of Peace* tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong penyelesaian konflik, melainkan justru dipertanyakan karena tindakan negara-negara yang memiliki peran sentral di dalamnya dinilai bertolak belakang dengan nilai-nilai perdamaian yang diklaim.

Narasi berita memperlihatkan bahwa agresi militer terhadap Iran sebagai bukti nyata ketidaksesuaian antara tujuan normatif BoP dengan praktik di tingkat internasional. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Muhammad Anshorullah yang menyebut bahwa “Kedua, serangan tersebut adalah manifestasi nyata pertama dari *Board of Peace* sekaligus membuktikan bahwa BoP bukanlah instrumen perdamaian, melainkan imperialism.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi BoP dipertanyakan karena organisasi yang dibentuk dengan membawa narasi perdamaian justru diasosiasikan dengan tindakan militer yang memperluas konflik. Dalam konteks ini, makna perdamaian yang melekat pada nama organisasi dianggap kehilangan relevansinya ketika realitas di lapangan memperlihatkan meningkatnya eskalasi kekerasan.

Tema tersebut semakin menguat melalui pandangan bahwa tindakan AS-Israel berdampak pada konflik Iran, maupun dinilai memengaruhi situasi di Palestina. Berita ini menjelaskan bahwa perhatian dunia terhadap konflik Iran berpotensi mengalihkan fokus internasional dari kondisi kemanusiaan di Palestina. Atas dasar itu, AWG menilai bahwa keberadaan BoP tidak mampu menjalankan

tujuan yang selama ini diklaim sebagai dasar pembentukannya. Penilaian tersebut diperkuat melalui pernyataan bahwa BoP “semakin absurd dan kehilangan legitimasi moral dan hukum.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keraguan terhadap BoP diarahkan pada efektivitas organisasi dalam menciptakan perdamaian, serta menyangkut aspek moral dan legalitas yang menjadi fondasi legitimasi sebuah organisasi internasional.

Selain mempertanyakan legitimasi BoP, berita ini memperlihatkan dorongan agar Indonesia meninjau kembali keterlibatannya dalam organisasi tersebut. Seruan kepada pemerintah untuk menarik diri dari BoP diposisikan sebagai konsekuensi logis dari menurunnya kepercayaan terhadap organisasi yang dinilai tak lagi mencerminkan nilai-nilai perdamaian. Meskipun demikian, fokus utama pemberitaan tetap berada pada pemaknaan bahwa tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor utama BoP mengurangi kredibilitas organisasi tersebut di mata publik. Dengan demikian, isu mengenai keanggotaan Indonesia hadir sebagai implikasi dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya legitimasi BoP itu sendiri.

Secara umum, tema **legitimasi BoP dipertanyakan** dalam berita tersebut terbentuk melalui penggambaran kontradiksi antara tujuan perdamaian yang diusung BoP dengan praktik politik dan militer yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki posisi penting di dalam organisasi tersebut. Pemberitaan menunjukkan bahwa legitimasi sebuah organisasi internasional ditentukan oleh visi yang dinyatakan secara formal, serta oleh konsistensi tindakan para aktornya dalam menghormati kedaulatan negara, menjunjung hukum internasional, dan mewujudkan perdamaian yang menjadi dasar keberadaannya.

c. **Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas *Board of Peace***

Tabel 19. Berita [Republika.co.id](https://news.republika.co.id) Edisi 1 Maret 2026 (09:04 WIB)

Judul Berita: Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas *Board of Peace*

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tb772r328/pakar-serangan-as-ke-iran-jadi-ujian-kredibilitas-board-of-peace>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hubungan internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menanggapi serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran. Katanya, serangan tersebut menjadi ujian kredibilitas *Board of Peace* atau Dewan Perdamaian.

“Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian melalui *Board of Peace* (BoP),” ujar Ahmad dalam keterangan yang dikonfirmasi, Ahad (1/3/2026).

Selain itu, dia memandang serangan kepada Iran tersebut membuat negara-negara Islam yang relatif independen, seperti Turki maupun Indonesia, agar dapat merefleksikan kembali kerja sama dengan BoP.

Sementara itu, dia memandang semua elemen kekuatan dunia perlu mendorong deeskalasi dalam konflik AS-Israel dan Iran tersebut. Terlebih, upaya AS-Israel yang seolah menetralisasi Iran bukan hanya soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan kekuatan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan bila yang terjadi di kawasan Timur Tengah dianggap sebagai hal normal dan dunia berdiam diri, maka langkah AS secara mandiri ataupun bersama Israel berpotensi besar menyasar ke belahan dunia lain.

“Termasuk Greenland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya,” katanya.

Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Pada kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump menyatakan militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Salah satu serangan AS dengan Israel berupa tujuh roket yang menghantam Teheran, dan dekat dengan kediaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Kemudian Iran meluncurkan serangan roket terhadap Israel, dan sejumlah target lain di Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain.

Adapun Kementerian Luar Negeri mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Koding Awal: Retorika BoP vs praktik militer

Analisis berita Republika.co.id berjudul “*Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas Board of Peace*” menunjukkan narasi yang menyorot pertentangan antara tujuan normatif BoP sebagai forum yang mengusung agenda perdamaian dengan tindakan militer yang dilakukan oleh AS- Israel terhadap Iran. Dalam pemberitaan ini, konflik sebagai momentum yang menguji konsistensi nilai-nilai perdamaian yang selama ini dikaitkan dengan keberadaan BoP.

Narasi berita mengartikulasikan bahwa tindakan militer tersebut memunculkan keraguan terhadap kredibilitas BoP sebagai wadah yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Hal ini terlihat dalam pernyataan Ahmad Khoirul Umam yang menegaskan

bahwa “Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP).” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bahasa politik yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian dengan realitas penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen penyelesaian konflik. Dengan demikian, makna perdamaian yang dipromosikan melalui BoP dipersepsikan mengalami tantangan ketika praktik politik internasional justru memperlihatkan eskalasi kekerasan.

Lebih lanjut, berita ini menggambarkan bahwa dinamika tersebut mendorong negara-negara yang selama ini dikenal memiliki posisi diplomasi relatif independen, termasuk Indonesia, untuk merefleksikan kembali bentuk kerja sama yang dijalin dengan BoP. Refleksi tersebut sebagai upaya menilai kembali apakah organisasi tersebut masih mampu menjalankan fungsi normatifnya dalam menjaga perdamaian. Dengan kata lain, praktik militer yang berlangsung di lapangan menjadi tolok ukur bagi publik maupun komunitas internasional dalam menilai konsistensi antara komitmen dan implementasi agenda perdamaian.

Di sisi lain, pemberitaan juga memperluas makna konflik dengan menempatkan serangan terhadap Iran sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih besar. Pandangan bahwa tindakan militer tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dipandang memiliki konsekuensi yang melampaui hubungan bilateral antarnegara. Kekhawatiran bahwa intervensi serupa dapat meluas ke kawasan lain semakin memperkuat kesan bahwa retorika stabilitas internasional belum sepenuhnya tercermin dalam praktik politik global yang berlangsung saat ini.

Secara umum, legitimasi BoP menyorot **retorika politik BoP versus praktik militer di lapangan. Hal ini** dikonstruksi melalui penekanan pada kesenjangan antara narasi perdamaian yang diusung BoP dengan tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor utama yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa kredibilitas suatu forum perdamaian ditentukan oleh visi dan tujuan yang dikemukakan dalam ranah diplomatik, maupun oleh konsistensi tindakan para aktornya dalam menghadapi konflik internasional. Ketika retorika perdamaian tidak diikuti oleh praktik yang sejalan, legitimasi moral dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut pun runtuh.

d. Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP

Tabel 20. Berita Republika.co.id Edisi 1 Maret 2026 (04:25 WIB)

Judul Berita: Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP

Sumber: <https://news.republika.co.id/berita/tb6u6f393/ketua-mui-serangan-asisrael-ke-iran-runtuhkan-legitimasi-bop>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menilai serangan militer Israel-Amerika Serikat terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia. Serangan itu menurutnya juga membuat Dewan Perdamaian alias *Board of Peace* (BoP) yang diketuai Presiden AS Donald Trump kehilangan legitimasi.

“Serangan ini menjadi bukti konkrit bahwa Trump sejatinya perusak dan penghancur perdamaian. Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima Republika, Ahad.

Menurutnya, Trump benar-benar seorang aktor yang telah membajak kata-kata “peace” alias “perdamaian” justru untuk ambisi hegemonik dan imperialistiknya. “Dengan adanya serangan terhadap Iran maka Trump dengan BoP-nya tak bisa dipercaya menjadi badan yang memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina,” kata dia melanjutkan.

Sudarnoto menekankan, bukan saja Iran yang telah dikorbankan oleh ambisi hegemonik-imperialistik Israel-Amerika. Tetapi juga kawasan teluk dan bahkan wilayah dunia lain juga terkena dampak negatif dan destruktif. “Ini memang merupakan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar di mana Israel dan Amerika adalah pihak yang harus bertanggung jawab.”

Serangan AS-Israel ke Iran yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) dini hari menurutnya jelas merupakan upaya sistematis untuk melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, bahkan menghalangi dukungan Iran terhadap perjuangan Palestina. Hal itu juga cara untuk melakukan tekanan politik agar dominasi regional Israel atas Palestina benar-benar bisa terjamin.

“Agresi Amerika-Israel ini akan mendorong perang regional terutama di Timur Tengah. Ini memang yang dimaksudkan oleh Israel-Amerika sehingga Timur Tengah benar-benar lumpuh dan yang pada akhirnya Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di bawah kendali Israel-Amerika.”

Sehubungan dengan hal itu, menurutnya Indonesia hendaknya tidak terlibat dan harus dengan tegas menolak segala aksi agresi militer, menegakkan hukum internasional, dan memperjuangkan penyelesaian damai berbasis keadilan.

Koding Awal: Legitimasi BoP ‘runtuh’

Analisis berita berjudul “Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP” menunjukkan narasi ihwal menurunnya kredibilitas BoP di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai indikator bahwa kepemimpinan organisasi yang mengusung agenda perdamaian tidak mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukannya.

Narasi berita memperlihatkan bahwa legitimasi kepemimpinan BoP dipersoalkan karena tindakan yang dilakukan oleh aktor utamanya dinilai bertentangan dengan prinsip perdamaian. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Sudarnoto Abdul Hakim bahwa “Serangan ini menjadi bukti konkrit bahwa Trump sejatinya perusak dan penghancur perdamaian. Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena nyatanya tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penurunan legitimasi BoP terkait dengan penilaian terhadap kualitas kepemimpinan yang dianggap tidak mampu merepresentasikan misi perdamaian. Dalam konteks ini, kepemimpinan internasional sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi internasional.

Tema tersebut semakin menguat ketika pemberitaan menempatkan Donald Trump sebagai simbol dari praktik kepemimpinan yang dinilai bertolak belakang dengan makna perdamaian. Sudarnoto menyatakan bahwa “Dengan adanya serangan terhadap Iran maka Trump dengan BoP-nya tak bisa dipercaya menjadi badan yang memperjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kritik diarahkan kepada kapasitas moral pemimpin dalam membawa organisasi menjalankan mandat

yang diembannya. Akibatnya, kepemimpinan internasional dalam BoP dipersepsikan kehilangan otoritas untuk menjadi mediator maupun penggerak penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, berita menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap Iran dipandang memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan perjuangan Palestina. Dalam pandangan yang disampaikan, agresi tersebut sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik yang memperkuat dominasi kekuatan tertentu di kawasan. Pemaknaan ini semakin mempertegas bahwa kepemimpinan BoP dipersepsikan menjadi bagian dari dinamika konflik yang berlangsung. Oleh karena itu, muncul harapan agar Indonesia tetap mempertahankan sikap yang konsisten dalam menolak agresi militer, menjunjung hukum internasional, dan mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

3. Delegitimasi Kepemimpinan Internasional dalam *Board of Peace*

a. MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya

Tabel 21. Berita [Republika.co.id](https://republika.co.id) Edisi 3 Maret 2026 (06:54 WIB)

Judul Berita: MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya

Sumber: <https://khazanah.republika.co.id/berita/tbaqe9483/mui-trump-terbukti-perusak-brutal-perdamaian-bop-pimpinannya-tak-bisa-dipercaya>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim, menilai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menjadi bukti nyata runtuhnya legitimasi moral Dewan Perdamaian/*Board of Peace* (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Sudarnoto menilai, langkah militer tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Trump, baik sebagai Presiden Amerika Serikat maupun sebagai chairman BoP, tidak mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dunia.

“Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian. Karena itu, BoP yang dia pimpin tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan perdamaian,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Selasa (3/3/2026).

Sudarnoto bahkan menilai BoP telah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasi di mata dunia internasional. Ia menyebut lembaga tersebut hanya menjadi kamuflase dengan motif imperialistik. “Itu kamuflase yang bermotif imperialistik. BoP runtuh secara moral, dan kehilangan legitimasinya,” ucap dia.

Atas dasar itu, MUI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperhitungkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Menurut Sudarnoto, langkah serupa juga sepatutnya dipertimbangkan oleh negara-negara Muslim lainnya.

“BoP tidak berguna untuk menciptakan perdamaian, apalagi memerdekakan Palestina. Justru waktunya sekarang negara-negara Muslim bersatu padu, jangan membiarkan diri diadu domba dan dipecah belah oleh imperialisme Amerika-Israel sebagaimana yang dilakukan saat ini dengan serangan terhadap Iran,” kata dia.

Kendati demikian, Sudarnoto mengingatkan bahwa sikap Indonesia tetap harus berpijak pada amanah konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

la menekankan pentingnya langkah proaktif Indonesia dalam merespons dinamika global, namun tetap ditempuh melalui jalur diplomatik yang terukur, persuasif, serta memperhatikan kepentingan nasional (national interest).

“Indonesia berkewajiban untuk ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945. Sikap pro aktif penting ditempuh. Namun demikian, harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan langkah lain yang sangat terukur dan persuasif dengan tetap memberikan perhatian kepada national interest kita,” jelasnya.

Sudarnoto juga meyakini seluruh elemen masyarakat Indonesia akan memberikan dukungan kepada Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi sikap terhormat dan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.

“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan civil society Indonesia insyaAllah akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah yang terhormat,” ucap Sudarnoto.

Koding Awal: Trump perusak perdamaian

Analisis berita berjudul “*MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya*” menunjukkan narasi yang menempatkan kepemimpinan Donald Trump sebagai faktor utama yang menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap BoP di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memperlihatkan ketidaksesuaian antara peran seorang pemimpin organisasi perdamaian dengan tindakan politik yang dinilai justru memperbesar eskalasi

konflik. Akibatnya, legitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP dipersoalkan karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai perdamaian yang menjadi dasar keberadaan organisasi tersebut.

Narasi berita mencerminkan bahwa penilaian terhadap Donald Trump berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sekaligus pula dengan posisinya sebagai ketua BoP. Hal tersebut terlihat dalam pernyataan Sudarnoto Abdul Hakim bahwa “Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian. Karena itu, BoP yang dia pimpin tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan perdamaian.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh kredibilitas pemimpinnya. Dalam konteks ini, tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat dipersepsikan turut mengurangi otoritas moral Donald Trump sebagai figur yang seharusnya mengarahkan organisasi pada upaya penyelesaian konflik secara damai.

Tema delegitimasi kepemimpinan semakin menguat ketika pemberitaan menyebut bahwa BoP “sudah runtuh secara moral, dan kehilangan legitimasinya.” Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa hilangnya kepercayaan terhadap organisasi sebagai konsekuensi dari kepemimpinan yang dianggap gagal menjaga konsistensi antara komitmen perdamaian dengan praktik politik yang dijalankan. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan internasional melibatkan kemampuan seorang pemimpin menjaga integritas, kredibilitas, dan keselarasan antara visi organisasi dengan tindakan nyata di tingkat global.

Selain mengkritik kepemimpinan BoP, berita ini merefleksikan desakan agar Indonesia mengevaluasi posisinya di dalam organisasi tersebut. Meskipun demikian, pemberitaan tetap menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil Indonesia harus berlandaskan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia melalui cara-cara yang damai. Penekanan pada diplomasi yang terukur, persuasif, dan berorientasi pada kepentingan nasional menunjukkan bahwa kritik terhadap kepemimpinan BoP untuk memastikan bahwa kerja sama internasional dilakukan bersama aktor yang memiliki kredibilitas dan komitmen yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan kata lain, tema **delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP** terbentuk melalui penggambaran bahwa tindakan Donald Trump sebagai pemimpin BoP dinilai bertentangan dengan mandat perdamaian yang diemban organisasi tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin internasional dibangun melalui konsistensi antara komitmen normatif dan tindakan politik yang dilakukan. Ketika keduanya dipersepsikan tidak selaras, kepercayaan terhadap kepemimpinan maupun organisasi yang dipimpinnya ikut mengalami penurunan, sehingga kredibilitas BoP sebagai forum perdamaian semakin dipertanyakan.

Berikut ini 10 berita terkait BoP dalam Republika.co.id edisi Maret 2026 seperti tertera dalam Tabel 22:

Tabel 22. Kategorisasi Tematik Berita Kontroversi Indonesia dalam *Board of Peace* pada Republika.co.id

No	Judul Berita	Koding Awal	Kategori Tema
1.	Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran	Kontroversi Indonesia dalam BoP	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
2.	Giliran purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur Dari BoP	Purn. Jenderal desak RI mundur dari BoP	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
3.	'Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari <i>Board of Peace</i> '	'Agresi AS-Israel ke Iran	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
4.	Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS	Evaluasi RI dalam BoP dan ART	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
5.	UJI Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot	Lemahnya implementasi prinsip politik 'bebas-aktif'	Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP
6.	Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP	Legitimasi BoP 'runtuh'	Legitimasi BoP dipertanyakan
7.	Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas <i>Board of Peace</i>	Retorika BoP	Legitimasi BoP dipertanyakan
8.	Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian	BoP 'pepesan kosong'	Legitimasi BoP dipertanyakan
9.	AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai <i>Board of Peace</i> Bukan Instrumen Perdamaian	BoP bukan instrument perdamaian	Legitimasi BoP dipertanyakan
10.	MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya	Trump Perusak Perdamaian	Delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Dari Tabel 22 menunjukkan, struktur tematik Republika.co.id saling terjalin membentuk satu konfigurasi isu. Hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia dalam BoP di tengah eskalasi konflik Iran–AS–Israel. Keterjalinan ini memperlihatkan bagaimana isu kebijakan luar negeri, legitimasi institusi internasional, dan praktik militer global saling berhubungan dalam satu ruang wacana yang dinamis.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa media ini menempatkan perhatian pada dimensi evaluatif terhadap posisi Indonesia dibandingkan dengan pembahasan mengenai legitimasi maupun kepemimpinan internasional dalam BoP. Tematik evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP menjadi ‘landasan fundamental’ sekaligus krusial. Narasi akademisi dan institusi seperti UII dan UGM menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia “berpotensi mereduksi prinsip bebas aktif” serta “melemahkan kedaulatan negara.” Evaluasi ini menyentuh aspek legal dan ekonomi. Hal ini terlihat dari kritik terhadap perjanjian ART yang dinilai timpang dan berisiko terhadap kedaulatan nasional.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruksi pemberitaan cenderung diarahkan pada upaya menilai sikap, respons, dan konsekuensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pembentukan BoP. Dengan kata lain, keberadaan BoP sebagai institusi internasional bukan menjadi pusat perhatian utama dalam pemberitaan. Sebaliknya, media lebih menekankan posisi Indonesia dan respons pemerintah dalam menyikapi dinamika geopolitik yang berkembang.

Tema ini kemudian terhubung dengan legitimasi BoP yang dipertanyakan. Berbagai aktor menyebut BoP “kehilangan legitimasi moral, politik, dan hukum,” bahkan “bukan instrumen perdamaian, melainkan imperialisme.” Di sini, evaluasi kebijakan bertransformasi

menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi itu sendiri. Tema ini pada dasarnya menyentuh retorika politik versus praktik militer di lapangan. Pakar menegaskan adanya “kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan,” yang terlihat dari eskalasi serangan di Iran dan kawasan Timur Tengah. Hal ini memperlihatkan jarak antara narasi perdamaian BoP dan realitas kekerasan yang terus berlangsung.

Lebih jauh, tematik ‘legitimasi BoP dipertanyakan’ mengindikasikan bahwa legitimasi BoP menjadi isu yang diperdebatkan dalam pemberitaan. Republika.co.id lebih mengangkat pertanyaan tentang dasar pembentukan BoP serta sejauh mana lembaga tersebut memperoleh pengakuan dari komunitas internasional. Dengan demikian, media turut membangun ruang diskusi yang mendorong pembaca mempertimbangkan apakah BoP memiliki landasan normatif dan politik yang memadai untuk menjalankan perannya.

Sementara itu, tematik “delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP” ditemukan pada satu berita namun memperkuat keterjalinan isu. Figur Donald Trump dan Benjamin Netanyahu digambarkan sebagai “perusak brutal perdamaian,” yang menunjukkan bahwa krisis legitimasi bersifat institusional, personal dan simbolik. Kepemimpinan internasional diposisikan sebagai faktor yang memperdalam ketidakpercayaan terhadap BoP.

Secara keseluruhan, keterjalinan ketiga tema ini menunjukkan bahwa polemik bergabungnya Indonesia dalam BoP sebagai isu kebijakan luar negeri yang kontroversial. Struktur tematik tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pemberitaan lebih berorientasi pada kepentingan nasional sekaligus menghadirkan sikap kritis terhadap

dinamika tata kelola internasional. Selain itu, kasus BoP mempertemukan kepentingan geopolitik, krisis legitimasi, serta ketegangan antara idealisme perdamaian dan realitas konflik bersenjata. Indonesia dalam konteks ini diposisikan sebagai ‘aktor diplomatik’ sekaligus sebagai subjek yang terus diuji konsistensinya dalam menjaga prinsip bebas aktif di tengah dinamika global yang kompleks.

Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bagaimana media berfungsi sebagai penyampai informasi, sekaligus turut membentuk cara publik memahami kebijakan luar negeri Indonesia di tengah perubahan lanskap politik global (Setiawan, 2019).

Representasi Editorial: Ideologi Media dan Perspektif Kebijakan Redaksional

Representasi editorial menunjukkan bahwa tema **Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP** pada Republika.co.id muncul sebagai tema yang lebih banyak dibandingkan dua tema lainnya. Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa Republika.co.id memosisikan kontroversi Indonesia dalam BoP sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan arah politik luar negeri Indonesia. Temuan ini sekaligus menunjukkan penekanan redaksional pada aspek-aspek tertentu dari peristiwa yang dianggap memiliki signifikansi lebih besar bagi kepentingan publik Indonesia.

Penekanan tersebut tercermin dalam perhatian redaksional Republika.co.id yang lebih diarahkan pada konsekuensi diplomatik yang dihadapi Indonesia dibandingkan pada dinamika konflik militer di Timur Tengah itu sendiri. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa media menjalankan fungsi informatif (Baran & Davis, 2009), serta melakukan proses pemaknaan (konstruksi realitas) dengan menye-

leksi dan menonjolkan aspek realitas yang dianggap paling relevan bagi khalayak (Mast & Temmerman, 2021; Fadeji et al., 2025). Dalam konteks ini, isu BoP direpresentasikan sebagai ruang untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan nasional, dan komitmen terhadap perdamaian internasional. Temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa eksistensi media memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan politik karena media berperan dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu-isu politik (Valiè et al., 2023).

Temuan empiris tersebut dapat ditelusuri melalui perspektif konstruktivis yang memandang bahwa pemberitaan merupakan hasil konstruksi realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan penyusunan fakta sehingga menghasilkan makna tertentu bagi khalayak. Pandangan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966, 1990) bahwa realitas dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks media massa, proses konstruksi sosial tersebut berlangsung melalui aktivitas organisasi media dan kerja jurnalistik para wartawan yang mengolah realitas menjadi berita.

Sejalan dengan gagasan Berger dan Luckmann tersebut, Barnard (2018) menyebutkan ranah jurnalisme sebagai konstruksi sosial yang terus berkembang. Itu sebabnya, jurnalis merupakan ‘aktor sosial’ yang notabene sebagai ‘aktor reflektif’ dalam menegosiasikan nilai dan makna sosial. Senada dengan Barnard, Mulyana (2024) menekankan bahwa organisasi media merupakan hasil dari konstruksi sosial manusia, khususnya para wartawan dan institusi pers secara keseluruhan. Menurut Mulyana, melalui proses internalisasi wartawan

mengamati dan menyerap berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, melalui proses eksternalisasi, wartawan menafsirkan realitas yang mereka temukan di lapangan dan mengonstruksinya menjadi berita dalam bentuk tulisan maupun tayangan visual. Berita yang dipublikasikan kemudian memasuki tahapan selanjutnya yaitu proses objektivasi sebagai realitas sosial yang dapat diakses publik, sementara khalayak menginternalisasi makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks buku ini, proses tersebut tercermin pada cara Republika.co.id memilih aspek-aspek tertentu dari peristiwa (BoP) untuk ditampilkan sebagai fokus pemberitaan. Pemilihan sudut pandang, narasumber, serta penekanan terhadap dampak tertentu menunjukkan bahwa pemberitaan tidak sekadar merefleksikan realitas, melainkan merupakan hasil konstruksi atas realitas tersebut. Dengan demikian, fokus pemberitaan Republika.co.id terhadap konsekuensi diplomatik BoP merupakan hasil konstruksi sosial yang merepresentasikan cara media memaknai peristiwa sesuai dengan perspektif yang diusungnya.

Proses konstruksi sosial tersebut dalam konteks media massa dijelaskan lebih lanjut oleh Hamad (2004), yang menegaskan bahwa media membangun realitas melalui proses seleksi fakta, penggunaan bahasa, pemilihan narasumber, dan penyusunan hubungan antar-fakta ke dalam suatu narasi yang utuh. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dominannya tema evaluasi kebijakan Indonesia bukan semata-mata konsekuensi dari perkembangan konflik Iran–Amerika Serikat–Israel, melainkan hasil keputusan redaksional mengenai aspek yang dipandang paling penting untuk memperoleh perhatian publik sebagai bagian dari agenda media (West & Turner, 2017). Dengan demikian, pemberitaan berfungsi menyampaikan fakta, sekaligus

membentuk cara pembaca memahami posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global (Aktari, 2025).

Namun, proses konstruksi realitas tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Keputusan redaksional dalam memilih, menekankan, dan menyusun fakta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja di dalam maupun di luar institusi media. Perspektif ini dijelaskan melalui konsep *Hierarchy of Influences* oleh Shoemaker dan Reese (2014) yang selanjutnya dikembangkan Ahmad (2022). Menurut Shoemaker dan Reese (2014), isi media dipengaruhi oleh berbagai tingkatan, mulai dari rutinitas jurnalistik, organisasi media, faktor institusional, hingga ideologi yang menjadi dasar orientasi redaksi. Sejalan dengan itu, Masduki et al. (2023), Rusadi (2015), dan Sudibyo (2009) menegaskan bahwa faktor yang berasal dari narasumber serta ideologi media turut memengaruhi cara suatu peristiwa diberitakan. Informasi yang disampaikan narasumber membentuk sudut pandang berita, sedangkan ideologi media memengaruhi proses pemilihan fakta, penekanan isu, hingga penyajian informasi kepada khalayak (Truyens & Picone, 2021; Belair-Gagnon et al., 2020; Shin & Miller, 2025; Dodds et al., 2023; Kristensen & Bro, 2024). Pengaruh berbagai faktor tersebut tercermin dalam struktur tematik pemberitaan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Dalam buku ini, kemunculan tema evaluasi kebijakan Indonesia yang diikuti tema legitimasi BoP, delegitimasi kepemimpinan internasional, menunjukkan bahwa ketiga tema tersebut membentuk suatu konstruksi makna yang saling berkaitan. Keterkaitan antartema tersebut menghasilkan interpretasi yang koheren mengenai isu BoP. Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan persoalan yang ber-

kaitan dengan konsistensi identitas politik luar negeri Indonesia di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik internasional.

Ketiga tema yang ditemukan dalam buku ini merepresentasikan makna yang dibangun Republika.co.id mengenai kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP yang diinisiasi Donald Trump. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Nimmo (2011) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses interaksi sosial yang digunakan manusia untuk menyusun makna mengenai realitas dan mempertukarkan makna tersebut melalui simbol-simbol. Dalam konteks ini, teks berita berfungsi sebagai simbol komunikasi yang membawa makna tertentu kepada khalayak. Melalui pemilihan fakta, penggunaan bahasa, penentuan narasumber, serta penonjolan tema-tema tertentu, Republika.co.id menyampaikan informasi mengenai BoP, serta membangun cara pembaca memahami kontroversi tersebut. Dengan demikian, hubungan antartema yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai representasi dari struktur makna yang dikonstruksi media, bukan sekadar kumpulan topik yang muncul dalam pemberitaan.

Konstruksi makna tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi redaksional yang melandasi praktik pemberitaan media. Dalam perspektif studi media, orientasi redaksional tercermin melalui mekanisme penekanan, pengulangan tema, serta hubungan antartema yang secara bertahap membentuk kecenderungan makna tertentu. Sejalan dengan itu, orientasi ideologis, struktur kepemilikan media, dan segmentasi audiens turut memengaruhi konstruksi narasi pemberitaan (Agarwal & Priti, 2022; Baccino, 2025; Aktari, 2025; Psychari, 2025; Theine et al., 2025). Perspektif tersebut membantu menjelaskan bagaimana identitas kelembagaan suatu media tercermin dalam praktik pemberitaannya.

Lebih lanjut, konstruksi makna tersebut menunjukkan bahwa fungsi media sebagai pembentuk kerangka interpretasi tetap bertahan meskipun praktik jurnalisme mengalami transformasi pada era digital. Perkembangan media digital memang mengubah proses produksi dan distribusi berita, namun tidak menghilangkan peran media dalam membentuk cara khalayak memahami suatu peristiwa (Mellado et al., 2018).

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun *Republika.co.id* beroperasi sebagai media daring yang dituntut menyajikan berita secara cepat, struktur tematik yang dibangun tetap menempatkan legitimasi moral, akuntabilitas kebijakan, dan kepentingan nasional sebagai kerangka utama dalam memahami kontroversi BoP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak menghapus orientasi redaksional media, melainkan menghadirkannya dalam bentuk yang berbeda melalui dinamika mekanisme pemberitaan (Yýlmaz, 2025).

Orientasi redaksional tersebut dapat ditelusuri melalui sejarah dan identitas kelembagaan *Republika.co.id*. Media ini mewarisi orientasi redaksional harian *Republika.co.id* yang sejak awal memiliki kedekatan historis dengan komunitas Muslim Indonesia serta memberikan perhatian besar terhadap isu-isu kemanusiaan dan dunia Islam (Sudibyo, 2009). Harian *Republika.co.id* pertama kali terbit pada 4 Januari 1993 atas inisiatif tokoh-tokoh Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah kepemimpinan Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie (*republika.co.id*, 2018). Organisasi tersebut lahir pada masa Orde Baru dengan dukungan Presiden Soeharto. Sejak awal, media ini berkomitmen menyuarakan aspirasi umat Islam. Meskipun beroperasi dalam lanskap media digital yang semakin kompetitif, karakteristik kelembagaan tersebut tetap

menjadi bagian dari identitas redaksional *Republika.co.id*. Identitas inilah yang menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana *Republika.co.id* mengonstruksi isu-isu internasional, termasuk pemberitaan mengenai BoP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa orientasi redaksional tersebut tercermin melalui penekanan pada legitimasi moral dalam pemberitaan mengenai BoP. Kritik yang muncul lebih diarahkan pada inkonsistensi antara retorika perdamaian dan praktik penggunaan kekuatan militer. Dengan demikian, evaluasi terhadap BoP dikonstruksi berdasarkan pertimbangan etis dan akuntabilitas politik, bukan semata-mata atas dasar kepentingan strategis atau kalkulasi geopolitik (Assefa, 2024; Setiawati & Roziqin, 2024; Hikmat & Komara, 2024; Rahmadan & Setiawati, 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi redaksional tercermin dalam pilihan isu, sekaligus dalam hubungan antartema yang membentuk keseluruhan makna pemberitaan.

Hubungan antartema tersebut sejalan dengan pandangan Braun dan Clarke (2012) bahwa tema dalam analisis tematik tidak sekadar mengelompokkan data berdasarkan kesamaan isi, melainkan merepresentasikan struktur makna yang mengorganisasi keseluruhan data. Dengan demikian, makna suatu pemberitaan dibentuk oleh masing-masing tema secara terpisah, serta oleh keterkaitan antartema yang menghasilkan narasi yang utuh. Perspektif ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana struktur tematik dalam pemberitaan *Republika.co.id* membangun interpretasi tertentu mengenai BoP.

Konsep tema sebagai struktur makna tersebut tampak jelas dalam temuan ini. Tema evaluasi kebijakan Indonesia berperan sebagai poros yang mengorganisasi hubungan antartema, kemudian

diperkuat oleh tema legitimasi BoP, delegitimasi kepemimpinan internasional, serta kontradiksi antara retorika perdamaian dan praktik militer. Keterkaitan antartema tersebut menghasilkan konfigurasi naratif yang mengarahkan pembaca untuk memandang keterlibatan Indonesia dalam BoP sebagai persoalan diplomatik yang berkaitan dengan dimensi moral, legitimasi internasional, dan kepentingan nasional.

Implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Temuan ini memiliki beberapa implikasi terhadap pemahaman mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait bagaimana kebijakan luar negeri dipersepsikan, didiskusikan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik melalui pemberitaan media (Juidah & Pratiwi, 2025). Dalam pemberitaan Republika.co.id, keterlibatan Indonesia dalam BoP direpresentasikan sebagai keputusan diplomatik di tingkat negara. Pada saat bersamaan, berita tersebut diposisikan sebagai isu yang memicu perdebatan normatif mengenai arah dan konsistensi politik luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip ‘bebas aktif.’ Representasi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan media menjadi salah satu ruang penting dalam membentuk pemaknaan publik terhadap kebijakan luar negeri (Soroka, 2003).

Salah satu implikasi dari temuan tersebut adalah menguatnya peran ruang publik domestik dalam pembentukan legitimasi politik luar negeri (Redeker et al., 2026). Pemberitaan yang dianalisis memperlihatkan bahwa berbagai aktor non-negara, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan mantan pejabat militer, memperoleh ruang yang signifikan untuk memberikan interpretasi terhadap kebijakan luar negeri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

politik luar negeri Indonesia sebagai ranah pemerintah, sekaligus bagian dari diskursus publik yang lebih luas. Dalam situasi demikian, legitimasi kebijakan luar negeri ditentukan pertimbangan strategis pemerintah, serta oleh sejauh mana kebijakan tersebut memperoleh penerimaan normatif di tengah masyarakat (Karim, 2021).

Dalam ruang publik tersebut, prinsip politik luar negeri bebas aktif tampak menjadi salah satu rujukan normatif utama dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dikaitkan dengan kekhawatiran akan potensi penyimpangan dari prinsip tersebut. Terlebih lagi, ketika Indonesia dipersepsikan terlalu dekat dengan kepentingan kekuatan global tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif berfungsi sebagai landasan kebijakan luar negeri, serta sebagai tolok ukur yang digunakan berbagai aktor untuk menilai legitimasi dan konsistensi keputusan diplomatik pemerintah.

Di sisi lain, hasil penelitian Fadlillah dan Komarudin (2026) menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tetap menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui diplomasi aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan berbagai forum bilateral. Kebijakan tersebut dinilai memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional, meningkatkan peran strategisnya di dunia Islam, serta memperluas pengakuan global, meskipun Indonesia belum menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa representasi media terhadap kebijakan luar negeri tidak selalu identik dengan penjelasan resmi pemerintah ataupun temuan penelitian lain. Sebaliknya, media menghadirkan ruang evaluasi yang menekankan aspek legitimasi dan konsistensi normatif sebagai bagian dari proses pembentukan opini publik.

Namun, implementasi Prabowo tersebut dipengaruhi oleh cara pemimpin menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam konteks kebijakan yang dihadapi. Sejalan dengan itu, Putra (2025) menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia pada awal pemerintahan Prabowo dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural internasional, keyakinan, dan cara berpikir pemimpin sebagai individu. Interpretasi pemimpin terhadap prinsip bebas aktif tercermin dalam pilihan kebijakan luar negeri. Kondisi ini selanjutnya menjadi objek evaluasi media dan publik dalam menilai konsistensi diplomasi Indonesia di tengah dinamika politik internasional.

Dengan demikian, temuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya dimensi normatif dalam memahami kebijakan luar negeri Indonesia. Hanya saja, dimensi tersebut masih relatif kurang memperoleh perhatian dalam kajian akademik. Nugraha (2022) menegaskan bahwa aspek-aspek di luar fungsi domestik, seperti dimensi ideologis, normatif, dan sosial dalam hubungan luar negeri Indonesia, sering kali terabaikan. Selain itu, pengaruh dimensi sosial dan normatif kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masyarakat internasional, termasuk dalam pembentukan norma internasional dan proses sosialisasi perilaku yang dianggap sah, juga belum banyak dikaji. Dengan kata lain, temuan penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa dimensi normatif berpengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri, serta menjadi dasar penting dalam konstruksi media dan evaluasi publik terhadap kebijakan tersebut.

Kontribusi tersebut tercermin pada temuan bahwa evaluasi terhadap BoP tidak muncul sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan dikonstruksi dalam konteks pemberitaan mengenai konflik Amerika Serikat–Israel dan Iran. Dengan demikian, konteks konflik internasio-

nal menjadi kerangka yang membentuk cara media merepresentasikan posisi Indonesia dalam BoP. Temuan ini menunjukkan bahwa cara publik memaknai politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh pemberitaan media mengenai berbagai peristiwa internasional. Dalam proses tersebut, media berperan sebagai penghubung antara dinamika politik internasional dan interpretasi lokal yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia (Assefa, 2024).

Pembentukan persepsi publik melalui pemberitaan tersebut berdampak pada cara masyarakat memahami isu politik luar negeri, serta berimplikasi pada penerimaan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Ketika kebijakan, seperti keterlibatan Indonesia dalam BoP, dipersepsikan secara kontroversial, narasi yang berkembang di ruang publik berpotensi memengaruhi tingkat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah mengelola komunikasi kebijakan luar negeri secara lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap dinamika opini publik (Asad & Irfan, 2024). Dukungan publik merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan luar negeri (S. Arslan, 2025). Sejalan dengan itu, Zink (2019) menegaskan bahwa diplomasi modern menuntut kemampuan bernegosiasi di tingkat internasional, sekaligus membangun komunikasi strategis yang mampu menjelaskan rasionalitas kebijakan kepada publik domestik secara transparan dan konsisten.

C. Kebijakan Redaksional dalam Memaknai BoP

Analisis tematik pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id terkait kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP memperlihatkan persamaan keduanya melalui tematik “Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP”. Hal ini menunjukkan bahwa kedua media sama-sama menempatkan posisi Indonesia sebagai fokus utama dalam merespons dinamika konflik dan keberadaan BoP. Isu BoP dikonstruksi sebagai fenomena global serta persoalan strategis kebijakan luar negeri untuk dipertimbangkan secara serius. Artinya, kebijakan Indonesia disikapi secara lebih rasional dengan penekanan pada kepentingan strategis dalam spektrum global.

Meskipun kedua media sama-sama bertolak dari perhatian pada kebijakan Indonesia, Kompas.com memperlihatkan kecenderungan untuk menjaga fokus tematik pada aspek kebijakan. Di sini, tema evaluasi berimbang dengan tema justifikasi.

Dalam konteks tersebut, struktur tematik penting untuk melihat kecenderungan yang lebih dalam pada tingkat ideologis dan kebijakan redaksional. Cara tema dipilih misalnya, mencerminkan orientasi tertentu dalam memaknai isu BoP. Dalam konteks ini, perbedaan struktur tematik antara Kompas.com dan Republika.co.id menjadi landasan untuk memahami bagaimana masing-masing media membangun penekanan makna yang berbeda dalam pemberitaannya. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, analisis tematik sebagai proses pengelompokan data melalui perspektif yang lebih teoretis.

Berdasarkan perspektif Braun dan Clarke (2012), tema bukan sekedar kategori topik, tetapi sebagai struktur makna yang merefleksikan cara realitas diorganisasi dan dihadirkan kepada pembaca (Ahmed et al., 2025). Sementara itu, Christou (2023) mengklaim

bahwa tematik analisis penting dalam suatu penelitian karena dapat menambah wawasan terkait fenomena atau realitas sosial dalam masyarakat. Tematik analisis dapat menghasilkan interpretasi makna sesuai pemahaman makna kata kunci yang digunakan oleh peneliti (Naeem et al., 2023).

Kompas.com sebagai bagian dari ekosistem Kompas yang mewarisi nilai, budaya redaksional, serta orientasi. Meskipun beroperasi dalam lanskap media daring yang serba cepat dan kompetitif, pendekatan pemberitaan yang moderat dan berhati-hati tetap menjadi ciri yang menonjol. Gaya penulisan yang tidak konfrontatif, pemilihan diksi yang halus, serta kecenderungan menghindari posisi yang terlalu tegas dalam isu sensitif. Hal ini menunjukkan Kompas membangun kesinambungan dengan strategi ‘model jalan tengah’ dan ‘model angin surga’ sebagaimana dikemukakan Hamad (2004). Dalam situasi di mana arus informasi bergerak cepat dan respons publik hadir secara instan, kehati-hatian ini menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan kredibilitas. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh orientasi bisnis media.

Lebih dari itu, Kompas menempatkan reputasi dan kepercayaan publik sebagai aset utama, sebagaimana tercermin dalam ungkapan Rikard Bangun bahwa “pasar itu kejam”. Pengalaman historis, termasuk pembredelan tahun 1978, turut membentuk kecenderungan pemberitaan Kompas. Begitu pula dengan Kompas.com dengan menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih pendekatan yang aman demi menjaga keberlangsungan media (Iskandar, 2017). Karakter kebijakan redaksional ini yang dituangkan pada gaya pemberitaan, terutama dalam pengemasan isu dan struktur tematik melalui teks berita.

Dalam konteks tersebut, kecenderungan redaksional yang moderat ini kemudian termanifestasi dalam konstruksi tematik pemberitaan yang dianalisis. Kecenderungan tematik Kompas.com mengarah pada dominasi tema evaluasi yang bersifat moderat dan institusional. Tema-tema yang berkembang umumnya menempatkan kebijakan Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari proses diplomasi yang masih terbuka untuk peninjauan, bukan sebagai keputusan yang secara tegas dipersoalkan secara fundamental.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com menampilkan realitas dalam kerangka stabilitas dan rasionalitas kebijakan. Tema yang berkembang memperlihatkan ruang pertimbangan dan proses penyesuaian kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Pangestu & Putri (2022) bahwa pemberitaan media membangun konstruksi realitas.

Pada titik ini, konfigurasi tematik memperlihatkan Kompas.com menjaga keseimbangan narasi, sehingga kritik dan dukungan hadir dalam proporsi yang relatif terkontrol. Dalam konteks inilah, implikasi ideologisnya tercermin pada penekanan terhadap pentingnya stabilitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan proses diplomasi (Wijayanto & Masduki, 2023). Pemberitaannya banyak menekankan pada aspek kebijakan, seperti proses evaluasi, pertimbangan diplomatik, serta implikasi strategis bagi kepentingan nasional. Isu BoP disorot secara kehati-hatian, sehingga bahasa yang digunakan cenderung tidak konfrontatif.

Kebalikannya dengan Republika.co.id yang mewarisi ideologis dan nilai redaksional sejak koran Republika terbit pada 4 Januari 1993. Media tersebut lahir dari inisiatif aktivis Muslim dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah Bacharuddin Jusuf (BJ)

Habibie. ICMI lahir di era Orde Baru dengan nama yang diberikan oleh Soeharto. Sejak awal, Republika diposisikan sebagai media yang menyuarakan aspirasi umat Islam, dan identitas itu tetap terjaga hingga kini.¹

Republika.co.id mempertahankan orientasi tersebut, meskipun berada dalam lanskap media yang semakin kompetitif dan dinamis. Media ini aktif menjadi ruang bagi komunitas Muslim untuk berbagi perspektif dan kepentingan.² Dalam praktik jurnalistik, hal ini tercermin dari sudut pandang dan representasi yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok tersebut (Sudibyo, 2009). Dengan begitu, orientasi ideologisnya sebagai warisan sejarah yang terus hidup dan beradaptasi dalam dinamika pemberitaan sehari-hari.

Kecenderungan ideologis tersebut kemudian menemukan bentuk konkretnya dalam struktur tematik pemberitaan. Dalam konteks penelitian ini, Republika.co.id menunjukkan penguatan tema-tema kritis yang lebih tinggi. Tema evaluasi kebijakan terhubung dengan legitimasi BoP dan delegitimasi yang mengkritik kepemimpinan Donald Trump maupun Netanyahu. Struktur ini menunjukkan penekanan pada dimensi moral (Mukhroman & Haryanti, 2025).

Implikasi redaksional tampak dari kedua media mengelola narasi. Kompas.com menghadirkan ruang yang lebih deliberatif melalui berbagai pandangan, namun tidak diarahkan untuk membentuk kesimpulan yang terlalu tajam. Republika.co.id menghadirkan ruang narasi yang lebih ekspresif, sehingga tema-tema tertentu diperkuat secara berulang sehingga membentuk kecenderungan makna yang lebih

¹ <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/01/p1v2i7453>

² <https://www.republika.co.id/page/about>

tegas. Temuan tersebut sebagai indikasi bagaimana struktur tematik pada penyajian berita, penekanan dan pengembangan makna.

Dari sudut pandang tematik, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan redaksional tercermin pada bagaimana tema-tema tersebut diprioritaskan dan dikembangkan. Intensitas kemunculan tema, relasi antar tema, serta arah perkembangan tema menjadi hal penting dalam memahami kecenderungan ideologis media. Kompas.com memperlihatkan kecenderungan menjaga keseimbangan tema, sementara Republika.co.id cenderung memperkuat tema-tema yang bersifat kritis dan normatif. Perbandingan dua kecenderungan ini menunjukkan perbedaan karakter media, serta membuka ruang di antara keduanya dalam representasi isu BoP.

Dalam kerangka ini, implikasi ideologis dan kebijakan redaksional sebagai hasil dari konstruksi tematik dalam pemberitaan. Tema-tema yang dominan, cara tema dikembangkan, serta hubungan antar tema menjadi dasar untuk melihat bagaimana masing-masing media mengarahkan pemaknaan. Artinya, media mengorganisasi realitas melalui struktur makna dari tematik yang berulang.

Singkatnya, analisis tematik memperlihatkan kebijakan redaksional berkaitan dengan pemilihan isu, perbedaan dalam penekanan informasi dan batasan dalam penyampaian kritik. Dengan demikian, penyajian informasi dalam pemberitaan memperlihatkan variasi isu dalam menggambarkan posisi Indonesia dalam konteks dinamika geopolitik global.

D. BoP dalam Justifikasi dan Evaluasi

Temuan yang paling menonjol dalam analisis tematik ini bukan terletak pada jumlah tema yang muncul dalam masing-masing media, melainkan pada keberadaan tema “*Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam BoP*” pada Kompas.com, namun tidak muncul dalam Republika.co.id. Dalam konteks analisis tematik, perbedaan tersebut memiliki arti penting karena tema mencerminkan aspek-aspek tertentu yang dianggap relevan untuk diberi ruang dalam konstruksi makna suatu peristiwa.

Kehadiran tema justifikasi pada Kompas.com menunjukkan ruang bagi narasi yang menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam mempertahankan keterlibatan Indonesia dalam BoP. Tema justifikasi hadir sebagai penyeimbang dengan tiga berita. Dalam kerangka ini, kebijakan Indonesia ditafsirkan secara lebih rasional. Kompas.com memfokuskan pada kepentingan kebijakan luar negeri yang strategis di era global. Isu BoP tidak semata-mata disorot dari aspek moral.

Melalui tema tersebut, kebijakan pemerintah direpresentasikan sebagai objek evaluasi, sekaligus sebagai bagian dari proses diplomasi yang memiliki landasan argumentatif tertentu. Kehadiran tema tersebut merefleksikan kebijakan media untuk menghadirkan konteks yang lebih luas mengenai posisi pemerintah. Artinya, pemaknaan terhadap isu BoP tidak semata-mata menyorot beragam kritik atau penolakan dari publik.

Sebaliknya, tidak adanya tema justifikasi pada Republika.co.id menunjukkan bahwa media ini tidak mengembangkan narasi yang menjelaskan atau mempertahankan legitimasi kebijakan tersebut. Ketiadaan tema ini mengindikasikan bahwa aspek justifikasi tidak menjadi fokus utama dalam pengorganisasian makna pemberitaan.

Konsekuensinya, representasi mengenai BoP lebih banyak dibangun melalui perspektif evaluatif dan kritis dibandingkan melalui narasi yang memberikan penjelasan terhadap alasan pemerintah tetap terlibat dalam forum tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, perbedaan ini memperlihatkan bahwa kebijakan redaksional tercermin dari penonjolan tema atau tema yang tidak memperoleh ruang dalam pemberitaan. Oleh karena itu, ketiadaan tema *Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam BoP* pada Republika.co.id sebagai indikator penting yang membedakan kecenderungan redaksional kedua media. Kompas.com masih membuka ruang bagi narasi yang menjelaskan kebijakan pemerintah, namun Republika.co.id cenderung memusatkan perhatian pada penilaian kritis terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, kehadiran dan ketiadaan tema justifikasi menjadi petunjuk penting untuk memahami bagaimana masing-masing media mengonstruksi makna atas isu BoP dalam ruang publik.

Bab IV

.....

Media dan Pembingkaihan Isu BoP

Media berperan dalam menyampaikan fakta, serta membangun realitas melalui pilihan sudut pandang dan penekanan tertentu. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana isu kontroversi bergabungnya Indonesia dalam BoP di media digital dengan menggunakan pendekatan *framing* Robert Entman.

A. Indonesia, BoP, dan Ketegangan Geopolitik

Kompas.com melakukan seleksi isu dengan memusatkan perhatian pada posisi Indonesia dalam BoP di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat serangan AS–Israel terhadap Iran. Konflik Iran menjadi titik awal pemberitaan. Namun, perhatian Kompas.com lebih banyak diarahkan pada posisi Indonesia dalam BoP dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri nasional. Hal ini terlihat dari dominannya pemberitaan yang mengaitkan serangan tersebut dengan keanggotaan Indonesia dalam BoP. Selain itu, munculnya berbagai

desakan agar Indonesia keluar dari organisasi tersebut, dan pembahasan mengenai langkah politik yang diambil pemerintah dalam merespons situasi.

Menariknya, isu yang dipilih Kompas.com tidak hanya berpusat pada kritik terhadap BoP. Media ini memberikan ruang pada respons elite politik nasional, mulai dari pandangan anggota DPR, tokoh masyarakat sipil, akademisi, hingga pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden dan pimpinan partai politik. Struktur ini menunjukkan bahwa perhatian media diarahkan pada proses pengambilan keputusan dan pembentukan sikap negara dalam menghadapi perkembangan geopolitik global. Dengan kata lain, konflik Iran berfungsi sebagai konteks yang mempertemukan isu politik luar negeri, legitimasi institusi internasional, dan kepentingan nasional Indonesia dalam satu ruang pemberitaan yang saling berkaitan. Dalam hal ini, Kompas.com berkomitmen memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyuarakan justifikasi atas kebijakan yang ditempuh atas bergabungnya Indonesia dalam BoP. Kebijakan redaksional yang mewadahi justifikasi tersebut ranah jurnalistik dikenal sebagai *balanced journalism* (jurnalisme berimbang).

Penonjolan Aspek

Dalam aspek penonjolan, Kompas.com memberi perhatian pada pertentangan antara prinsip perdamaian yang diusung BoP dan tindakan militer yang dilakukan AS- Israel. Sejumlah berita menekankan bahwa serangan terhadap Iran dipandang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, hukum internasional, serta prinsip kedaulatan negara. Penekanan yang berulang terhadap aspek-aspek tersebut mem-

bentuk kesan adanya kontradiksi antara komitmen perdamaian dan praktik politik yang berlangsung di lapangan.

Selain itu, Kompas.com menonjolkan pentingnya komunikasi politik sebagai mekanisme penyelesaian persoalan. Hal ini terlihat dari munculnya pemberitaan mengenai konsultasi antara pemerintah dan para tokoh nasional, diskusi mengenai ratifikasi BoP melalui DPR, serta koordinasi antarelite politik dalam menentukan sikap Indonesia. Penonjolan aspek ini memberikan nuansa Kompas.com memberi ruang bagi pemberitaan mengenai pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan presiden dan tokoh nasional. Melalui penekanan tersebut, konflik Iran dikonstruksi sebagai momentum bagi Indonesia untuk menegaskan sikap politik luar negeri yang selaras dengan prinsip perdamaian, konstitusi, dan kepentingan nasional.

Pembingkaian Isu Kompas.com

1. Judul Berita: **“MUI Desak RI Keluar dari *Board of Peace* Usai Serangan AS-Israel ke Iran”** (1 Maret 2026 – 15:58 WIB). Berita ini memperlihatkan konstruksi realitas melalui analisis *framing* Entman. Konstruksi tersebut dapat ditelusuri melalui unsur-unsur *framing* yang membentuk cara isu ini dipahami.
 - a. **Pendefinisian masalah:** Isu keikutsertaan Indonesia dalam BoP dibingkai sebagai persoalan seputar efektivitas perdamaian global dan keberpihakan terhadap Palestina. Hal ini tampak dari pernyataan bahwa keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam BoP “memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina.” Dengan demikian, masalah ditempatkan dalam konteks krisis legitimasi lembaga tersebut.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** Aktor yang ditonjolkan adalah AS dan Israel. Serangan terhadap Iran sebagai pemicu utama munculnya desakan MUI. Bahkan disebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari “konfigurasi geopolitik yang lebih besar” dan diduga sebagai upaya “melemahkan posisi Iran di kawasan.” Di sini terlihat bahwa penyebab mengarah pada kekuatan global.
- c. **Penilaian moral:** Berita ini sarat dengan dimensi normatif. Serangan militer dinilai “bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta Pembukaan UUD 1945.” Selain itu, penggunaan istilah seperti “kemudhorotan global” dan seruan doa menunjukkan bahwa isu dinilai secara politik, moral, dan religius. Hal ini memperkuat posisi MUI sebagai otoritas moral dalam narasi.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Berita ini memperlihatkan desakan agar Indonesia keluar dari BoP serta seruan kepada PBB dan OKI untuk “mengambil langkah maksimal menghentikan perang.” Selain itu, terdapat ajakan spiritual melalui *qunut nazilah* sebagai respons kolektif umat.

Dengan demikian, *framing* berita ini menempatkan isu keikutsertaan Indonesia melalui BoP dalam kerangka yang kritis dan bernuansa normatif. Masalah dipandang sebagai bagian dari krisis legitimasi lembaga perdamaian global, bukan sekadar kebijakan luar negeri. Penyebab diarahkan pada peran aktor khususnya AS dan Israel yang diposisikan dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Penilaian moral diperkuat melalui rujukan nilai kemanusiaan dan religius, sehingga menghadirkan dimensi etis yang kuat. Sementara itu, solusi yang

ditawarkan bersifat tegas dan kolektif melalui langkah politik maupun spiritual, yang mencerminkan sikap keberpihakan.

2. Judul Berita: **“Sebut BOP Jadi *Board of War*, Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran”**. (3 Maret 2026, 12:52 WIB). Berita ini menghadirkan konstruksi realitas sosial yang sarat mengundang opini publik.

- a. **Pendefinisian masalah:** Keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai persoalan serius yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Hal ini terlihat dari perubahan istilah BoP menjadi *“Board of War”*, yang secara simbolik menggeser makna lembaga tersebut dari ‘penjaga perdamaian’ menjadi ‘aktor konflik’. Pernyataan bahwa BoP “telah melakukan serangan militer ke Iran” memperkuat konstruksi bahwa lembaga ini kehilangan legitimasi dasarnya.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** Berita ini menonjolkan peran AS dan Israel sebagai aktor utama, khususnya melalui tindakan militer terhadap Iran yang dinilai “melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia.” Selain itu, kepemimpinan Donald Trump dalam BoP sebagai faktor kunci yang menyebabkan penyimpangan fungsi lembaga. Di sisi lain, pemerintah Indonesia turut disorot karena dianggap mengambil keputusan strategis tanpa partisipasi publik yang memadai.
- c. **Penilaian moral:** Aspek penilaian moral dalam berita ini tampak sangat kuat. Kebijakan pemerintah dikaitkan dengan risiko “masuk ke dalam jurang imperialisme”, sebuah diksi yang sarat makna normatif dan historis. Selain itu, kritik terhadap

minimnya pelibatan DPR dan masyarakat menunjukkan penilaian bahwa proses pengambilan keputusan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Berita ini menghadirkan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP, penolakan terhadap perjanjian dagang yang dianggap timpang, serta penghentian kebijakan yang berpotensi merugikan kedaulatan negara. Desakan ini ditegaskan melalui lima poin petisi yang secara eksplisit meminta pemerintah “mengevaluasi” dan “mengoreksi” kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, *framing* berita ini menggambarkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP dalam suasana yang penuh kekhawatiran dan kritik. Isu ini ditempatkan sebagai ancaman bagi legitimasi perdamaian sekaligus kepentingan nasional. Perhatian utama tertuju pada dominasi aktor global serta keputusan pemerintah yang dinilai kurang melibatkan publik. Penilaian moral memperkuat kesan penyimpangan dari nilai kemanusiaan dan demokrasi. Sementara itu, solusi yang ditawarkan menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

3. Judul Berita: **“Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari *Board of Peace*”**. (3 Maret 2026 - 20:18 WIB). Berita ini memperlihatkan pembingkai keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan luar negeri, sekaligus mencerminkan krisis legitimasi global yang dipicu oleh konflik bersenjata.

- a. **Pendefinisian masalah:** Berita ini membingkai peristiwa sebagai kegagalan total misi perdamaian internasional. Hal ini terlihat dari narasi bahwa “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya” setelah serangan AS-Israel ke Iran. Bahkan istilah BoP dipertanyakan secara implisit karena dianggap tidak lagi mencerminkan perdamaian, melainkan justru eskalasi perang.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** Aktor utama yang disorot adalah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Keduanya diposisikan sebagai pemicu konflik, dengan Trump disebut sebagai penggagas BoP sekaligus pihak yang menyatakan bahwa “Khamenei... ..sudah mati.” Kutipan ini memperkuat *framing* bahwa pemimpin institusi perdamaian justru terlibat dalam tindakan militer. Serangan ke Teheran dan kematian Ayatollah Khamenei diposisikan sebagai titik eskalasi utama.
- c. **Penilaian moral:** Terdapat kritik keras terhadap legitimasi moral BoP. Pernyataan seperti “perusak brutal perdamaian” dan “berkamufase di balik cara-cara imperialis” menunjukkan bahwa tindakan aktor utama dinilai tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan maupun prinsip perdamaian internasional. BoP bahkan disebut sebagai “kerangkeng negara-negara Islam,” yang memperkuat nuansa kritik ideologis.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Muncul desakan agar Indonesia “meninjau kembali” bahkan “mundur dari BoP.” Berbagai narasumber, termasuk MUI dan akademisi, menekankan bahwa evaluasi keanggotaan merupakan langkah “terhor-mat” demi menjaga amanat konstitusi dan prinsip politik bebas aktif Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembingkaiannya pada berita ini mengonstruksi BoP sebagai lembaga yang kehilangan arah dan legitimasi di tengah konflik global. Keikutsertaan Indonesia ditempatkan dalam situasi yang penuh tekanan, seiring kuatnya peran aktor seperti Trump dan Netanyahu yang memicu konflik. Penilaian moral memperlihatkan ketidaksesuaian antara praktik dan nilai perdamaian. Dalam konteks ini, dorongan untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia muncul sebagai langkah yang dinilai penting dan mendesak untuk menjaga prinsip dan posisi negara.

4. Judul Berita: **“Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cedera Semangat Board of Peace”** (4 Maret 2026 - 04: 00 WIB). Berita ini dengan penekanan kuat pada dimensi hukum internasional dan legitimasi perdamaian global.

a. **Pendefinisian masalah:** Peristiwa serangan AS-Israel ke Iran ditempatkan sebagai tindakan yang “mencederai semangat *Board of Peace*.” Frasa ini menunjukkan bahwa isu utama menyentuh kegagalan lembaga internasional dalam menjaga perdamaian. Ini diperkuat oleh pernyataan bahwa “semangat *Board of Peace* seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan perang.”

b. **Penentuan penyebab masalah:** Berita ini menyorot AS dan Israel sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran kedaulatan Iran. Serangan ke Teheran yang terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, diposisikan sebagai bentuk eskalasi yang melibatkan operasi militer terkoordinasi. Bahkan disebutkan bahwa AS menge-

rahkan “armada besar jet tempur dan kapal perang ke kawasan tersebut,” yang memperkuat konstruksi bahwa konflik bersifat sistematis, bukan insidental.

- c. **Penilaian moral:** tindakan AS dan Israel dinilai pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. Hal ini tampak dari desakan agar “PBB tidak boleh diam” dan harus memberikan “tindakan konkret dan tegas.” Selain itu, pernyataan bahwa praktik pelanggaran hukum internasional “jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak” menunjukkan penilaian normatif yang kuat terhadap dampak global konflik tersebut.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Solusi yang ditawarkan adalah intervensi aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Seruan ini menekankan perlunya mekanisme hukum internasional yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas global.

Dengan kata lain, pembingkaian isu berita menempatkan konflik sebagai ujian serius bagi komitmen perdamaian global. Serangan AS- Israel digambarkan sebagai pelanggaran yang menyentuh kedaulatan negara, sekaligus merusak kepercayaan terhadap lembaga internasional. Penilaian moral menegaskan pentingnya menjaga hukum internasional sebagai pijakan bersama. Dalam situasi ini, harapan diarahkan pada peran aktif lembaga global agar mampu merespons secara tegas dan menjaga stabilitas yang semakin rentan. Sudut pandang yang berkembang dalam pemberitaan ini kemudian berlanjut pada perhatian terhadap posisi Indonesia.

5. Judul Berita: “**Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran**”. (3 Maret 2026, 12.52 WIB). Pemberitaan Kompas.com ini membingkai isu keterlibatan Indonesia dalam BoP sebagai persoalan yang berkaitan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia, khususnya prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi nasional.

a. **Pendefinisian masalah:** berita ini menempatkan keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai masalah utama karena dinilai bertentangan dengan amanat politik luar negeri Indonesia. Hal ini tampak dari pernyataan TB Hasanuddin yang menyebut bahwa partisipasi Indonesia dalam organisasi tersebut telah “mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.” Masalah didefinisikan pada konflik Iran dengan AS dan Israel, sekaligus menyorot posisi Indonesia yang dianggap berada dalam organisasi yang tidak sejalan dengan nilai perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain.

b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab utama persoalan diarahkan pada keberadaan Indonesia di dalam BoP serta sikap organisasi tersebut yang dinilai membiarkan tindakan militer terhadap Iran. Dalam berita disebutkan bahwa “organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran.” Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai faktor yang menyebabkan pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas terhadap serangan tersebut. Hasanuddin menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP “telah membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut.”

Dengan demikian, sumber masalah dibingkai mulai dari tindakan AS dan Israel, serta pada pilihan kebijakan Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut.

- c. **Penilaian moral:** berita ini menampilkan penilaian bahwa mempertahankan keanggotaan dalam BoP merupakan tindakan yang tak sejalan dengan nilai perdamaian, independensi, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain. Pernyataan bahwa Indonesia perlu “berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa” menunjukkan adanya standar moral yang digunakan dalam menilai situasi tersebut. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan “dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah.” Narasi ini memperkuat konstruksi bahwa posisi Indonesia berpotensi dipersepsikan negatif baik di tingkat internasional maupun oleh masyarakat yang mendukung perjuangan Palestina.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah keluarnya Indonesia dari BoP. Hasanuddin menegaskan, “sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar.” Langkah tersebut diposisikan sebagai cara untuk menjaga konsistensi prinsip bebas aktif, menghindari risiko keterlibatan dalam konflik geopolitik Timur Tengah, serta mencegah beban fiskal yang muncul akibat partisipasi dalam misi ISF BoP.

Pembingkai isu dalam berita Kompas.com mengarahkan pembaca untuk melihat keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai kebij-

kan yang berpotensi menimbulkan dilema terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui dominasi narasumber tunggal, yakni TB Hasanuddin, pemberitaan lebih banyak menonjolkan risiko dan dampak negatif dari keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Konstruksi ini mendorong pembaca memahami bahwa keberlanjutan partisipasi Indonesia di BoP dapat memunculkan persepsi keberpihakan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel, sekaligus mengurangi konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, keluarnya Indonesia dari BoP dibingkai sebagai solusi yang rasional dan strategis untuk menjaga kredibilitas, independensi, serta identitas politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks.

- 6. Judul Berita: **“SBY, Jokowi, hingga Ma’ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo”**. (3 Maret 2026 - 20:08 WIB). Berita Kompas.com ini membingkai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden dan wakil presiden untuk membangun komunikasi politik yang inklusif di tengah berbagai tantangan nasional dan global. Berita tersebut menonjolkan suasana kebersamaan, penghormatan antarpemimpin, dan pentingnya pertukaran gagasan dalam proses pengambilan kebijakan negara.
 - a. **Pendefinisian masalah:** isu yang diangkat menyorot kebutuhan pemerintah untuk memperoleh pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan bahwa

Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik untuk berdiskusi. Tujuan pertemuan tersebut ditegaskan melalui kutipan, “Bapak presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut.” Dengan demikian, berita mendefinisikan situasi sebagai kebutuhan akan forum konsultasi dan komunikasi politik di tingkat elite nasional.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** kebutuhan akan diskusi tersebut dikaitkan dengan berbagai persoalan strategis yang dihadapi negara, terutama dinamika internasional. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, Teddy menegaskan bahwa “berbagai hal akan dibahas termasuk soal situasi geopolitik.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi geopolitik global menjadi salah satu faktor yang mendorong Presiden Prabowo menghimpun pandangan dari para pemimpin dan tokoh berpengalaman. Dengan kata lain, kompleksitas situasi nasional dan internasional dibingkai sebagai alasan utama diadakannya pertemuan tersebut.
- c. **Penilaian moral:** *framing* berita ini mendeskripsikan nilai positif mengenai pentingnya silaturahmi, dialog, dan penghormatan terhadap pengalaman para pemimpin terdahulu. Nilai ini tampak dalam pernyataan Teddy yang menyebut agenda tersebut sebagai kesempatan untuk “berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan.” Selain itu, gestur Prabowo yang menyambut langsung para tamu dan mengucapkan, “Terima kasih (telah memenuhi undangan),” memperkuat kesan penghargaan terhadap kontribusi para tokoh bangsa. *Framing* yang dibangun menunjukkan bahwa

konsultasi lintas generasi pemimpin merupakan tindakan yang bernilai positif bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan secara implisit adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan para tokoh nasional. Pertemuan ini digambarkan sebagai sarana untuk memperoleh perspektif yang lebih luas sebelum menghadapi berbagai tantangan kebijakan. Dengan melibatkan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tokoh politik lainnya, pemerintah diposisikan sebagai pihak yang terbuka terhadap masukan dan tidak bekerja secara eksklusif.

Dengan demikian, *framing* Kompas.com dalam berita ini cenderung menampilkan Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang mengedepankan dialog dan konsultasi politik dalam menjalankan pemerintahan. Pemberitaan lebih berfokus pada simbol persatuan elite nasional daripada perbedaan pandangan yang mungkin ada di antara para tokoh yang hadir. Kehadiran SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, Ma'ruf Amin, dan Boediono dibingkai sebagai representasi kesinambungan kepemimpinan nasional serta untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi tantangan bangsa. Artinya, pertemuan tersebut dikonstruksikan sebagai langkah positif untuk memperkuat solidaritas politik, memperkaya proses pengambilan keputusan, dan menjaga stabilitas negara di tengah situasi geopolitik.

7. Judul Berita: **“Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari BoP”**. (3 Maret 2026 - 20:18 WIB). Berita ini menunjukkan

bagaimana isu keikutsertaan Indonesia dalam BoP dibingkai dengan penekanan pada legitimasi lembaga perdamaian dan posisi politik luar negeri Indonesia.

- a. **Pendefinisian masalah:** Isu utama dibingkai sebagai potensi kegagalan BoP dalam menjalankan mandat perdamaian. Hal ini tampak dari pernyataan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi “alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang,” yang menunjukkan bahwa masalah mengarah pada fungsi lembaga internasional yang dipertanyakan efektivitasnya.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** Aktor yang disorot adalah BoP dan pihak-pihak yang terlibat dalam eskalasi konflik, khususnya AS dan Israel. Serangan militer ke Iran memperkuat argumen bahwa lembaga tersebut gagal menghentikan perang. Selain itu, pemerintah Indonesia secara tak langsung diposisikan sebagai aktor yang semestinya berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis agar tidak ikut memperkuat legitimasi konflik.
- c. **Penilaian moral:** Terdapat penekanan kuat pada konsep legitimasi moral dan tanggung jawab negara. Pernyataan seperti “legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan” menunjukkan keberadaan BoP dinilai dari sisi politik maupun dari aspek etika global. Kritik terhadap kemungkinan Indonesia menjadi “stempel legitimasi” memperkuat posisi normatif bahwa keterlibatan dalam lembaga tersebut harus sejalan dengan nilai perdamaian.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Narasi mengarah pada opsi evaluasi serius hingga kemungkinan Indonesia keluar dari BoP. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Presiden

Prabowo perlu “mempertimbangkan dengan serius” langkah tersebut, terutama jika lembaga tidak mampu menghentikan perang dan mewujudkan tujuan utama seperti kemerdekaan Palestina.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *framing* berita ini menempatkan keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai keputusan untuk dipertimbangkan dengan bijak. Isu diarahkan pada keraguan terhadap kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga perdamaian. Peran aktor global serta konteks konflik memperkuat gambaran bahwa situasi tidak berjalan ideal. Penilaian moral menegaskan pentingnya keselarasan dengan nilai perdamaian. Dalam kondisi ini, evaluasi hingga kemungkinan penarikan diri sebagai langkah wajar untuk menjaga arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya, perhatian difokuskan pada posisi Indonesia, serta langkah pemerintah dalam merespons situasi global.

- 8. Judul Berita: “**Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak**”. (4 Maret 2026 - 04: 00 WIB). Berita Kompas.com ini membingkai isu keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai persoalan legalitas dan legitimasi konstitusional yang memerlukan mekanisme persetujuan lembaga legislatif. Fokus konstruksi berita yang mengedepankan pada prosedur hukum yang harus ditempuh, agar keanggotaan Indonesia memiliki kekuatan mengikat secara sah dalam sistem ketatanegaraan nasional.
 - a. **Pendefinisian masalah:** berita ini mendefinisikan persoalan utama sebagai belum sempurnanya status keanggotaan Indonesia dalam BoP dari sudut pandang hukum domestik.

Meski Indonesia tercatat sebagai anggota secara internasional, keabsahan keanggotaan tersebut dinilai masih memerlukan persetujuan DPR. Hal ini tercermin dalam pernyataan Hikmahanto Juwana yang menyebut bahwa “perlu ada ratifikasi dari DPR agar keanggotaan Indonesia di *Board of Peace* (BoP) bentukan Donald Trump menjadi absah.” Dengan demikian, masalah yang ditonjolkan lebih menekankan pada proses pengesahan yang dianggap belum tuntas sesuai mekanisme konstitusional.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab persoalan diarahkan pada belum ada ratifikasi parlemen terhadap perjanjian yang ditandatangani pemerintah. Berita ini menegaskan bahwa “tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sumber persoalan terletak pada kesenjangan antara pengakuan internasional terhadap keanggotaan Indonesia dan kebutuhan akan legitimasi hukum di tingkat nasional. Artinya, tindakan eksekutif belum dianggap cukup untuk menjadikan keanggotaan tersebut sepenuhnya sah dalam kerangka hukum Indonesia.
- c. **Penilaian moral:** *framing* berita ini membangun penilaian bahwa proses ratifikasi merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi dan mekanisme *checks and balances* dalam negara hukum. Meskipun disampaikan secara tidak langsung, posisi Hikmahanto menunjukkan bahwa keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan nasional seharusnya memperoleh persetujuan dari wakil rakyat. Penilaian ini terlihat dari pernyataannya, “Menurut saya perlu dilakukan dengan

cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi dengan harapan DPR menolaknya.” Kutipan tersebut memperlihatkan preferensi normatif bahwa DPR memiliki peran penting untuk menilai kelayakan keanggotaan Indonesia dalam BoP.

- d. Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah membawa perjanjian BoP ke DPR untuk proses ratifikasi. Hikmahanto secara eksplisit mengusulkan langkah tersebut dan berharap DPR tidak memberikan persetujuan. Ia menegaskan, “Kita bisa tidak menjadi anggota bila proses penyelesaian piagam BoP ditolak oleh DPR.” Dalam *framing* ini, mekanisme legislatif diposisikan sebagai jalan yang sah untuk menentukan apakah Indonesia akan melanjutkan atau membatalkan keterlibatannya dalam organisasi tersebut.

Secara keseluruhan, *framing* Kompas.com dalam berita ini menempatkan isu BoP dalam perspektif hukum dan tata negara. Melalui pandangan Hikmahanto Juwana sebagai ahli hukum internasional, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP belum sepenuhnya final sebelum memperoleh legitimasi dari DPR. Pemberitaan membangun pemahaman bahwa proses ratifikasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap komitmen internasional tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip demokrasi. Dengan demikian, penolakan DPR terhadap BoP dibingkai sebagai opsi yang sah dan konstitusional manakala dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

9. Judul Berita: “**Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu**”. (4 Maret 2026 – 05:08

WIB). Berita ini memperlihatkan pembingkaihan isu konflik Iran–AS–Israel dengan menempatkan Indonesia sebagai aktor yang aktif menyikapi dampak global dari konflik tersebut.

- a. **Pendefinisian masalah:** Konflik sebagai perang regional yang mengancam stabilitas global dan posisi Indonesia dalam tatanan internasional. Hal ini terlihat dari penekanan bahwa pembahasan mencakup “melemahnya efektivitas tatanan global” serta implikasi konflik terhadap keamanan dan ekonomi dunia. Intinya, masalah dibingkai sebagai krisis sistem global, bukan sekadar konflik antarnegara.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** Berita ini menyorot eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran. Pernyataan bahwa konflik tersebut merupakan “serangan Amerika dan Israel terhadap Iran” memperjelas aktor utama dalam eskalasi. Selain itu, ketegangan dikaitkan dengan kegagalan mekanisme internasional dalam mencegah perang, sehingga menunjukkan kelemahan dalam tata kelola global.
- c. **Penilaian moral:** Terdapat penekanan bahwa konflik ini merupakan tindakan sepihak yang “tidak memiliki mandat internasional.” Hal ini mengandung penilaian normatif bahwa tindakan militer tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional dan mengganggu prinsip perdamaian dunia. Diskusi mengenai dampak kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi memperkuat dimensi moral bahwa perang membawa kerugian luas bagi banyak pihak.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** Berita ini menekankan pentingnya ruang komunikasi dan pertukaran gagasan di tingkat elite politik Indonesia. Presiden Prabowo disebut “sangat terbuka

dalam menanggapi usul-usul pemikiran,” yang menunjukkan pendekatan deliberatif dalam merespons krisis global. Selain itu, muncul refleksi bahwa posisi Indonesia dalam BoP perlu dievaluasi ulang seiring perubahan situasi konflik.

Secara umum, *framing* berita ini menempatkan konflik sebagai persoalan global yang berdampak luas, sekaligus mendorong Indonesia untuk bersikap waspada. Eskalasi yang melibatkan AS dan Israel sebagai tanda rapuhnya tatanan internasional. Penilaian moral menguatkan pandangan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum dan perdamaian. Di tengah situasi ini, pendekatan dialogis yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keseimbangan, seraya membuka ruang evaluasi terhadap posisi Indonesia dalam BoP. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pembicaraan di tingkat BoP.

10. Judul berita: **“Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?”**. (4 Maret 2026 – 05:19 WIB). Kompas.com membingkai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta pimpinan partai politik untuk membangun konsolidasi nasional dalam menghadapi situasi geopolitik global. Fokus pemberitaan mengarah pada sikap pemerintah dalam menyatukan persepsi dan memperkuat kesiapan nasional menghadapi dampak konflik internasional, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

a. **Pendefinisian masalah:** *framing* berita ini mendefinisikan persoalan utama sebagai tantangan yang muncul akibat dinamika geopolitik global, terutama pasca serangan AS-

Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan Iran. Situasi tersebut dipandang berpotensi memengaruhi kondisi Indonesia, terutama dalam sektor strategis seperti energi dan pangan. Hal ini tercermin dari pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menjelaskan “berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global. Khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain.” Dengan demikian, masalah dibingkai sebagai ancaman eksternal yang mendesak untuk diantisipasi bersama oleh seluruh elemen bangsa.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** sumber persoalan diarahkan pada meningkatnya ketegangan internasional yang berdampak pada stabilitas global. Konflik AS-Israel dengan Iran, sebagai faktor yang bisa memengaruhi keamanan, ekonomi, serta ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, muncul perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam BoP yang menjadi bagian dari dinamika kebijakan luar negeri pemerintah. Dalam konteks ini, pertemuan para tokoh nasional adalah untuk merespons berbagai konsekuensi yang timbul akibat perkembangan geopolitik tersebut.
- c. **Penilaian moral:** berita ini membangun nilai bahwa persatuan, dialog, dan kesiapsiagaan nasional merupakan sikap yang diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal ini tampak dalam pernyataan Bahlil bahwa “semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita.” Selain itu, Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa Presiden Prabowo berusaha menyatukan pandangan para

elite nasional dengan mengundang berbagai tokoh bangsa. *Framing* ini memberikan kesan bahwa komunikasi dan konsolidasi nasional adalah langkah bijaksana dan bertanggung jawab di tengah situasi internasional yang tidak menentu.

- d. Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah memperkuat koordinasi antarelite politik dan meningkatkan kesiapan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi, dan pertahanan. Pernyataan bahwa Presiden menjelaskan “kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita” menunjukkan bahwa pemerintah memandang penguatan ketahanan nasional sebagai respons utama terhadap gejolak global. Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa “kepentingan bangsa adalah paling utama dalam semua aspek kerja sama dengan siapapun.” Pernyataan itu menjadi dasar normatif bagi arah kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Dengan demikian, *framing* Kompas.com dalam berita ini cenderung menampilkan Presiden Prabowo dalam menyikapi dampak konflik global melalui pendekatan dialog dan konsolidasi nasional. Pertemuan dengan para mantan presiden, wakil presiden, dan pimpinan partai politik dibingkai untuk membangun kesatuan pandangan dalam menghadapi tantangan internasional. Selain itu, isu BoP ditempatkan sebagai bagian dari penjelasan pemerintah mengenai pilihan kebijakan yang dianggap paling memungkinkan dalam situasi yang ada. Artinya, pemberitaan mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa stabilitas nasional, kesiapan menghadapi krisis, dan kepentingan bangsa merupakan prioritas utama bagi pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.

Tabel 23. Framing Pemberitaan Kontroversi Indonesia dalam Board of Peace pada Kompas.com

No	Judul Berita	Pendefinisian Masalah	Penentuan Penyebab Masalah	Evaluasi Moral	Rekomendasi Penyelesaian
1.	MUI Desak RI Keluar dari <i>Board of Peace</i> Usai Serangan AS-Israel ke Iran	Indonesia bergabung dalam BoP	Serangan militer AS-Israel ke Iran	Bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan Pembukaan UUD 1945	Indonesia keluar dari BoP
2.	Sebut BOP Jadi <i>Board of War</i> , Ini 5 Desakan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran	Keikutsertaan Indonesia dalam BoP	AS dan Israel sebagai aktor utama	Indonesia masuk jurang imperialisme	Indonesia keluar dari BoP, menolak ART
3.	Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari <i>Board of Peace</i>	Kegagalan total misi perdamaian internasional	Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai aktor	Bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perdamaian internasional	Indonesia mundur dari BoP
4.	Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat <i>Board of Peace</i>	Agresi militer AS-Israel ke Iran	AS dan Israel sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran kedaulatan Iran	Tindakan AS dan Israel melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara	Perserikatan Bangsa-Bangsa harus tegas dengan memberi sanksi terhadap AS dan Israel
5.	Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran	Keanggotaan Indonesia dalam BoP	Keberadaan Indonesia di dalam BoP	Indonesia dalam BoP bertentangan dengan nilai perdamaian	Indonesia keluar dari BoP

6.	SBY, Jokowi, hingga Ma'ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo	Pemerintah membutuhkan pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa	Kondisi geopolitik global	Silaturahmi, dialog, dan penghormatan terhadap pengalaman para pemimpin terdahulu	Memperkuat komunikasi dan kolaborasi pemerintah-para tokoh nasional
7.	Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari BoP	Kegagalan BoP dalam menjalankan mandat perdamaian	AS dan Israel sebagai pemicu	Legitimasi moral dan tanggung jawab negara	Indonesia keluar dari BoP
8.	Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga Ditolak	Keanggotaan Indonesia dalam BoP dari sudut pandang hukum domestik	Belum ada ratifikasi DPR atas BoP	Ratifikasi	BoP harus diratifikasi DPR
9.	Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu	Krisis sistem global	Eskalasi serangan AS- Israel terhadap Iran	Tidak memiliki mandat internasional	Komunikasi dan pertukaran gagasan oleh elite politik
10.	Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?	Serangan militer AS- Israel terhadap Iran	Konflik antara AS-Israel dengan Iran	Komunikasi dan konsolidasi nasional	Memperkuat koordinasi antarelite politik

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Berdasarkan Tabel 23, *framing* yang dibangun Kompas.com terhadap isu BoP pascaserangan AS–Israel ke Iran memperlihatkan media ini menghubungkan isu tersebut dengan posisi Indonesia dalam BoP, respons elite politik nasional, serta dinamika pengambilan kebijakan di tingkat domestik.

Pada elemen pendefinisian masalah, persoalan yang paling sering dimunculkan berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam BoP dan menurunnya kredibilitas lembaga tersebut usai serangan AS–Israel ke Iran. Kompas.com menghadirkan pemberitaan mengenai pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden, tokoh

bangsa, dan pimpinan partai politik. Kehadiran isu ini menunjukkan bahwa media menyorot persoalan pada level organisasi internasional, serta pada bagaimana negara merespons situasi geopolitik yang berkembang.

Pada tahap penentuan penyebab masalah banyak diarahkan kepada tindakan AS dan Israel, khususnya peran Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sebagai aktor yang dianggap memicu eskalasi konflik. Terdapat pula penjelasan yang menempatkan persoalan dalam konteks yang lebih luas, seperti kondisi geopolitik global, aspek hukum domestik terkait ratifikasi BoP, serta dinamika hubungan internasional yang memengaruhi posisi Indonesia. Struktur ini menunjukkan bahwa Kompas.com menampilkan berbagai faktor yang melatarbelakangi perdebatan mengenai BoP.

Dalam aspek penilaian moral yang muncul berpusat pada nilai kemanusiaan, perdamaian internasional, kedaulatan negara, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Serangan AS–Israel dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut sehingga memunculkan keraguan terhadap legitimasi moral BoP. Namun demikian, Kompas.com menampilkan aspek lain yakni pentingnya dialog, komunikasi politik, penghormatan terhadap pengalaman para pemimpin terdahulu, dan perlunya konsolidasi nasional dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Dengan demikian, dimensi moral yang dibangun berupa kecaman terhadap agresi militer, sekaligus penekanan pada pentingnya proses deliberasi dalam pengambilan keputusan negara.

Sementara itu pada elemen rekomendasi penyelesaian, solusi yang ditawarkan adalah beragam pilihan. Sebagian berita mendorong Indonesia keluar dari BoP atau menolak kerja sama yang dinilai ber-

tentang dengan prinsip perdamaian. Namun, berita lainnya menonjolkan pentingnya komunikasi antarelite, konsultasi dengan tokoh nasional, serta mekanisme konstitusional melalui ratifikasi DPR. Keragaman rekomendasi ini menunjukkan ruang bagi berbagai alternatif penyelesaian.

Secara keseluruhan pemberitaan Kompas.com membingkai serangan AS–Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas BoP dan relevansinya bagi Indonesia. Konflik Iran hadir sebagai konteks utama pemberitaan. Namun, pembahasan lebih banyak diarahkan pada posisi Indonesia dalam BoP serta respons politik yang muncul di tingkat nasional. Dalam konstruksi pemberitaannya, Kompas.com menghadirkan beragam pandangan yang menyorot pentingnya evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP, sekaligus membuka ruang bagi respons pemerintah dan berbagai tokoh nasional dalam menyikapi perkembangan situasi global.

Di sisi lain, media ini menempatkan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai landasan utama dalam menilai serangan terhadap Iran. Kompas.com memberi perhatian pada pentingnya komunikasi politik dan pertimbangan kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, *framing* yang dibangun cenderung menempatkan Indonesia sebagai aktor dalam merespons krisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek moral, politik, dan konstitusional secara bersamaan.

B. Kritik Publik dan Krisis Legitimasi BoP

Berdasarkan hasil telaah terhadap 10 berita Republika.co.id, isu yang paling menonjol adalah *framing* mengenai kritik publik terhadap pemerintahan Prabowo yang memutuskan Indonesia bergabung dalam BoP, serta krisis legitimasi BoP pascaserangan AS-Israel terhadap Iran. Kedua isu ini dipilih karena mendominasi pemberitaan, sehingga menunjukkan bahwa media berfokus pada peristiwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo yang berawal dari konflik di Timur Tengah (pasca serangan AS-Israel terhadap Iran usai penandatanganan BoP). Di sisi lain, media daring ini mengarahkan perhatian pembaca mengenai kredibilitas BoP sebagai lembaga yang mendukung misi perdamaian.

Hal tersebut tampak dari narasi pemberitaan yang berulang. Berbagai narasumber, mulai dari tokoh agama, akademisi, pakar hubungan internasional, anggota DPR, organisasi masyarakat sipil, hingga purnawirawan TNI, sama-sama menempatkan serangan terhadap Iran sebagai momentum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara narasi perdamaian yang dibawa BoP dengan tindakan para aktor utama yang berada di dalamnya. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mayoritas narasumber menyampaikan pandangan searah, yaitu bahwa tindakan militer tersebut melemahkan kredibilitas moral maupun politik BoP di mata publik.

Selain itu, pemberitaan Republika.co.id menunjukkan bahwa isu yang berkembang merambah pada posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global. Berbagai berita menghubungkan eskalasi konflik tersebut dengan keanggotaan Indonesia di BoP serta relevansinya terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Konsekuensi logisnya, pembahasan mengenai konflik Iran menjadi diskursus yang lebih luas.

Diskursus tersebut mencakup arah diplomasi Indonesia, perlindungan kepentingan nasional, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Atas dasar itu, isu mengenai kritik atas kebijakan luar negeri oleh Presiden Prabowo menyusul krisis legitimasi BoP akibat serangan AS–Israel terhadap Iran dinilai paling layak untuk dijadikan fokus analisis. Selain memiliki intensitas kemunculan yang tinggi, isu ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara konflik internasional, konstruksi media, dan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, isu tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana media membentuk pemahaman publik terhadap suatu peristiwa internasional beserta implikasinya bagi kebijakan dan posisi diplomatik Indonesia.

Penonjolan Aspek

Berdasarkan analisis pada 10 berita *Republika.co.id*, terlihat bahwa media ini **menonjolkan aspek moral, legitimasi, dan politik luar negeri Indonesia** dalam membingkai pemberitaan mengenai serangan AS–Israel terhadap Iran. Fokus pemberitaan lebih menekankan makna di balik peristiwa tersebut, khususnya terhadap kredibilitas BoP sebagai lembaga yang mengusung agenda perdamaian. Dengan cara demikian, perhatian pembaca diarahkan untuk memandang konflik sebagai ujian atas konsistensi antara narasi perdamaian dan praktik politik yang dijalankan oleh aktor-aktor utama dalam BoP.

Penonjolan aspek tersebut semakin terlihat dari pilihan narasumber yang didominasi oleh tokoh agama, akademisi, pakar hubungan internasional, anggota legislatif, organisasi masyarakat sipil, organisasi

sosial Palestina, hingga purnawirawan TNI. Keberagaman latar belakang narasumber memberikan kesan adanya sudut pandang yang beragam. Namun, secara substansi mereka mengarah pada pesan yang relatif serupa, yakni bahwa tindakan militer AS-Israel dipandang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian, hukum internasional, serta mengurangi legitimasi BoP. Dominasi pandangan tersebut menjadikan aspek moral dan etika internasional lebih menonjol dibandingkan aspek strategis atau keamanan yang lazim muncul dalam pemberitaan konflik bersenjata.

Di sisi lain, *Republika.co.id* memberikan perhatian besar pada posisi Indonesia dalam dinamika konflik tersebut. Di beberapa berita, menekankan pentingnya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, mempertahankan kedaulatan nasional, serta mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP. Penonjolan ini memperlihatkan bahwa konflik internasional sebagai persoalan yang memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan diplomasi Indonesia. Dengan demikian, pembaca diajak untuk melihat bahwa setiap keputusan pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan nasional dan amanat konstitusi.

Secara keseluruhan, penonjolan aspek dalam pemberitaan *Republika.co.id* membentuk konstruksi bahwa isu utama menyangkut konsistensi nilai perdamaian, legitimasi lembaga internasional, serta tanggung jawab Indonesia dalam menjaga independensi kebijakan luar negeri. Penekanan terhadap dimensi moral, diplomasi, dan kepentingan nasional tersebut menjadikan pemberitaan memiliki arah yang jelas dalam membangun cara pandang pembaca terhadap konflik internasional sekaligus terhadap posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Pembingkai Isu Republika.co.id

- 1. Judul Berita: **“Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP”**. (1 Maret 2026, 04.25 WIB). Republika.co.id membingkai serangan AS- Israel terhadap Iran sebagai tindakan agresi yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, sekaligus legitimasi BoP pimpinan Presiden AS Donald Trump. Melalui pandangan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, berita ini membangun perspektif bahwa tindakan militer tersebut bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian yang diklaim oleh BoP.
 - a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama didefinisikan sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia dan kegagalan BoP menjalankan fungsi yang diembannya. Sejak awal berita, serangan militer AS-Israel diposisikan sebagai tindakan yang merusak upaya menciptakan ketertiban internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa “serangan militer Israel-Amerika Serikat terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia.” Serangan tersebut disebut menyebabkan BoP “kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum.”
 - b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab utama persoalan diarahkan kepada AS-Israel, dan secara khusus Donald Trump sebagai figur sentral di balik BoP. Sudarnoto menilai bahwa tindakan militer tersebut merupakan cerminan dari ambisi hegemonik dan imperialistik yang bertentangan dengan semangat perdamaian. Pernyataannya bahwa “Trump sejatinya perusak dan penghancur perdamaian” serta “Trump benar-benar seorang aktor yang telah membajak kata-kata

‘peace’ alias ‘perdamaian’ justru untuk ambisi hegemonik dan imperialistiknya” menunjukkan sumber masalah dibingkai berasal dari kepentingan politik dan dominasi kekuatan besar, bukan dari kebutuhan menjaga keamanan internasional.

- c. **Penilaian moral:** berita ini menghadirkan penilaian terhadap tindakan AS dan Israel. Agresi militer tersebut diposisikan sebagai tindakan tidak bermoral karena mengorbankan perdamaian, keadilan, dan hak bangsa lain untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan bahwa “BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan” memperlihatkan standar moral yang digunakan dalam menilai situasi ini. Selain itu, serangan terhadap Iran dipandang melemahkan dukungan terhadap Palestina dan memperkuat dominasi regional Israel.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah menolak terhadap segala bentuk agresi militer dan penguatan komitmen terhadap hukum internasional. Sudarnoto menegaskan bahwa “Indonesia hendaknya tidak terlibat dan harus dengan tegas menolak segala aksi agresi militer, menegakkan hukum internasional, dan memperjuangkan penyelesaian damai berbasis keadilan.” Dengan demikian, penyelesaian konflik dibingkai melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta ikhtiar untuk menciptakan perdamaian yang berkeadilan.

Dengan demikian, *framing* Republika.co.id dalam berita ini menempatkan serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai bentuk agresi yang mengancam perdamaian regional dan global. Melalui perspektif narasumber tunggal, berita mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa BoP kehilangan kredibilitas akibat ketidaksesuaian antara tujuan yang diklaim dengan tindakan para pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konstruksi pemberitaan ini, Donald Trump, AS, dan Israel diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas memburuknya situasi. Di sisi lain, Indonesia didorong untuk tetap berpihak pada prinsip perdamaian, keadilan internasional, dan menolak segala bentuk agresi militer.

- 2. Judul berita: **“Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas Board of Peace”**. (1 Maret 2026, 09.04 WIB). Republika.co.id membingkai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang menjadi ujian serius bagi kredibilitas BoP sebagai lembaga yang mengusung narasi perdamaian. Melalui pandangan pakar hubungan internasional Ahmad Khoirul Umam, berita mengarahkan perhatian pembaca pada kontradiksi antara tujuan perdamaian yang diklaim BoP dan realitas penggunaan kekuatan militer oleh negara yang memiliki peran penting dalam organisasi tersebut.
 - a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama didefinisikan sebagai munculnya ketidaksesuaian antara narasi perdamaian dan tindakan militer yang terjadi di lapangan. Hal ini tampak dalam pernyataan Ahmad Khoirul Umam bahwa “serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji

kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP).” Dengan demikian, masalah yang diangkat mengarah pada krisis kepercayaan terhadap institusi yang mengklaim berkomitmen pada perdamaian dunia.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab persoalan diarahkan pada tindakan militer AS-Israel yang dianggap bertentangan dengan semangat perdamaian yang selama ini dipromosikan. Selain itu, Ahmad menilai bahwa operasi militer erat kaitannya dengan konflik bilateral, serta bagian untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Hal ini terlihat dalam pernyataannya bahwa “upaya AS-Israel yang seolah menetralisasi Iran bukan hanya soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan kekuatan Timur Tengah.” *Framing* ini menempatkan kebijakan geopolitik AS dan Israel sebagai faktor utama yang memicu ketegangan dan memunculkan keraguan terhadap legitimasi BoP.
- c. **Penilaian moral:** berita membingkai penilaian bahwa penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik berpotensi mengurangi kredibilitas klaim perdamaian yang dibangun oleh aktor-aktor internasional. Narasi ini diperkuat dengan pandangan bahwa negara-negara yang relatif independen, seperti Indonesia dan Turki, perlu “merefleksikan kembali kerja sama dengan BoP.” Selain itu, Ahmad mengingatkan bahwa apabila dunia menganggap konflik tersebut sebagai sesuatu yang normal dan memilih diam, maka tindakan serupa berpotensi meluas ke kawasan lain. Pernyataan ini menunjukkan adanya penilaian moral bahwa pembiaran

terhadap eskalasi konflik dapat menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas dalam hubungan internasional.

- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah mendorong deeskalasi konflik melalui keterlibatan berbagai elemen kekuatan dunia. Ahmad menegaskan bahwa “semua elemen kekuatan dunia perlu mendorong deeskalasi dalam konflik AS-Israel dan Iran tersebut.” Berita ini menampilkan sikap diplomatik Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi keamanan yang lebih kondusif. Dengan demikian, penyelesaian konflik dibingkai melalui pendekatan diplomasi, dialog, dan pengurangan ketegangan antarnegara.

Secara keseluruhan, *framing* Republika.co.id dalam berita ini menempatkan serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai momentum yang menguji konsistensi dan kredibilitas BoP sebagai simbol perdamaian internasional. Melalui perspektif pakar hubungan internasional, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa tindakan militer yang dilakukan memicu kontradiksi terhadap narasi perdamaian yang selama ini dibangun. Pada saat yang sama, berita ini menekankan pentingnya peran diplomasi dan deeskalasi konflik sebagai jalan yang lebih konstruktif untuk menjaga stabilitas kawasan dan mencegah meluasnya ketegangan ke berbagai wilayah dunia. Dengan demikian, isu utama yang dikedepankan mengarah pada pergulatan antara narasi perdamaian dan praktik kekuatan dalam politik global kontemporer.

3. Judul Berita: **“Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian”**. (1 Maret 2026, 10.52 WIB). Pemberitaan Republika.co.id ini membingkai serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai bukti kegagalan BoP dalam mewujudkan misi perdamaian yang selama ini diklaim. Melalui pernyataan anggota DPR RI TB Hasanuddin, berita ini mengonstruksi pemahaman bahwa konflik yang terjadi memperlihatkan kontradiksi antara narasi perdamaian yang diusung BoP dan tindakan militer para aktor yang terlibat.
- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama didefinisikan sebagai runtuhnya kepercayaan terhadap BoP sebagai lembaga yang mengklaim berorientasi pada perdamaian. Serangan terhadap Iran diposisikan sebagai peristiwa yang memperlihatkan bahwa organisasi tersebut gagal menjalankan tujuan yang diembannya. Hal ini tercermin dalam pernyataan TB Hasanuddin bahwa “kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian.” Selain itu, berita menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan “eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas.” Konsekuensinya, masalah sebagai konflik antara negara-negara yang terlibat, sekaligus sebagai krisis kredibilitas BoP itu sendiri.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab utama diarahkan pada tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara tersebut diposisikan sebagai aktor yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. TB Hasanuddin menyebut bahwa penyerangan terhadap Iran menunjukkan “watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamaian”.

an.” Selain itu, agresi tersebut dipandang sebagai tindakan yang memperburuk situasi kawasan dan menghambat upaya menciptakan perdamaian di Palestina. Dengan *framing* seperti ini, penyebab persoalan mengarah pada ketidaksesuaian antara klaim perdamaian dan tindakan para pemimpin BoP.

c. **Penilaian moral:** berita ini menyampaikan penilaian bahwa tindakan AS dan Israel bertentangan dengan nilai perdamaian serta komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai. Penyerangan terhadap Iran digambarkan sebagai tindakan yang memperluas konflik dan memperbesar risiko instabilitas regional. Penilaian moral tersebut tampak dalam pernyataan bahwa “tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah.” Narasi ini membangun kesan bahwa klaim perdamaian yang selama ini disampaikan melalui BoP tidak memiliki dasar kuat karena tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan.

d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang jelas dan aktif terhadap perkembangan konflik tersebut. TB Hasanuddin menegaskan bahwa “Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia.” Selain itu, Indonesia didorong untuk memanfaatkan keterlibatannya dalam BoP sebagai sarana diplomasi guna mendorong penghentian agresi dan memperjuangkan perdamaian. Dengan demikian, langkah yang direkomendasikan adalah penguatan peran diplomatik Indonesia berdasarkan prinsip konstitusional yang menolak penjajahan dan mendukung perdamaian dunia.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menampilkan agresi AS-Israel terhadap Iran sebagai bukti nyata bahwa BoP belum mampu merealisasikan tujuan perdamaian yang dikampanyekan. Melalui dominasi pandangan TB Hasanuddin, pembaca diarahkan untuk memandang BoP dengan sikap kritis dan mempertanyakan ketulusan para aktor utama di dalamnya. Selain itu, berita tersebut menegaskan pentingnya peran Indonesia untuk menunjukkan sikap yang tegas dan konsisten terhadap konflik internasional sesuai amanat politik luar negeri dan konstitusi. Dengan demikian, isu perdamaian bersinggungan dengan posisi dalam komunitas internasional, serta sebagai ujian bagi kredibilitas lembaga dan negara-negara yang mengklaim diri sebagai pelopor perdamaian.

4. Judul Berita: **“MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya”**. (3 Maret 2026, 06.54 WIB). Berita ini membingkai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memperlihatkan kegagalan moral dan politik BoP dalam menjalankan misi perdamaian yang selama ini diklaim. Melalui pandangan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, berita mengonstruksi bahwa tindakan militer tersebut meruntuhkan kredibilitas BoP sekaligus menunjukkan ketidaksesuaian antara retorika perdamaian dan praktik politik yang dijalankan oleh pemimpinnya.

a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang diangkat adalah hilangnya legitimasi moral BoP setelah terjadinya serangan militer terhadap Iran. Konflik menyorot aspek kea-

manan internasional, serta indikator kegagalan lembaga yang mengusung agenda perdamaian. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa serangan tersebut menjadi “bukti nyata runtuhnya legitimasi moral Dewan Perdamaian/*Board of Peace* (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.” Dengan demikian, masalah dibingkai sebagai krisis kepercayaan terhadap BoP dan kepemimpinannya.

- b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab utama persoalan diarahkan kepada kepemimpinan Donald Trump dan kebijakan Amerika Serikat yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip perdamaian. Sudarnoto menegaskan bahwa langkah militer yang dilakukan menunjukkan bahwa Trump “tidak mencerminkan komitmen terhadap perdamaian dunia.” Bahkan, ia menyebut Trump sebagai “perusak brutal perdamaian.” BoP digambarkan sebagai instrumen yang serius menciptakan perdamaian, karena sarat berbagai kepentingan lain. Pandangan ini diperkuat melalui pernyataan bahwa BoP hanya “kamufase yang bermotif imperialistik.” Dengan *framing* tersebut, akar masalah menyentuh pada kekuasaan aktor dan kepentingan politik yang berada di baliknya.
- c. **Penilaian moral:** berita ini mengonstruksi penilaian terhadap tindakan AS, Israel, dan BoP. Serangan terhadap Iran dinilai bertentangan dengan nilai perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pernyataan “BoP sudah runtuh secara moral, dan kehilangan legitimasinya” menunjukkan evaluasi moral bahwa lembaga tersebut tidak lagi layak dipercaya sebagai penggerak perdamaian dunia. Selain itu, ajakan agar negara-negara Muslim bersatu dan tidak “diadu domba dan dipecah belah oleh imperialisme

Amerika-Israel” memperkuat konstruksi moral bahwa solidaritas dan perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar merupakan sikap yang lebih tepat.

- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP dan memperkuat peran diplomasi berlandaskan kepentingan nasional serta amanat konstitusi. Sudarnoto secara eksplisit menyatakan bahwa Presiden Prabowo perlu “memperhitungkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.” Meski demikian, langkah tersebut tetap harus dilakukan melalui pendekatan yang “terukur dan persuasif dengan tetap memberikan perhatian kepada national interest kita.” Dengan kata lain, jalan keluar yang direkomendasikan adalah kombinasi antara evaluasi terhadap BoP dan penguatan diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

Lebih lanjut, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menempatkan BoP sebagai lembaga yang kehilangan kredibilitas akibat tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Melalui perspektif Sudarnoto Abdul Hakim, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa serangan terhadap Iran sebagai persoalan geopolitik, sekaligus bukti kegagalan moral sebuah lembaga yang mengatasnamakan perdamaian. Selain itu, Indonesia dibingkai sebagai negara yang seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi. Artinya, berita ini mengonstruksi agar Indonesia mampu memperjuangkan perdamaian melalui jalur diplomasi, serta mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam organisasi yang dinilai tidak lagi memiliki legitimasi moral di mata sebagian pihak.

5. Judul Berita: **“Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran”**. (3 Maret 2026, 09.25 WIB). Republika.co.id melalui berita ini membingkai keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan untuk dievaluasi kembali di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik antara AS-Israel dan Iran. Melalui pandangan pakar hubungan internasional Hendra Maulana Saragih, berita mengarahkan perhatian pembaca pada potensi risiko yang dapat dihadapi Indonesia apabila tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut saat konflik regional terus mengalami eskalasi.

a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama didefinisikan sebagai munculnya kontroversi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Kontroversi tersebut semakin menguat setelah Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap Iran. Berita menegaskan bahwa “Dewan Perdamaian yang sejatinya mendorong upaya stabilitas pertahanan dan keamanan justru mengarah sebaliknya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah berawal dari konflik yang berlangsung, ketidaksesuaian antara tujuan BoP sebagai lembaga perdamaian, dan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BoP dibingkai sebagai isu yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.

b. **Penentuan penyebab masalah:** penyebab persoalan diarahkan pada potensi benturan kepentingan yang muncul akibat keterlibatan Indonesia dalam BoP di tengah konflik geopolitik. Hendra Maulana Saragih menjelaskan bahwa Indonesia harus berhati-hati karena memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Ia menegaskan bahwa “Indonesia perlu ber-

hati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara manapun juga.” Selain itu, meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah dan keterlibatan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam BoP ialah faktor yang memperbesar risiko bagi posisi diplomatik Indonesia.

- c. **Penilaian moral:** berita ini mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional sebagai nilai yang harus dijaga dalam setiap keputusan strategis. *Framing* yang muncul menunjukkan bahwa Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam konflik kepentingan yang dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain. Pernyataan bahwa “politik bebas aktif Indonesia harus menjaga kedaulatan di tengah gempuran konflik kepentingan” menjadi dasar moral dalam menilai situasi tersebut. Selain itu, munculnya petisi dari puluhan tokoh dan organisasi masyarakat sipil memperkuat kesan bahwa terdapat kekhawatiran publik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah melakukan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP. Hendra menyebut bahwa situasi yang berkembang saat ini merupakan “momen besar untuk Indonesia berpikir ulang.” Selain itu, petisi yang diterbitkan oleh tokoh masyarakat dan organisasi sipil mendesak pemerintah serta DPR untuk menarik Indonesia dari BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI ke Gaza. Dengan demikian, jalan keluar yang direkomendasikan adalah melakukan kajian ulang terhadap keterlibatan Indonesia untuk memastikan kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menempatkan keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan yang sarat risiko di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Melalui perspektif pakar dan dukungan dari kelompok masyarakat sipil, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa keberadaan Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat memengaruhi posisi diplomatik negara. Karena itu, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dibingkai sebagai hal wajar untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.

6. Judul Berita: **“Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP”**. (3 Maret 2026, 16.57 WIB). Dalam berita ini, Republika.co.id membingkai keanggotaan Indonesia dalam BoP dan rencana keterlibatan TNI dalam *International Stabilization Force* (ISF) di Gaza sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko. Mulai dari kedaulatan nasional, politik luar negeri bebas aktif, serta posisi historis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Melalui dominasi pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), berita ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF terkait prinsip-prinsip fundamental yang selama ini menjadi pijakan kebijakan luar negeri Indonesia.

- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang diangkat adalah keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza yang dipandang menimbulkan berbagai konsekuensi strategis. Berita ini menyorot kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menggeser posisi Indonesia dari negara yang independen menjadi bagian dari konfigurasi

konflik internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa *“keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan penjaga perdamaian.”* Jadi, masalah dibingkai sebagai ancaman terhadap identitas Indonesia sebagai negara yang selama ini menjunjung prinsip perdamaian dan netralitas.

- b. Penentuan penyebab masalah:** sumber persoalan diarahkan pada keikutsertaan Indonesia dalam BoP yang diprakarsai oleh kekuatan geopolitik tertentu serta rencana pengiriman pasukan melalui skema ISF. FPP-TNI menilai bahwa keterlibatan tersebut dapat mengurangi independensi diplomasi Indonesia dan membawa negara ke dalam kepentingan politik global yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Pernyataan bahwa *“keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional”* menunjukkan bahwa penyebab utama masalah diposisikan pada keputusan politik yang dianggap terlalu dekat dengan arsitektur keamanan internasional tertentu.
- c. Penilaian moral:** berita ini membingkai penilaian bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, doktrin pertahanan negara, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. FPP-TNI menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF dipersepsikan sebagai dukungan terhadap situasi yang melanggengkan penjajahan di Palestina. Penilaian moral ini tampak dalam pernyataan bahwa *“prajurit TNI berpotensi melanggar konstitusi karena melanggengkan penjajahan Israel di Palestina.”* Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa

Indonesia dapat kehilangan legitimasi moral sebagai negara yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia.

- d. Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah menolak tegas untuk mengirim pasukan TNI ke Gaza dan penarikan Indonesia dari keanggotaan BoP. FPP-TNI secara tegas menyatakan bahwa “*mendesak DPR RI untuk menolak secara tegas pengiriman pasukan TNI ke Gaza*” serta meminta pemerintah “*menarik diri dari struktur BoP.*” Rekomendasi ini didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia harus tetap mempertahankan posisi bebas aktif, menjaga kedaulatan nasional, dan menghindari keterlibatan dalam konflik yang tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan kata lain, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menampilkan BoP dan ISF sebagai kebijakan yang sarat risiko bagi posisi strategis Indonesia di tingkat internasional. Melalui perspektif FPP-TNI, pembaca diarahkan untuk memandang bahwa keterlibatan dalam kedua skema tersebut berpotensi mengurangi independensi diplomasi nasional. Selain itu, polemik tersebut rentan menggeser identitas Indonesia sebagai negara nonblok, serta melemahkan legitimasi historis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.

Secara umum, berita ini membangun narasi bahwa mundur dari BoP dan menolak pengiriman pasukan ke Gaza merupakan langkah yang penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan nasional, dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian yang berkeadilan.

7. Judul Berita: **“Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace”**. (3 Maret 2026, 21.23 WIB). Berita ini membongkai konflik antara AS-Israel dan Iran sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi bahkan mengakhiri keanggotaannya dalam BoP. Melalui pandangan pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, berita mengonstruksi bahwa agresi militer terhadap Iran membuktikan kegagalan BoP dalam menjalankan fungsi yang selama ini diklaim untuk menciptakan perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah.
- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang ditonjolkan adalah runtuhnya kredibilitas BoP sebagai lembaga perdamaian. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran diposisikan sebagai bukti bahwa organisasi tersebut tidak lagi mencerminkan semangat perdamaian. Hal ini terlihat dari pernyataan Connie yang menegaskan bahwa “BoP sudah tak lagi relevan untuk tetap diharapkan sebagai Dewan Perdamaian di Gaza, Palestina.” Bahkan, organisasi tersebut dibongkai sebagai institusi yang bergerak menjauh dari tujuan awalnya. Pernyataan “BoP ini sudah bukan lagi judulnya *Board of Peace*, tetapi sudah menjadi *Board of War*” menjadi simbol utama dalam pendefinisian masalah yang dibangun oleh berita.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** sumber persoalan diarahkan pada tindakan militer Amerika Serikat dan Israel yang merupakan aktor sentral dalam BoP. Menurut Connie, agresi terhadap Iran membuktikan bahwa organisasi tersebut justru melekat pada praktik kekuatan dan konflik. Pernyataan bahwa “agresi terhadap Iran yang dimotori oleh AS-Zionis sebagai Ketua dan anggota BoP membuktikan Dewan Perdamaian tersebut

hanya bertujuan untuk perang” menunjukkan bagaimana penyebab masalah dikaitkan langsung dengan perilaku para pemimpin dan anggota utama BoP. Selain itu, konflik yang terus meluas di Timur Tengah semakin memperkuat persepsi bahwa organisasi tersebut gagal menjalankan mandat moral yang melekat pada namanya.

- c. **Penilaian moral:** berita ini membangun penilaian bahwa Indonesia seharusnya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan tradisi nonblok yang telah menjadi identitas diplomasi nasional. Keterlibatan dalam BoP dipandang berpotensi mengaburkan posisi independen Indonesia dalam percaturan global. Hal ini tampak dalam seruan Connie agar Indonesia “kembali pada posisi kita sebagai nonalignment, atau non-blok.” *Framing* tersebut mengandung penilaian moral bahwa sikap independen lebih sesuai dengan kepentingan nasional dan nilai-nilai perdamaian dibandingkan keterlibatan dalam organisasi yang dianggap kehilangan legitimasi.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan yaitu Indonesia keluar dari BoP dan kembali memperkuat peran sebagai negara nonblok. Connie menyebut konflik Iran sebagai “kesempatan *exit door* ini bagi Indonesia untuk keluar dari *Board of Peace*.” Menurutinya, posisi nonblok akan membuat Indonesia lebih leluasa dan lebih kuat dalam berkontribusi terhadap upaya perdamaian internasional, termasuk dalam isu Palestina. Dengan demikian, jalan keluar yang direkomendasikan adalah pemulihan orientasi politik luar negeri yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok kekuatan tertentu.

Dengan demikian, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menampilkan BoP sebagai organisasi yang kehilangan legitimasi akibat tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor utamanya. Melalui perspektif Connie Rahakundini Bakrie, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa konflik Iran sebagai bukti kegagalan narasi perdamaian yang diusung BoP. Pada saat yang sama, Indonesia dibingkai sebagai negara yang memiliki peluang untuk mengambil langkah korektif dengan keluar dari BoP. Jika hal tersebut dilakukan (Indonesia keluar dari BoP), maka Indonesia kembali menegaskan identitasnya sebagai negara nonblok yang berkomitmen pada perdamaian, kedaulatan, dan independensi dalam hubungan internasional.

8. Judul Berita: **“AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai *Board of Peace* Bukan Instrumen Perdamaian”**. (3 Maret 2026, 23.20 WIB). Berita ini membingkai serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai bukti konkret kegagalan BoP dalam menjalankan fungsi yang diklaim sebagai instrumen perdamaian global. Melalui pernyataan Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), Muhammad Anshorullah, berita mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa konflik yang terjadi sarat mengandung multi-aspek. Mulai dari hubungan AS-Israel terhadap Iran, kepentingan geopolitik yang lebih luas, isu Palestina hingga legitimasi BoP.

- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang diangkat adalah eskalasi konflik di Timur Tengah akibat serangan militer AS-Israel terhadap Iran yang dinilai memperburuk stabilitas kawasan. Konflik tersebut dibingkai sebagai bukti bahwa BoP gagal mewujudkan tujuan perdamaian yang menjadi dasar

pembentukannya. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa serangan tersebut merupakan “manifestasi nyata pertama dari *Board of Peace* juga membuktikan BoP bukan instrumen perdamaian.” Jadi, kasus BoP ialah kegagalan lembaga yang mengatasnamakan perdamaian dunia.

- b. Penentuan penyebab masalah:** penyebab utama persoalan diarahkan kepada tindakan Amerika Serikat dan Israel yang melanggar kedaulatan Iran serta memperkeruh situasi kawasan. Anshorullah menyatakan bahwa “ketegangan antara Iran dan Amerika-Israel saat ini dimanfaatkan oleh kedua aktor tersebut untuk memperkeruh stabilitas keamanan Timur Tengah dan mengalihkan perhatian dunia.” Selain itu, konflik dikaitkan dengan agenda yang lebih besar, yaitu mempertahankan dominasi geopolitik dan memperkuat posisi Israel di Palestina. *Framing* ini menempatkan AS dan Israel sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik dan melemahnya kepercayaan terhadap BoP.
- c. Penilaian moral:** berita ini memberikan penilaian yang tegas terhadap tindakan militer AS dan Israel. Serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip perdamaian global. Pernyataan bahwa “serangan militer Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional” menunjukkan adanya evaluasi moral yang kuat. Selain itu, BoP dinilai kehilangan legitimasi karena dianggap tidak mampu mencegah tindakan agresif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan organisasi

tersebut. Dalam konstruksi berita, tindakan militer sebagai bentuk imperialisme yang bertentangan dengan nilai keadilan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah penghentian agresi militer, penguatan solidaritas internasional, dan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP. AWG secara eksplisit menekankan agar “Presiden Prabowo Subianto segera menarik diri dari *Board of Peace*.” Selain itu, organisasi tersebut menyerukan kepada “seluruh komunitas internasional termasuk PBB dan OKI, organisasi masyarakat sipil, serta para pemimpin negara untuk bersatu menghentikan agresi militer AS-Israel ke Iran.” Dengan demikian, penyelesaian konflik dibingkai melalui kerja sama internasional, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan diplomasi perdamaian.

Secara umum, *framing* Republika.co.id dalam berita ini menempatkan serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai simbol kegagalan BoP dalam mewujudkan perdamaian yang dijanjikan. Melalui perspektif AWG, pembaca diarahkan untuk memandang BoP sebagai lembaga yang kehilangan legitimasi moral dan politik akibat tindakan para aktor yang terkait dengannya. Berita ini menekankan pentingnya solidaritas internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pada akhirnya, Indonesia diharapkan meninjau kembali keterlibatannya dalam BoP untuk menjaga konsistensi komitmen terhadap perdamaian dan keadilan global.

9. Judul Berita: “**Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS**”. (4 Maret 2026, 02.47 WIB). Berita ini membongkai keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan penandatanganan *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) dengan Amerika Serikat sebagai kebijakan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional serta menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui pandangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), berita mengarahkan perhatian pembaca pada risiko politik, ekonomi, dan diplomatik yang muncul apabila kedua kebijakan tersebut dijalankan tanpa evaluasi mendalam. *Framing* yang dibangun menyorot aspek teknis kebijakan dalam konteks yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap kedaulatan negara dan kepentingan nasional.
- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang ditampilkan adalah kekhawatiran bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP dan keterikatan pada ART dapat mengurangi kemandirian Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri maupun ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam pernyataan bahwa kedua kebijakan tersebut “*berpotensi menggerus kedaulatan negara dan menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.*” Berita ini menampilkan pandangan bahwa kebijakan tersebut berdampak pada hubungan internasional, memengaruhi struktur regulasi, kelembagaan, dan posisi Indonesia dalam percaturan global. Dengan demikian, masalah dibingkai sebagai ancaman terhadap prinsip dasar yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.

- b. Penentuan penyebab masalah:** sumber persoalan diarahkan pada substansi kebijakan BoP dan ART yang dinilai jauh lebih menguntungkan pihak Amerika Serikat dibanding Indonesia. Dalam berita disebutkan bahwa ART mengandung berbagai klausul yang menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang seimbang. Baiquni menegaskan bahwa kebijakan tersebut *“merugikan kedaulatan Republik Indonesia,”* sementara analisis akademisi menunjukkan bahwa keuntungan terbesar cenderung diperoleh pihak Amerika Serikat. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai indikasi keberpihakan terhadap pihak yang disebut sebagai agresor, sehingga dinilai tidak selaras dengan prinsip bebas aktif yang selama ini diterapkan Indonesia.
- c. Penilaian moral:** berita ini membangun opini publik (UGM) bahwa pemerintah seharusnya menempatkan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai moral yang ditekankan adalah pentingnya menjaga independensi nasional dari pengaruh kekuatan besar. Penilaian tersebut terlihat dalam pernyataan bahwa *“berbagai klausul yang termuat di dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri bebas dan aktif.”* Selain itu, kritik terhadap BoP didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia tidak seharusnya terlibat dalam kebijakan yang dianggap berpihak pada pihak yang melakukan agresi militer.
- d. Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan

Indonesia dalam BoP dan isi perjanjian ART. Akademisi UGM menyerukan agar pemerintah “*mencermati kembali isi dari perjanjian ART*” serta melakukan kajian komprehensif berbasis *evidence-based policy* sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Bahkan, jika proses ratifikasi dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi, opsi “*renegosiasi, penundaan, hingga pembatalan perjanjian*” semestinya dipertimbangkan. Selain itu, akademisi UGM mengajak komunitas akademik nasional melakukan kajian multidisipliner untuk memperkuat dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan.

Berpijak dari penjelasan tersebut, *framing* Republika.co.id dalam berita ini cenderung menempatkan BoP dan ART sebagai kebijakan yang mengandung risiko besar terhadap kedaulatan politik, ekonomi, dan diplomasi Indonesia. Melalui perspektif akademisi UGM, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap menjadi landasan utama dalam menentukan hubungan Indonesia dengan negara lain. Secara bersamaan, berita ini membangun narasi bahwa evaluasi kritis terhadap BoP dan ART merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri tetap berpihak pada kepentingan nasional. Selain itu, penting untuk tetap menjaga kemandirian bangsa, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan independen dalam tatanan global.

10. Judul berita: “**UJI Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot**”. (4 Maret 2026, 07.40 WIB). Republika.co.id membingkai respons pemerintah

Indonesia terhadap konflik Iran–Amerika Serikat–Israel sebagai sikap yang belum cukup tegas dan berpotensi tak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia. Melalui pernyataan resmi Universitas Islam Indonesia (UII) yang diwakili Rektor Fathul Wahid, berita mengarahkan perhatian pembaca pada pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, menolak agresi, dan mempertahankan independensi kebijakan luar negeri di tengah dinamika geopolitik global.

- a. **Pendefinisian masalah:** persoalan utama yang ditonjolkan adalah lemahnya respons pemerintah Indonesia terhadap serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran. UII menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan sikap yang tegas dalam menghadapi situasi tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa “Pemerintah RI belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam merespons serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.” Masalah kemudian meluas dari sekedar isu konflik Timur Tengah, berkembang ke sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan negara, keterlibatan Indonesia dalam BoP, serta perjanjian dagang *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*.
- b. **Penentuan penyebab masalah:** sumber persoalan diarahkan pada sikap pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berita ini mengonstruksi bahwa sikap tersebut “mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.” Di sini,

keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai faktor yang dapat mengaburkan posisi independen Indonesia dalam percaturan internasional. UII menilai bahwa hubungan kerja sama yang terlalu dekat dengan kekuatan besar berpotensi mengurangi ruang gerak Indonesia dalam mempertahankan kepentingan nasional dan mendukung perjuangan Palestina secara konsisten.

- c. **Penilaian moral:** berita ini membingkai penilaian bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menolak segala bentuk agresi serta mendukung penyelesaian konflik secara damai. UII menegaskan bahwa serangan terhadap Iran “melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang berpotensi mencederai komitmen historis Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam konstruksi berita ini, penghormatan terhadap kedaulatan negara, keadilan internasional, dan independensi kebijakan luar negeri menjadi nilai moral yang terus ditekankan.
- d. **Rekomendasi penyelesaian:** solusi yang ditawarkan adalah pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dan konsisten terhadap konflik yang terjadi. Kalangan UII mendesak pemerintah “segera mengutuk serangan tersebut dan secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan mekanisme multilateral.” Akademisi UII minta evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan

mendesak pembatalan perjanjian ART yang dinilai berpotensi melemahkan posisi tawar ekonomi nasional. Dengan demikian, penyelesaian yang direkomendasikan adalah penguatan diplomasi yang independen, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Dengan demikian, *framing* Republika.co.id dalam berita ini menempatkan UII sebagai representasi suara akademik yang mengkritisi arah kebijakan pemerintah di tengah situasi geopolitik global yang memanas. Melalui pandangan sivitas akademika UII, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa ketegasan sikap terhadap agresi internasional, konsistensi politik luar negeri bebas aktif, serta perlindungan terhadap kedaulatan nasional merupakan aspek penting yang harus dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Berita ini membangun narasi bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dan kerja sama yang dianggap terlalu dekat dengan kekuatan besar harus dievaluasi. Hal ini penting untuk mengurangi independensi Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusionalnya sebagai negara yang menjunjung perdamaian, keadilan, dan kedaulatan bangsa.

Tabel 24. Framing Pemberitaan Kontroversi Indonesia dalam BoP pada Republika.co.id

No	Judul Berita	Pendefinisian Masalah	Penentuan Penyebab Masalah	Evaluasi Moral	Rekomendasi Penyelesaian
1.	Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi BoP	Serangan militer AS-Israel ke Iran	AS-Israel dan Donald Trump	Agresi militer AS-Israel tidak bermoral	Menolak segala bentuk agresi militer
2.	Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas <i>Board of Peace</i>	Ketidaksesuaian antara narasi perdamaian dan tindakan militer di lapangan	Tindakan militer AS- Israel ke Iran	Kekuatan militer merusak klaim perdamaian internasional	Mendorong deeskalasi konflik berbasis elemen kekuatan dunia
3.	Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian	Runtuhnya kepercayaan terhadap BoP sebagai lembaga yang mengklaim perdamaian	Agresi militer AS-Israel ke Iran	Serangan militer AS-Israel bertentangan dengan prinsip perdamaian	Penguatan peran diplomatik Indonesia dan mendukung perdamaian dunia
4.	MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpinannya Tak Bisa Dipercaya	Hilangnya legitimasi moral BoP pasca serangan militer AS-Israel ke Iran	Kepemimpinan BoP dan kebijakan Amerika Serikat yang tidak sejalan dengan prinsip perdamaian	Solidaritas dan perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar	Meningjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP
5.	Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran	Kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BoP	Potensi benturan kepentingan akibat Indonesia dalam BoP di tengah konflik geopolitik	Politik luar negeri bebas aktif dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional	Keanggotaan Indonesia dalam BoP ditinjau kembali
6.	Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur Dari BoP	Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza	Keikutsertaan Indonesia dalam BoP serta rencana pengiriman pasukan melalui skema ISF	Indonesia dalam BoP bertentangan dengan konstitusi, dan prinsip politik luar negeri	Indonesia keluar dari BoP dan menolak mengirim pasukan TNI ke Gaza

7.	'Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari <i>Board of Peace</i> '	Runtuhnya kredibilitas BoP sebagai lembaga perdamaian	Tindakan militer AS- Israel sebagai aktor sentral dalam BoP	Indonesia menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif	Indonesia keluar dari BoP dan memperkuat peran sebagai negara nonblok
8.	AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai <i>Board of Peace</i> Bukan Instrumen Perdamaian	Eskalasi konflik di Timur Tengah akibat serangan militer AS-Israel ke Iran	Agresi militer AS-Israel dianggap melanggar kedaulatan Iran	Serangan militer AS-Israel melanggar hukum internasional	Hentikan agresi militer terhadap Iran
9.	Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang dengan AS	Keanggotaan Indonesia dalam BoP dan ART dapat mengurangi kemandirian Indonesia	Kebijakan BoP dan ART lebih menguntungkan pihak AS	Pentingnya menjaga independensi nasional dari pengaruh kekuatan besar	Evaluasi keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan ART
10.	UJI Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot	Indonesia dinilai tidak tegas menyusul agresi militer AS-Israel ke Iran	Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif	Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional menolak segala bentuk agresi	Indonesia keluar dari BoP dan ART

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Berdasarkan Tabel 24, konstruksi pemberitaan Republika.co.id menunjukkan struktur *framing* dalam memaknai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran dan implikasinya terhadap BoP. Melalui empat perangkat *framing* Robert Entman, media ini membangun narasi konflik AS-Israel dan Iran sebagai peristiwa keamanan internasional, persoalan kredibilitas moral dan politik lembaga yang mengatasnamakan perdamaian dunia.

Pada aspek **pendefinisian masalah**, Republika.co.id membingkai peristiwa ini sebagai krisis legitimasi terhadap BoP. Berbagai berita menempatkan serangan AS–Israel ke Iran sebagai pemicu runtuhnya

kredibilitas lembaga yang selama ini mengusung narasi perdamaian global. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai posisi Indonesia yang tetap menjadi bagian dari BoP ketika organisasi tersebut dinilai gagal mencerminkan prinsip-prinsip perdamaian yang diklaimnya.

Dalam elemen **penentuan penyebab masalah**, sumber utama persoalan diarahkan kepada tindakan militer AS–Israel, termasuk kepemimpinan Donald Trump dan kebijakan Amerika Serikat yang dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian. *Framing* ini memperlihatkan bahwa penyebab krisis pada aktor-aktor yang memiliki posisi sentral dalam BoP namun justru melakukan tindakan agresif. Dengan demikian, Republika menempatkan AS dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Selanjutnya pada dimensi **evaluasi moral**, pemberitaan Republika menampilkan penilaian normatif yang “cukup tegas”. Agresi militer dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai perdamaian, melanggar hukum internasional, merusak kedaulatan negara, dan mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia. Narasi yang muncul menyorot dampak politik, serta menekankan aspek moral bahwa kekuatan militer tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengklaim diri sebagai penjaga perdamaian dunia.

Sementara itu dalam **rekomendasi penyelesaian**, Republika.co.id menghadirkan gagasan deeskalasi konflik, penghentian agresi militer, penguatan diplomasi, serta evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP. Bahkan, beberapa berita secara eksplisit mendorong Indonesia untuk keluar dari BoP dan memperkuat identitasnya sebagai negara yang berpegang pada prinsip nonblok dan politik luar negeri

bebas aktif. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan mengedepankan jalur diplomasi, independensi nasional, dan konsistensi terhadap amanat konstitusi.

Bertolak dari penjelasan tersebut, *framing* Republika.co.id membentuk pemahaman bahwa persoalan utama dalam kasus ini adalah ketidaksesuaian antara narasi perdamaian yang dibangun BoP dengan praktik politik yang dilakukan aktor-aktor pendukungnya. Melalui konstruksi tersebut, Republika.co.id menempatkan isu legitimasi moral sebagai pusat pembahasan dan menjadikan konsistensi terhadap nilai perdamaian sebagai tolok ukur utama dalam menilai tindakan negara maupun lembaga internasional. Dengan demikian, realitas yang dibangun media ini mengarah pada pemaknaan bahwa keberlangsungan sebuah institusi perdamaian sangat ditentukan oleh kesesuaian antara prinsip yang diklaim dan tindakan nyata yang dilakukan para aktornya.

C. Kontroversi BoP: Konstruksi Realitas dalam Media Daring Indonesia

Berdasarkan analisis *framing* Entman terhadap Kompas.com dan Republika.co.id, terlihat bahwa kedua media tidak memosisikan kontroversi BoP sebagai isu organisasi internasional atau kerja sama perdamaian global. Sebaliknya, BoP dikonstruksi sebagai isu yang sarat makna politik, moral, dan geopolitik pasca serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran. Peristiwa tersebut memicu perdebatan mengenai konsistensi BoP antara komitmennya terhadap perdamaian dan realitas politik yang berkembang.

Kompas.com menyorot kontroversi BoP sebagai persoalan yang berkaitan dengan posisi Indonesia di tengah dinamika konflik inter-

nasional. Fokus pemberitaan diarahkan pada serangan AS–Israel ke Iran, sekaligus implikasinya terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP, respons elite politik nasional, serta proses pengambilan kebijakan luar negeri. Kompas.com menampilkan berbagai suara, mulai dari MUI, DPR, akademisi, hingga pemerintah, yang mempertanyakan relevansi keanggotaan Indonesia dalam lembaga tersebut setelah kredibilitas BoP dinilai ‘runtuh’ akibat konflik Iran. Dalam pemberitaan tersebut, kontroversi BoP kemudian dihubungkan dengan perdebatan mengenai sikap Indonesia terhadap perkembangan politik internasional dan implikasinya bagi kebijakan luar negeri.

Sementara itu, Republika.co.id mendefinisikan kontroversi BoP secara lebih tegas sebagai krisis legitimasi moral lembaga perdamaian. Serangan AS–Israel ke Iran sebagai bukti bahwa BoP gagal menjalankan mandat yang selama ini diklaimnya, yakni menjaga perdamaian dunia. Dalam beberapa pemberitaannya, Republika.co.id menempatkan BoP sebagai institusi yang ‘bermasalah’ karena ketidaksesuaian antara retorika perdamaian dan praktik politik para aktor utama yang terlibat. Oleh karena itu, isu yang dikedepankan mengarah pada runtuhnya kepercayaan terhadap BoP sebagai simbol perdamaian internasional, selain kebijakan Prabowo dengan bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, realitas yang dikonstruksi kedua media menunjukkan perbedaan penekanan. Kompas.com membangun realitas bahwa kontroversi BoP merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Konflik Iran memang menjadi latar utama, tetapi perhatian media lebih banyak diarahkan pada bagaimana Indonesia harus merespons situasi tersebut. Karena itu, pemberitaan Kompas.com kerap menghubungkan isu BoP dengan mekanisme demokrasi, ratifikasi DPR, komunikasi antarelite politik, konsolidasi nasional, serta

prinsip politik luar negeri bebas aktif. Realitas yang dibangun adalah Indonesia sebagai aktor yang selayaknya bersikap hati-hati, mempertimbangkan aspek moral, politik, hukum, dan konstitusional secara bersamaan sebelum mengambil keputusan strategis terkait BoP.

Republika.co.id justru mengonstruksi realitas yang lebih normatif dan kritis terhadap BoP. Dalam pemberitaannya, organisasi tersebut digambarkan kehilangan kredibilitas karena para aktor sentralnya justru terlibat dalam tindakan militer yang dianggap bertentangan dengan prinsip perdamaian. Serangan terhadap Iran diposisikan sebagai bukti kegagalan moral dan politik BoP. Akibatnya, Indonesia dikonstruksi sebagai negara yang sepatutnya menjaga jarak dari organisasi tersebut agar tetap konsisten dengan amanat konstitusi, politik luar negeri bebas aktif, serta komitmen historis terhadap perjuangan Palestina dan perdamaian dunia.

Berdasarkan perspektif dari kategori isu, BoP dalam kedua media tidak dikonstruksi sekadar isu diplomatik. Kompas.com cenderung membingkai BoP sebagai perpaduan antara isu politik luar negeri, geopolitik, dan tata kelola kebijakan nasional. Konflik Iran menjadi konteks yang mempertemukan perdebatan mengenai legitimasi lembaga internasional, posisi Indonesia dalam percaturan global, serta mekanisme politik domestik dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Dengan demikian, dimensi diplomatik hadir, tetapi melekat dengan kepentingan nasional dan proses politik dalam negeri.

Di sisi lain, Republika.co.id lebih kuat mengonstruksi BoP sebagai isu geopolitik, kedaulatan nasional, dan ideologi politik luar negeri. Pemberitaannya menonjolkan pertentangan antara prinsip perdamaian dengan praktik dominasi kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, Republika.co.id menekankan penting-

nya menjaga kedaulatan nasional, independensi diplomasi, serta konsistensi Indonesia terhadap prinsip bebas aktif dan anti-penjajahan. Dalam pemberitaan ini, BoP hadir dalam konteks perdebatan yang menyangkut kepentingan geopolitik sekaligus pertanyaan mengenai konsistensi komitmen perdamaian dalam hubungan internasional.

Secara keseluruhan, kedua media mengonstruksi kontroversi BoP sebagai isu yang berhubungan dengan konflik internasional, konsistensi politik luar negeri Indonesia maupun posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia. Kompas.com lebih menonjolkan dimensi politik luar negeri dan proses pengambilan keputusan negara, sedangkan Republika.co.id lebih menekankan aspek legitimasi moral, kedaulatan nasional, dan konsistensi ideologis politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, fokus pemberitaan bergeser pada bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam dinamika geopolitik internasional, seraya tetap menjaga komitmen terhadap prinsip perdamaian dan kepentingan nasional.

D. Diferensiasi *Framing* dan Orientasi Editorial

Perbedaan *framing* antara Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan kontroversi bergabungnya Indonesia dalam BoP menunjukkan bahwa media menyampaikan fakta, melakukan seleksi dan penonjolan aspek tertentu sesuai dengan orientasi editorial yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan Entman (2003), media memiliki peran dalam menentukan aspek mana yang memperoleh perhatian lebih besar dalam pemberitaan. Pilihan tersebut kemudian turut membentuk cara khalayak menafsirkan suatu isu. Dalam kasus BoP, kedua media sama-sama menjadikan serangan AS- Israel terhadap Iran sebagai titik perhatian utama. Namun, cara

keduanya mengonstruksi makna atas peristiwa tersebut memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas.

Kompas.com cenderung membingkai kontroversi BoP sebagai persoalan kebijakan publik dan politik luar negeri yang membutuhkan pertimbangan institusional. Pemberitaannya menyorot kritik terhadap BoP, menghadirkan respons pemerintah, pandangan akademisi, mekanisme ratifikasi DPR, hingga komunikasi politik yang dilakukan Presiden Prabowo dengan para tokoh nasional. Sebaliknya, Republika.co.id lebih banyak menempatkan BoP dalam kerangka moral dan ideologis. Fokus pemberitaan diarahkan pada kontradiksi antara klaim perdamaian yang diusung BoP dengan tindakan militer AS-Israel, sehingga isu yang menonjol adalah krisis legitimasi moral lembaga tersebut.

Perbedaan *framing* tersebut sejalan dengan kecenderungan editorial masing-masing media. Kompas.com lebih menempatkan isu BoP dalam kerangka kebijakan dan diplomasi negara, sedangkan Republika.co.id lebih banyak menyoroti aspek moral, kedaulatan, dan konsistensi komitmen terhadap perdamaian. Kompas.com sejak awal dikenal sebagai media arus utama yang mengedepankan prinsip moderasi, keberimbangan, dan rasionalitas dalam peliputan isu politik maupun kebijakan publik. Karakter tersebut tercermin dalam pemberitaan BoP yang berupaya menghadirkan beragam aktor dan sudut pandang. Dalam pemberitaan Kompas.com, isu BoP ditempatkan dalam konteks kebijakan negara, khususnya terkait respons pemerintah dan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional yang berkembang.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa media menjalankan peran jurnalistik berbeda dalam memaknai realitas sosial. Hanitzsch & Vos (2018) menjelaskan bahwa praktik jurnalisme dipengaruhi oleh nilai, orientasi, dan konteks sosial yang melingkupi organisasi media. Dalam konteks ini, Kompas.com dan Republika.co.id memperlihatkan kecenderungan yang berbeda dalam mendefinisikan isu yang dianggap penting untuk diketahui publik

Di sisi lain, Republika memiliki kedekatan historis dengan isu-isu keumatan Islam dan sering memberikan perhatian lebih besar pada persoalan Palestina, keadilan global, serta relasi antara dunia Islam dan kekuatan Barat. Karakter tersebut tampak dalam pemberitaan BoP yang lebih sering menggunakan narasumber dari MUI, tokoh masyarakat sipil, pakar hubungan internasional, maupun kelompok purnawirawan yang menyorot aspek moral, kedaulatan, dan solidaritas terhadap Palestina. Implikasinya, BoP lebih sering dikonstruksi sebagai simbol kegagalan moral dan politik dari proyek perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Perbedaan seleksi isu tersebut menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap pemahaman khalayak. Pembaca Kompas.com cenderung diarahkan untuk melihat kontroversi BoP sebagai persoalan yang membutuhkan evaluasi kebijakan secara hati-hati melalui mekanisme demokratis dan konstitusional (Wijayanto & Masduki, 2023). Perhatian publik diarahkan pada pertanyaan mengenai posisi Indonesia, prosedur ratifikasi, konsultasi politik, dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri nasional. Sebaliknya, pembaca Republika.co.id lebih diarahkan untuk mempertanyakan kredibilitas BoP dan menilai keterlibatan Indonesia dari sudut pandang moral, kedaulatan nasional, serta konsistensi terhadap prinsip perdamaian dan dukungan terhadap Palestina.

Implikasi serupa terlihat pada aspek yang ditonjolkan masing-masing media. Kompas.com menekankan dialog, konsultasi politik, proses legislasi, dan koordinasi antarelite sebagai cara menghadapi krisis internasional. Sebaliknya, Republika lebih banyak menonjolkan legitimasi moral, politik bebas aktif, ancaman terhadap kedaulatan nasional, serta risiko Indonesia terseret ke dalam konfigurasi geopolitik yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, meskipun objek pemberitaannya sama, penekanan yang berbeda menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda pula.

Temuan ini sejalan dengan konsep *Hierarchy of Influences* yang dikemukakan oleh Shoemaker & Reese (2014). Menurut mereka, isi media dipengaruhi oleh berbagai tingkat faktor, mulai dari individu jurnalis, rutinitas media, organisasi, hingga sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perbedaan *framing* BoP merupakan pilihan jurnalis, mencerminkan nilai-nilai organisasi media, orientasi editorial, karakter audiens, serta posisi media dalam struktur sosial dan politik yang melingkupinya.

Hal tersebut diperkuat oleh pandangan Humanes et al. (2023) bahwa performa peran jurnalistik dalam media digital tercermin melalui keputusan redaksional mengenai isu yang dipilih, sumber yang digunakan, dan aspek yang diberi penekanan dalam pemberitaan. Artinya, perbedaan *framing* yang muncul bersinggungan erat dengan bagaimana realitas tersebut dikonstruksi melalui praktik jurnalistik sehari-hari.

Dalam perspektif ekonomi politik media, pilihan *framing* tidak terlepas dari cara media untuk tetap relevan bagi segmen audiens yang selama ini menjadi basis pembacanya. Orientasi media dan ekspektasi audiens menjadi perhatian dalam studi jurnalisme kontem-

porer. Mahr et al. (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai profesional media saat ini berkembang dalam lingkungan digital yang semakin dipengaruhi oleh kepercayaan publik dan harapan audiens. Karena itu, pilihan *framing* yang dilakukan media sering kali berkaitan untuk menjaga relevansi sekaligus mempertahankan kredibilitas di hadapan pembacanya (Atish, 2024; Damstra et al., 2026).

Secara empiris, Kompas.com cenderung melayani pembaca yang mengharapkan informasi politik yang moderat, institusional, dan berbasis kebijakan (Tumiwa & Erik Akmal, 2026). Sementara itu, Republika.co.id lebih dekat dengan audiens yang memberi perhatian besar penekanan pada diksi yang lebih sarat emosi (Widyadhana et al., 2025). Media ini juga menekankan pada pada isu keadilan global, solidaritas umat Islam, dan politik internasional yang berkaitan dengan Palestina (Efendi et al., 2024). Perbedaan orientasi audiens tersebut berkontribusi terhadap cara kedua media memilih isu dan menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaan.

Dengan demikian, perbedaan *framing* BoP antara Kompas.com dan Republika.co.id menunjukkan bahwa konstruksi realitas media tidak pernah sepenuhnya netral. Kompas.com cenderung membingkai isu melalui perspektif kebijakan dan tata kelola pemerintahan (Adiprasetio & Taqiyya, 2023). Sedangkan Republika.co.id lebih menekankan dimensi moral (Subarkah & Arviani, 2026), ideologis (Muthaqin et al., 2021) dan kedaulatan nasional (Ainani, 2025). Perbedaan tersebut mencerminkan karakter institusional, orientasi editorial, serta segmen audiens yang menjadi basis masing-masing media dalam memaknai peristiwa yang sama.

E. Kebijakan Redaksional dan Orientasi Ideologis Media

1. Keterkaitan Analisis Tematik dan Pembingkaihan Isu

Analisis tematik dan analisis *framing* dalam buku ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana isu mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP dikonstruksi oleh media. Analisis tematik berperan mengidentifikasi konfigurasi tema dan makna yang berulang dalam keseluruhan pemberitaan. Sedangkan analisis *framing* Robert Entman memberikan penjelasan mengenai cara media membangun makna tersebut melalui proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, pemberian penilaian, hingga rekomendasi penyelesaian. Integrasi keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh karena memperlihatkan tema dalam pemberitaan dan menjelaskan mekanisme yang membentuk tema itu menjadi realitas yang dipahami publik.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai BoP berkembang di sejumlah tema, antara lain posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global, konsistensi politik luar negeri bebas aktif, konflik AS–Israel dan Iran, isu kemanusiaan, serta dinamika pengambilan kebijakan pemerintah. Tema-tema tersebut hadir saling berkaitan dan membentuk struktur makna yang menjadi dasar dalam keseluruhan pemberitaan. Kehadiran tema yang berulang menunjukkan bahwa media mengkonstruksi pemberitaan berdasarkan fokus tertentu yang dianggap memiliki nilai berita sekaligus relevansi bagi pembaca.

Sementara itu, analisis *framing* memperlihatkan bahwa tema yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh masing-masing media. Kompas.com lebih banyak membingkai isu BoP sebagai persoalan kebijakan luar negeri yang membutuhkan kehati-hatian,

pertimbangan kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, Republika.co.id membingkai isu tersebut melalui perspektif moral dan kemanusiaan dengan menempatkan konflik Timur Tengah sebagai konteks utama dalam menilai legitimasi BoP serta posisi Indonesia di dalamnya. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tema yang sama tidak secara otomatis menghasilkan makna yang sama. Makna terbentuk melalui cara media memilih fakta, menentukan aktor yang ditonjolkan, memberikan penilaian terhadap peristiwa, dan menyusun narasi yang membingkai keseluruhan pemberitaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa analisis tematik dan *framing* bekerja pada dua tingkat analisis yang berbeda, tetapi saling menguatkan. Analisis tematik memperlihatkan konfigurasi makna yang muncul secara berulang dalam kumpulan berita, sedangkan *framing* menjelaskan proses konstruksi yang membuat tema dan makna tersebut memperoleh penekanan tertentu. Dengan demikian, tema sebagai struktur makna yang berkembang dalam pemberitaan, sementara *framing* merupakan mekanisme yang membentuk dan mengarahkan struktur makna tersebut. Integrasi analisis tematik dan *framing* memberikan ruang untuk memahami proses konstruksi realitas media secara lebih utuh. Melalui integrasi tersebut, dapat dijelaskan bagaimana media memilih suatu isu, mengembangkan tema-tema tertentu, membingkai peristiwa, kemudian merepresentasikannya dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Dalam konteks buku ini, integrasi kedua pendekatan memperlihatkan bahwa perbedaan pemberitaan antara Kompas.com dan Republika.co.id tidak terletak pada fakta dasar yang diberitakan. Kedua media mengangkat peristiwa yang relatif sama, mengacu pada dinamika geopolitik yang sama, serta merespons perkembangan isu

yang sama. Perbedaannya muncul pada cara masing-masing media mengorganisasi fakta ke dalam tema-tema tertentu, kemudian membingkainya melalui perspektif editorial yang berbeda. Proses tersebut menghasilkan konstruksi makna yang berbeda mengenai posisi Indonesia dalam BoP, meskipun titik awal pemberitaannya berasal dari realitas yang sama.

Integrasi analisis tematik dan *framing* menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konstruksi realitas media. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkembang dalam keseluruhan data, sedangkan analisis *framing* menjelaskan cara media mengonstruksi makna melalui perangkat pembingkai. Kedua hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu sehingga representasi isu dalam pemberitaan dapat dipahami secara lebih utuh. Dari interpretasi tersebut terlihat bahwa kebijakan redaksional dan orientasi ideologis masing-masing media tercermin dalam konstruksi realitas yang dihadirkan kepada publik.

2. Interpretasi Integratif terhadap Konstruksi Isu

Hasil analisis tematik dan pembingkai isu menunjukkan bahwa kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak berkembang sebagai realitas yang hadir secara apa adanya dalam pemberitaan media. Isu tersebut dibentuk melalui proses konstruksi makna yang berlangsung sejak media memilih fakta, menentukan tema yang dianggap penting, hingga menyusun narasi yang memberikan arah tertentu terhadap cara publik memahami peristiwa. Dalam konteks ini, realitas yang hadir di ruang publik merupakan hasil dari proses interpretasi media terhadap suatu peristiwa, bukan sekadar refleksi langsung dari fakta yang terjadi.

Analisis tematik memperlihatkan bahwa pemberitaan kedua media berkembang di sekitar tema-tema yang relatif sama, seperti dinamika geopolitik Timur Tengah, posisi Indonesia dalam BoP, politik luar negeri bebas aktif, isu kemanusiaan, serta proses pengambilan kebijakan pemerintah. Kesamaan tema tersebut menunjukkan bahwa kedua media merespons peristiwa yang sama dan mengacu pada konteks sosial-politik yang serupa. Namun, kesamaan tema tidak menghasilkan pemaknaan yang identik. Perbedaan mulai tampak ketika setiap media menentukan aspek yang lebih layak diperhatikan, aktor yang diposisikan sebagai penyebab, nilai yang dilekatkan pada peristiwa, serta arah penyelesaian yang ditawarkan kepada publik.

Pada titik inilah analisis *framing* memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kompas.com mengonstruksi isu BoP sebagai bagian dari dinamika kebijakan luar negeri yang memerlukan pertimbangan kelembagaan, kehati-hatian diplomatik, serta ruang dialog di antara berbagai aktor negara. Sebaliknya, Republika.co.id mengonstruksi isu yang sama melalui perspektif moral dan kemanusiaan dengan menempatkan konflik AS–Israel dan Iran sebagai pijakan utama dalam menilai posisi Indonesia terhadap BoP. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi realitas ditentukan oleh cara fakta dipilih, disusun, dan diberi makna melalui proses *framing*.

Interpretasi ini memperlihatkan bahwa tematik analisis dan *framing* merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam pembentukan realitas media. Tematik memberikan arah mengenai isu apa yang terus dihadirkan kepada publik, sedangkan *framing* menentukan bagaimana isu tersebut dipahami. Dengan demikian, tematik berfungsi sebagai struktur makna yang menjaga konsistensi pemberitaan, sementara *framing* menjadi mekanisme yang mengarahkan penafsiran terhadap struktur makna tersebut. Integrasi keduanya

memperlihatkan bahwa proses konstruksi realitas berlangsung dialektis mulai dari pemilihan isu, pembentukan tema, pemingkaian peristiwa hingga terbentuknya pemahaman tertentu di ruang publik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konstruksi isu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan redaksional media. Pilihan terhadap narasumber, sudut pandang pemberitaan, penekanan pada aspek tertentu, maupun cara menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya menunjukkan konsistensi proses editorial. Kebijakan redaksional tersebut menjadi ruang berbagai pertimbangan jurnalistik bertemu dengan nilai-nilai yang dianut oleh media. Dalam proses itulah orientasi ideologis memperoleh bentuknya melalui praktik pemberitaan. *Framing* kemudian menjadi medium yang menghadirkan orientasi tersebut ke dalam narasi berita sehingga bisa dipahami oleh publik sebagai representasi atas realitas sosial.

Dari perspektif konstruktivis, temuan ini menegaskan bahwa makna tidak melekat secara tetap pada suatu peristiwa. Makna terbentuk melalui proses interpretasi yang berlangsung dalam praktik komunikasi. Media menjadi salah satu aktor yang berperan dalam proses tersebut karena setiap keputusan editorial, baik dalam memilih isu, menyusun narasi, maupun menampilkan sumber informasi, berkontribusi terhadap pembentukan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai polemik bergabungnya Indonesia dalam BoP sebagai penyampaian informasi mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, serta sebagai proses produksi makna yang membentuk cara publik memaknai posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik internasional.

Integrasi hasil analisis tematik dan *framing* menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap konstruksi isu dalam pemberitaan

media. Tema-tema yang diperoleh melalui analisis tematik merupakan hasil interpretasi reflektif peneliti terhadap keseluruhan teks berita, sedangkan analisis *framing* menjelaskan cara media mengonstruksi makna melalui perangkat pembingkai. Kedua hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu sehingga representasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi realitas media mencerminkan dialektika antara praktik jurnalistik, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis masing-masing media.

3. Implikasi Integrasi Analisis terhadap Kajian Media

Integrasi analisis tematik dan analisis *framing* dalam buku ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami proses konstruksi realitas media, khususnya pada isu politik luar negeri. Selama ini, kedua pendekatan tersebut umumnya digunakan secara terpisah. Analisis tematik berfokus pada identifikasi struktur makna yang berkembang dalam pemberitaan, sedangkan analisis *framing* menjelaskan bagaimana media membangun cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa. Buku ini menunjukkan bahwa integrasi analisis tematik dan *framing* menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap konstruksi isu dalam pemberitaan media. Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema yang diperoleh secara induktif melalui interpretasi reflektif terhadap teks, sedangkan analisis *framing* menjelaskan cara media mengonstruksi representasi isu melalui proses pembingkai.

Buku ini memperlihatkan bahwa tema-tema yang muncul dalam pemberitaan mengenai kontroversi keterlibatan Indonesia dalam

BoP menjadi fondasi bagi proses *framing* yang dilakukan masing-masing media. Tema yang sama dapat menghasilkan konstruksi makna yang berbeda karena setiap media memilih aspek yang dianggap penting, menentukan aktor yang lebih ditonjolkan, memberikan penilaian terhadap peristiwa, serta menawarkan arah penyelesaian sesuai dengan perspektif pemberitaannya. Dengan demikian, tema dan *framing* merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam membentuk representasi realitas. Tema memberikan struktur makna yang relatif konsisten, sedangkan *framing* mengarahkan bagaimana struktur makna tersebut dipahami dalam sebuah narasi pemberitaan.

Temuan tersebut semakin memperjelas bahwa konstruksi realitas media berlangsung secara kompleks. Perbedaan representasi antara Kompas.com dan Republika.co.id lahir dari proses editorial yang menempatkan fakta dalam kerangka penafsiran tertentu. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Berger & Luckmann (1966, 1990) bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi yang dibentuk melalui proses pemaknaan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ini, media menjadi salah satu institusi yang mengonstruksi realitas melalui proses seleksi isu, pembentukan tema, pembedingkaian peristiwa, dan penyusunan narasi. Realitas mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP yang hadir di ruang publik merupakan representasi dari proses konstruksi tersebut, bukan cerminan yang sepenuhnya netral terhadap fakta.

Pada saat yang sama, buku ini menunjukkan bahwa proses *framing* tak bisa dilepaskan dari konteks produksi berita. Perspektif *Hierarchy of Influences* dari Shoemaker & Reese (2014) mempertegas bahwa konstruksi realitas media berlangsung dalam lingkungan organisasi yang dipengaruhi oleh rutinitas jurnalistik, kebijakan redaksional,

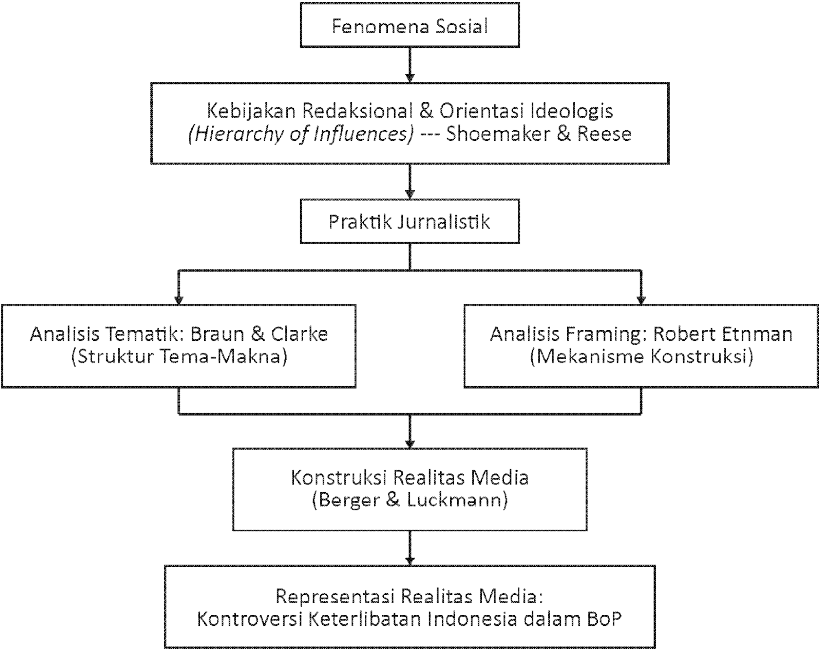
kepentingan institusi, pengaruh lingkungan sosial-politik, hingga orientasi ideologis media. Berbagai lapisan tersebut melandasi keputusan editorial mengenai isu apa yang dipilih, bagaimana isu tersebut diberi penekanan, serta cara media membangun narasi terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, *framing* sebagai praktik jurnalistik yang lahir dari proses produksi berita yang berlangsung dalam struktur sosial dan kelembagaan media.

Berdasarkan integrasi tersebut, buku ini menawarkan **Model Integratif Tematik–Framing dalam Konstruksi Realitas Media** sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan pembentukan makna media terhadap isu politik luar negeri. Model ini menggabungkan empat perspektif yang saling melengkapi, yaitu analisis tematik, analisis *framing*, *Hierarchy of Influences*, dan teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann. Keempatnya membentuk satu kerangka analitis yang menjelaskan proses konstruksi makna media, mulai dari interpretasi terhadap teks pemberitaan, konteks produksi berita, hingga terbentuknya representasi realitas yang dipahami publik. Integrasi keempat perspektif tersebut menghasilkan satu kerangka analitis yang menjelaskan konstruksi isu media secara utuh. Kerangka ini menghubungkan proses interpretasi terhadap teks pemberitaan, konteks produksi berita, konstruksi realitas media, hingga terbentuknya pemaknaan publik terhadap isu politik luar negeri.

Model konseptual yang dihasilkan dalam buku ini memiliki relevansi untuk digunakan pada kajian berbagai isu strategis di media, termasuk diplomasi internasional, konflik geopolitik, kebijakan publik, dan isu-isu kemanusiaan. Integrasi analisis tematik, *framing*, konstruksi realitas sosial, dan *Hierarchy of Influences* menghasilkan kerangka analitis yang memberikan pemahaman mengenai proses representasi media mencakup konstruksi makna dalam pemberitaan, hingga

terbentuknya pemaknaan publik. Perspektif ini dapat memperkaya pengembangan kajian media dengan menghadirkan pemaknaan yang lebih utuh terhadap keterkaitan antara praktik jurnalistik, kebijakan redaksional, orientasi ideologis media, dan representasi realitas dalam pemberitaan isu politik luar negeri.

Berikut gambar dari Model Integratif Tematik–Framing dalam konstruksi realitas media:



Gambar 1. Model Integratif Tematik–Framing dalam Konstruksi Realitas Media
(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Gambar 1 memperlihatkan sebuah model integratif yang menghubungkan berbagai perspektif dalam studi media untuk menjelaskan bagaimana realitas media dibentuk secara bertahap melalui proses yang saling berkaitan. Model ini memandang bahwa setiap pemberitaan berpijak dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, fenomena tersebut tidak hadir begitu saja dalam media, karena terlebih dahulu melalui proses seleksi, interpretasi, dan penyusunan makna oleh institusi media.

Pada tahap awal, model mengadopsi kerangka *Hierarchy of Influences* dari Shoemaker dan Reese yang menjelaskan bahwa praktik jurnalistik dipengaruhi oleh kebijakan redaksional serta orientasi ideologis media. Perspektif ini menunjukkan berita merupakan hasil interaksi antara nilai profesional, kepentingan institusi, rutinitas kerja, serta konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keputusan mengenai isu apa yang diangkat, sudut pandang yang dipilih, maupun narasumber yang diberikan ruang tidak pernah sepenuhnya bersifat netral.

Praktik jurnalistik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kemudian dianalisis melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, analisis tematik Braun dan Clarke digunakan untuk mengidentifikasi struktur tema yang muncul dalam kumpulan teks berita. Pendekatan ini penting bagi peneliti untuk memahami struktur makna yang berkembang dalam berbagai pemberitaan sehingga dapat menggambarkan kecenderungan narasi yang dibangun media. Kedua, analisis *framing* Robert Entman digunakan untuk menjelaskan mekanisme konstruksi makna melalui proses pendefinisian masalah, penentuan penyebab, pemberian penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Melalui analisis *framing*, dapat ditelusuri bagaimana

media mengarahkan perhatian khalayak pada aspek tertentu sekaligus mengurangi penonjolan aspek lainnya.

Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses konstruksi realitas media sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann. Dalam perspektif ini, realitas media dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses pemilihan fakta, pemberian makna, serta penyajian informasi secara berulang. Oleh karena itu, representasi media terhadap suatu isu sebagai hasil interpretasi yang diproduksi melalui mekanisme jurnalistik dan dipengaruhi oleh kepentingan institusional. Dalam konteks penelitian mengenai kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP, model integratif ini memberi kerangka analisis yang utuh untuk menelusuri dinamika sosial, formulasi berita, pembentukan tema, strategi *framing*, hingga terbentuknya representasi realitas yang diterima oleh publik.

Bab V

.....

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa Kompas.com dan Republika.co.id mengonstruksi kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP melalui struktur tematik yang memiliki kesamaan, tetapi berbeda dalam penekanannya. Kompas.com menghadirkan empat tema yaitu evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP, legitimasi BoP dipertanyakan, delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP, serta justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP. Sementara itu, Republika.co.id menampilkan tiga tema yang sama, kecuali tema justifikasi kebijakan Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com masih memberi ruang bagi penjelasan pemerintah atas kebijakan diplomatiknya, sedangkan Republika.co.id lebih menitikberatkan pada kritik publik melalui evaluasi kebijakan, legitimasi BoP, dan delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP. Buku ini menunjukkan bahwa isu BoP dihubungkan dengan konflik AS–Israel dan Iran, persoalan Palestina, legitimasi organisasi internasional, serta politik luar negeri Indonesia. Keterjalinan isu tersebut menunjukkan

bahwa kontroversi Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Temuan ini menegaskan bahwa struktur tematik dan keterjalinan isu merupakan unsur yang saling melengkapi dalam konstruksi pemberitaan media. Melalui pengorganisasian tema dan hubungan antartema, pemberitaan mengenai BoP menghubungkan berbagai isu sehingga kontroversi tersebut sebagai bagian dari dinamika politik internasional yang lebih luas. Kontribusi buku ini terletak pada penggunaan analisis tematik Braun dan Clarke untuk mengkaji struktur tematik dan keterjalinan isu dalam pemberitaan politik luar negeri. Melalui pendekatan tersebut, buku ini menunjukkan bahwa media berperan dalam mengorganisasi tema sekaligus menghubungkan berbagai isu untuk mengonstruksi pemahaman terkait kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan studi media (jurnalistik) khususnya dalam memahami bagaimana media digital mengonstruksi pemberitaan atas isu-isu politik luar negeri yang kompleks.

Studi ini menunjukkan bahwa kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP dimaknai berbeda oleh Kompas.com dan Republika. co.id melalui proses pembingkai berita. Dengan menggunakan analisis *framing* Robert Entman, temuan ini memperlihatkan bahwa kedua media berangkat dari isu yang sama, yaitu konflik AS–Israel dan Iran serta keterlibatan Indonesia dalam BoP, tetapi mengonstruksi pemahaman yang berbeda melalui proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa fakta yang sama dapat melahirkan pemaknaan yang berbeda ketika media memilih perspektif, menonjolkan aspek tertentu, dan menyusun hubungan sebab-akibat dalam pemberitaan. Kompas.com cenderung membingkai kontroversi BoP sebagai persoalan kebijakan luar negeri yang semes-

tinya disikapi melalui proses kelembagaan dan pertimbangan secara komprehensif. Pemberitaannya memberi ruang bagi beragam pandangan dari pemerintah, akademisi, anggota DPR, dan tokoh masyarakat, sehingga isu BoP dikonstruksi sebagai bagian dari dinamika pengambilan keputusan negara dalam merespons perkembangan geopolitik. Sebaliknya, Republika.co.id membingkai isu tersebut melalui perspektif moral dan kemanusiaan. Serangan AS-Israel terhadap Iran diposisikan sebagai indikator melemahnya legitimasi BoP, sehingga pemberitaannya lebih banyak mengarahkan perhatian pada pentingnya mengevaluasi keterlibatan Indonesia agar tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, amanat konstitusi, dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Perbedaan framing dalam studi ini memperlihatkan bahwa media berkontribusi dalam membentuk pemahaman publik terhadap posisi Indonesia dalam kontroversi BoP. Melalui proses seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu, Kompas.com dan Republika.co.id menghadirkan penafsiran yang berbeda mengenai kepentingan nasional, legitimasi kebijakan luar negeri, serta posisi diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan pemahaman publik berakar pada cara media membingkai peristiwa. Melalui proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, dan penyusunan narasi, fakta yang sama menghasilkan konstruksi makna yang berbeda. Konstruksi tersebut menjadi representasi dari kebijakan redaksional dan orientasi ideologis masing-masing media dalam memaknai realitas yang berlangsung secara dinamis.

Studi ini menunjukkan bahwa integrasi analisis tematik dan analisis *framing* menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai konstruksi isu dalam pemberitaan media. Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema yang diperoleh secara induktif melalui interpretasi

reflektif terhadap keseluruhan teks berita, sementara analisis *framing* menjelaskan cara media mengonstruksi makna melalui proses pembingkaihan. Integrasi kedua pendekatan tersebut memberikan dasar lebih utuh untuk memahami representasi isu dalam pemberitaan. Kompas.com dan Republika.co.id mengangkat isu yang sama, yaitu kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP, dengan merujuk pada konteks geopolitik internasional yang serupa. Meskipun demikian, masing-masing media menghadirkan representasi yang berbeda melalui pilihan aspek yang ditonjolkan, aktor yang diberi perhatian, penilaian terhadap peristiwa, serta penyusunan narasi mengenai posisi Indonesia dalam BoP. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi makna dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan redaksional dan orientasi ideologis yang melandasi proses editorial masing-masing media. Interpretasi integratif terhadap hasil analisis tematik dan *framing* memperlihatkan bahwa representasi isu merupakan hasil konstruksi makna yang lahir melalui praktik jurnalistik. Temuan ini sejalan dengan perspektif konstruktivis yang memandang realitas media sebagai hasil proses pemaknaan terhadap suatu peristiwa. Kontribusi studi ini diwujudkan melalui pengembangan Model Integratif Tematik–*Framing* dalam Konstruksi Realitas Media yang menggabungkan analisis tematik, analisis *framing*, perspektif *Hierarchy of Influences*, dan teori konstruksi realitas sosial. Model tersebut menawarkan kerangka konseptual untuk menjelaskan konstruksi isu sejak interpretasi terhadap teks, konteks produksi berita, hingga terbentuknya representasi realitas di ruang publik, serta memperkaya pengembangan kajian media pada isu politik luar negeri dan berbagai isu strategis lainnya

.....

Daftar Pustaka

- Adiprasetio, J., & Taqiyya, A. (2023). Blurring Context and One-Sided: Kompas.com in Framing the West Papua Crisis. *Kajian Jurnalisme*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jkj.v7i1.46688>
- Afriansyah, A., & Nasu, H. (2025). Bebas-Aktif: On the Law of Neutrality Applicable to Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 22(3), 507–538. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.3.1914>
- Agarwal, L., & Priti. (2022). Media Ownership and Its Influence on Political Reporting. *Journal of Nonlinear Analysis and Optimization*, 13(1), 78–86. <https://doi.org/10.36893/JNAO.2022.V13I02.078-086>
- Ahmad, S. (2022). *Editorial Journalism and Human Development: An Analysis of Editorial Contents of Mainstream Pakistani Newspapers*. Dissertation. University of Bremen.

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., & Khdhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6. <https://doi.org/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949916X25000222>
- Ahmed, S., & Matthes, J. (2017). Media Representation of Muslims and Islam From 2000 to 2015: A Meta-Analysis. *The International Communication Gazette*, 79(3), 219–244. <https://doi.org/10.1177/1748048516656305>
- Ainani, M., & Yudiansyah, F. (2025). Beyond Objectivity-Bias Dichotomy: Media Framing as Soft Power Mechanism in International Conflict. *Kajian Jurnalisme*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkj.v9i1.59844>
- Aktari, A. A. (2025). Analyzing Political Bias in Mainstream Media: Impact on Public Perception and Democracy. *INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION JOURNAL (ISSEJ)*, 3(1). <https://doi.org/10.61424/issej>
- Almahallawi, W., & Awais, I. A. (2025). Framing news in the time of war: A comparative study between international and regional televisions. *SEARCH Journal of Media and Communication Research*, 17(4). <https://doi.org/10.58946/search-Special Issue.ICIMaC2024.P11>
- Ansori, S., Hidayah, J., & Zain, A. R. (2024). ATTITUDE AND IDEOLOGY IN MEDIA REPORTING: A CASE STUDY OF KOMPAS'S COVERAGE OF THE FREE NUTRITION MEALS PROGRAM. *Linguists*, 10(2). <https://doi.org/10.29300/ling.v10i2.4616>

- Arslan, E. (2024). Media Framing of Conflict: Exploring Its Influence on International Perception in Turkey. *Journal of International Relations*, 4(2). <https://doi.org/10.47604/jir.2599>
- Arslan, S. (2025). The Importance of Gaining Public Support in The Success of Foreign Policy. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(45), 409–432. <https://doi.org/10.29228/TIDSAD.81846> This
- Asad, M., & Irfan, M. (2024). *Public Diplomacy in the 21st Century: Building Trust in an Era of Misinformation*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29608.48649>
- Assefa, A. (2024). Navigating the Digital Media: The Role of Media in Public Diplomacy and International Relations. In A. B. Basnur (Ed.), *MEDIA AND PUBLIC DIPLOMACY FOR INTERNATIONAL CONNECTIVITY*. Paramedia Komunikatama.
- Atish, N. (2024). Influential Factors in Media Credibility. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, 9(9). <https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n09.011>
- Baccino, L. (2025). *Media Biases and Two-Sided News Markets/ : Audience, Advertising, Reputation and Platform Governance*. Dissertation. Université Côte d’Azur. <https://theses.hal.science/tel-05545290v1/file/2025COAZ0032.pdf>
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2009). *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Cengage Learning Asia.
- Barnard, S. R. (2018). *The Journalistic Field in a Time of Mediatization. In Citizens at the Gates*. Springer International Publishing.

- Belair-Gagnon, V., Zamith, R., & Holton, A. E. (2020). Role Orientations and Audience Metrics in Newsrooms: An Examination of Journalistic Perceptions and their Drivers. *Digital Journalism*. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1709521>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. Penguin Books.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan LP3ES. LP3ES.
- Besman, A., Hidayat, D. R., & Saputra, S. J. (2025). The Antagonist Visual Framing of Soekarno in Kompas Daily's 1966 Photo Selection. *Kajian Jurnalisme*, 09(1). <https://doi.org/10.24198/jkj.v9i1.53730>
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. In *APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological* (pp. 55–71).
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Christou, P. A. (2023). How to use thematic analysis in qualitative research. *Journal of Qualitative Research in Tourism*. <https://doi.org/10.4337/jqrt.2023.0006>
- Couldry, N. (2003). *Media Rituals. A critical approach*. Routledge.
- Damstra, A., Lindgren, E., Vliegthart, R., Boomgaarden, H., Stromback, J., & Tsfati, Y. (2026). In the Brand We Trust? The

Moderating Role of Journalistic Values and News Topics in the Relation Between News Source and Trust in News. *Journalism*, 27(6), 1650–1670. <https://doi.org/10.1177/14648849251350374>

Dodds, T., Vreese, C. de, Helberger, N., Resendez, V., & Seipp, T. (2023). Popularity-Driven Metrics: Audience Analytics and Shifting Opinion Power to Digital Platforms. *JOURNALISM STUDIES*, 24(3), 403–421. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2167104>

Efendi, E., Siregar, M. H., Hasan, A., & Dalimunthe, A. (2024). Framing Media Republika Dan Kompas Terhadap Konflik Palestina Dan Israel. *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 2(2). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol>

Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11. *Political Communication*, 20(4), 415–432. <https://doi.org/10.1080/10584600390244176>

Fadeji, J. A., Aluko, A. J., & Hamzat, F. O. (2025). Shadows of Truth: Media Framing, Agenda-Setting, and the Commodification of Reality through Classical Philosophical Paradigms. *KASHERE JOURNAL OF POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS*, 3(1), 165–178. <https://journals.fukashere.edu.ng/index.php/kjpir/article/view/428>

Fadlillah, S., & Komarudin, U. (2026). Prabowo’s Independent Active Foreign Policy on Palestine and Its Global Implications. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 11(1), 1–12. <https://journal.unpad.ac.id/wacanapolitik/vol11/iss1/1/>

- Fauzulhaq, G., & Harwinda, A. (2025). Diplomasi dalam Bingkai Media: Analisis Framing Pemberitaan Keanggotaan Indonesia di BRICS. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH*., 9(4). <https://doi.org/DOIhttps://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2134-2144>
- Hågvar, Y. B., Hornmoen, H., & Alnæs, J. (Eds.). (2026). *Narrative Theory in Journalistic Practice*. Routledge. https://www.academia.edu/145271996/Narrative_Theory_in_Journalistic_Practice
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Granit.
- Hanitzsch, T., & Vos, T. P. (2018). Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life. *Journalism*, 19(2), 146–164. <https://doi.org/10.1177/1464884916673386>
- Hkikmat, M. M., & Komara, E. (2024). Indonesian Media Coverage of G20 Summit: Implications for Students Knowledge. *The Seybold Report Journal*, 19(3), 42–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10843347>
- Humanes, M.-L., Alcolea-Díaz, G., López-del-Ramo, J., & Mellado, C. (2023). Performance of journalistic professional roles in digital native media news in Spain: Toward a journalistic micro-culture of its own. *Profesional de La Información*, 2. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.25>
- Iskandar, D. (2017). *Representasi Ideologi Kekuasaan Dalam Konvergensi Media (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2014 di Kompas Grup, Media Grup, dan MNC Grup)*. Disertasi. Universitas Padjadjaran.

- Juidah, I., & Pratiwi, V. U. (2025). CNN Indonesia's Framing Strategy in Influencing Public Opinion. *Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 5(1). <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2025.21607>
- Karim, M. F. (2021). Role Legitimation in Foreign Policy: The Case of Indonesia as an Emerging Power under Yudhoyono's Presidency (2004–2014). *Foreign Policy Analysis*. <https://doi.org/10.1093/fpa/orab010>
- Khan, R., Ullah, S., Sulima, M., & Naveed, M. S. (2024). US-CHINA STRATEGIC COMPETITION AND THE INEVITABLE THUCYDIDES TRAP. *Trends in Social Sciences and Humanities Research*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.61784/tsshr3054>
- Kristensen, L. M., & Bro, P. (2024). News Values in a Digital Age Intra-Media, Inter-Media, and Extra-Media Platforms. *Journalism*, 25(4), 819–836. <https://doi.org/10.1177/14648849231165855>
- Mahr, D., Bussoletti, A., Coenen, C., Comunello, F., Baniukeviè, J., & Weinberger, N. (2025). Science Journalists and Public Trust: Comparative Insights from Germany, Italy, and Lithuania. *Journal of Science Communication*, 24(05), 1–25. <https://doi.org/10.22323/14922025081811637>
- Maksum, A. (2025). Representing National vs Personal Agenda: Media Framing of Indonesia's G20 Presidency in 2022. *International Organisations Research Journal*, 20(2). <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2025-02-06>.
- Martha, J., Harsawaskita, A., Syawfi, I., & Margono, V. T. (2022). Analisis Framing: Pemberitaan Media Massa Mengenai Kebijakan

Luar Negeri Indonesia dalam Menanggapi Rivalitas Amerika Serikat dan China (2019-2022). *Dinamika Global*, 7(2). <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1070>

Masduki, A., Jian, L., & Niu, P. (2023). Media Views in Indonesia on the Belt and Road Initiative Policy/ : A Study of Indonesian New Media Reports to the BRI Project of China in Indonesia. *International Journal of Communication and Society*, 5(1), 16–28. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v5i1.1019>

Mast, J., & Temmerman, M. (2021). What’s (The) News? Reassessing “News Values” as a Concept and Methodology in the Digital Age. *JOURNALISM STUDIES*, 22(6), 689–701. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1917445>

Medina, A. R., Darmawan, W. B., & Yulianti, D. (2025). Foreign Policy of the Republic of Indonesia in the Palestine-Israel Conflict from a Normative Theory Perspective. *Ilomata International Journal of Social Science*, 7(1), 127–142. <https://doi.org/10.61194/ijss.v7i1.1897>

Mellado, C., Humanes, M. L., Scherman, A., & Ovando, A. (2018). Do Digital Platforms Really Make a Difference in Content? Mapping Journalistic Role Performance in Chilean Print and Online News. *Journalism*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/1464884918792386>

Mukhroman, I., & Haryanti, E. (2025). Framing Banten’s north coastal sea fence as eco-theology and social movement. *IJNi: International Journal of Nusantara Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ijni.v13i2.45628>

Mukhroman Iman, & Fathony, I. I. (2025). Banten Coastal Sea Fence: Media Framing and the Potential for Socio- Religious

- Movements. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 18(2). <https://journals.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/7843/3489>
- Mulyana, D. (2024). *Teori-Teori Komunikasi. Aplikasi dan Praktis*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). IDEOLOGI MEDIA DAN FRAMING PADA PEMBERITAAN PERUSAKAN RUMAH IBADAH DI KOMPAS DAN REPUBLIKA. *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2). <https://www.neliti.com/publications/481391/ideologi-media-dan-framing-pada-pemberitaan-perusakan-rumah-ibadah-di-kompas-dan>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/DOI: 10.1177/16094069231205789>.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media* (edisi ke-7).
- Nugraha, A. (2022). *Indonesia's Foreign Policy in the Making of Regional International Society in Southeast Asia*. Dissertation [Flinders University]. [https://flex.flinders.edu.au/file/332d31a1-787a-4ad8-a9fe-50e65f24e6f4/1/Aryanta Nugraha Thesis .pdf](https://flex.flinders.edu.au/file/332d31a1-787a-4ad8-a9fe-50e65f24e6f4/1/Aryanta%20Nugraha%20Thesis.pdf)
- Pangestu, A., & Putri, S. A. R. (2022). Pola Pemberitaan Media Online Kompas.com dalam Pelaporan Serangan Terorisme di Indonesia 2016-2020. *Kajian Jurnalisme*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.34429>

- Paun, M. (2022). Mediatizing and Framing the Centennial Year. Comparative Study between Government's Communication and Media's Social Construction of Reality. *Journal for Social Media Inquiry*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18662/jsmi/4.1/24>
- Pearson, H., Myall, M., Darlington, A.-S., & Gibson, F. (2025). The approach and application of analysing inductive and deductive datasets: a worked example using reflexive thematic analysis. *QUALITATIVE RESEARCH IN PSYCHOLOGY*, 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14780887.2025.2499265>
- Psychari, E. E. (2025). *Designing the Future Newsroom: Using Human-Centred Design for Audience— Oriented Innovation in Four Leading Legacy Newspapers. Implications for Journalism. Dissertation.* School of Communications Dublin City University. <https://doras.dcu.ie/30665/1/EiriniEvangeliaPsychari.phdthesis.pdf>
- Purwanti, C., Suandi, I. N., Sudiana, I. N., & Dewantara, I. P. M. (2025). Critical Discourse Analysis (CDA) Using Teun A. van Dijk's Model on the "Kabur Aja Dulu" Hashtag in the Kompas.com News Channel. *International Journal of Multilingual Education and Applied Linguistics*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/ijmeal.v2i2.337>
- Putra, B. A. (2025). Prabowo and The Shifts in Indonesia's Contemporary Foreign Policy: Unboxing a Leader's Operational Code. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2545580>

- Rahmadan, Y., & Setiawati, S. (2021). A FRAMING ANALYSIS OF
INDONESIAN NEWSPAPER COVERAGE ON THE ISSUE OF PALM
OIL DISCRIMINATION BETWEEN INDONESIA AND THE
EUROPEAN UNION. *Journal of International Studies*, 17. [https://
e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/en/issue/view/580](https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/en/issue/view/580)
- Redeker, D., Neut, B. van der, Sturm, I., & Cohausz, F.-S. (2026).
Public Opinion Potential: Rethinking Public Preferences and
Great Power Alignment in Small and Medium Powers.
International Affairs, 102(2), 677–703. [https://doi.org/10.1093/ia/
iaf277](https://doi.org/10.1093/ia/iaf277)
- Rusadi, U. (2015). *Kajian Media. Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori
dan Metode*. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, A. (2019). PERAN MEDIA MASSA DALAM POLITIK LUAR
NEGERI: KASUS DI INDONESIA. *MANDALA Jurnal Hubungan
Internasional*, 2(1). [https://ejournal.upnvj.ac.id/JM/article/view/
994/659](https://ejournal.upnvj.ac.id/JM/article/view/994/659)
- Setiawati, S. M., & Roziqin, A. (2024). New Trends of Indonesia's
Foreign Policy Under President Joko Widodo in The First Period.
Technium Social Sciences Journal, 54. [https://doi.org/10.47577/
tssj.v54i1.10554](https://doi.org/10.47577/tssj.v54i1.10554)
- Shin, S. Y., & Miller, S. (2025). News Engagement Process Model:
Theorization of Audience and Journalist Interactions.
International Journal of Communication, 19. [https://ijoc.org/
index.php/ijoc](https://ijoc.org/index.php/ijoc)
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the Message in
the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. Routledge.

- Simatupang, H. Y., & Panggabean, M. R. (2022). The Implementation of Indonesia's Free and Active Foreign Policy Over the Russia-Ukraine War During Indonesia's G20 Presidency. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_49
- Siregar, R. K., Karlinah, S., Maryani, E., & Sjachro, D. W. (2026). *Konstruksi Nilai-Nilai Kepemimpinan Hasta Brata dalam Rubrik "Sang Pamomong" pada Surat Kabar "Suara Merdeka" Semarang (Studi Kasus Rubrik "Sang Pamomong" pada Media Lokal "Suara Merdeka" Semarang Berbasis Teori Pierre Bourdieu)*. Disertasi. Universitas Padjadjaran.
- Soroka, S. N. (2003). Media, Public Opinion, and Foreign Policy. *Press/Politics*, 8(1). <https://doi.org/DOI:10.1177/1081180X02238783>
- Subarkah, A. A., & Arviani, H. (2026). Analisis framing pemberitaan ijazah palsu Jokowi di CNN Indonesia dan Republika (periode April-Mei 2025). *Jurnal Komunikasi Universitas Garut/ : Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 12(1). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/43605/3106>
- Sudibyo, A. (2009). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. LKiS.
- Sunarto, N. N., & Zulfa, L. (2025). Analisis Framing dan Etika Penyiaran terhadap Representasi Pesantren dalam Tayangan Xpose Uncensored Trans7. *Konsensus/ : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(5). <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i5.1257>

- Theine, H., Bartsch, J., & Troger, M. (2025). Does Media Ownership Matter for Journalistic Content? A Systematic Scoping Review of Empirical Studies. *International Journal of Communication*, 19, 865–888. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/issue/view/21>
- Truyens, P., & Picone, I. (2021). Audience Views on Professional Norms of Journalism. A Media Repertoire Approach. *Journalism and Media*, 2, 258–274. <https://doi.org/10.3390/journalmedia2020015>
- Tumiwa, I. C. E., & Erik Akmal. (2026). Media Framing Analysis of President Prabowo Subianto’s Decision to Join the Board of Peace. *JISS (Jurnal Indonesia Social Sains)*, 7(4). <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/2308/2822>
- Valiè, T. B., Ronèevia, B., & Tomšič, M. (2023). How Media Pluralism Navigates Ideological Orientations: The Case of Slovenia. *Frontiers Communication*, 8. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1143786>
- Wang, Y., Sannusi, S. N., & Kadir, S. A. (2024). News Framing of the 2022 Russian-Ukrainian Conflict: A Comparative Analysis of CNN (USA) and CCTV (China) from a War and Peace Journalism Perspective. *E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities*, 21(4). <https://doi.org/doi.org/10.17576/ebangi.2024.2104.28>
- West, R., & Turner, L. H. (2017). *Introducing Communication Theory. Analysis and Application* (5th. Terje). Salemba Humanika.
- Widyadhana, R. D., Sandy, F., & Susanti, D. (2025). Framing analysis of Republika and BBC news Indonesia on the conflict of Palestine - Israel. *6th Borobudur International Symposium on Humanities*

and Social Science (BIS-HSS) 2024, 2. <https://www.researchgate.net/journal/BIS-Humanities-and-Social-Science-3089-7025>

Wijayanto, & Masduki. (2023). Polite Watchdog”: Kompas and Watchdog Journalism in Post-Authoritarian Indonesia. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2). https://www.researchgate.net/publication/373541408_Polite_Watchdog_Kompas_and_Watchdog_Journalism_in_Post-Authoritarian_Indonesia?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNoUGFnZSI6InB1YmxpY2FoZW9uliwicGFnZSI6InNIYXJjaCIsInBvc2l0aW9uljoicGFnZUhlYWRLciJ9fQ

Yýlmaz, Ö. (2025). *Digital Journalism. Transformations, Challenges, and Innovations*. WriteUp.

Zahidi, S. (2026). *The Global Risks Report 2026*. <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2026/digest/>

Zaklama, S. (2025). Exploring the Foundations of Media Framing Theory. *European Modern Studies Journal*, 9(1), 75–89. [https://doi.org/10.59573/emsj.9\(1\).2025.7](https://doi.org/10.59573/emsj.9(1).2025.7)

Zink, F. M. Al. (2019). Diplomatic Communication. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)*, 8(9), 53–59. [https://ijbmi.org/papers/Vol\(8\)9/Series-2/Ho809025359.pdf](https://ijbmi.org/papers/Vol(8)9/Series-2/Ho809025359.pdf)

Website

[https://www.antaranews.com/berita/5418990/presiden-prabowo-bertolak-ke-washington-dc-untuk-bertemu-trump\)](https://www.antaranews.com/berita/5418990/presiden-prabowo-bertolak-ke-washington-dc-untuk-bertemu-trump)

<https://hidayatullah.or.id/keterlibatan-indonesia-dalam-board-of-peace-berisiko-lemahkan-komitmen-terhadap-palestina/>

<https://news.republika.co.id/berita/p1v2i7453/liputan-khusus-25-tahun-republika>

.....

Tentang Penulis



Dr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom., lahir di Jakarta. Anak dari pasangan Bapak H. Mara Laut Amin Siregar dan Ibunda Hj. Nurhaida Pulungan. Penulis menikah dan memiliki dua anak.

Penulis lulusan Ilmu Jurnalistik- Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta pada tahun 1993. Lulus dari program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun 2015 dengan predikat: *The Best Student*. Lulus dari Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada bulan Februari 2026 dengan predikat: Sangat Memuaskan.

Penulis adalah Dosen Favorit dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun 2022. Dosen Terbaik Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur tahun

2018. Penerima Hibah Riset dari Kemenristek Dikti untuk skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2017. Penerima Hibah Riset dari Kemenristek Dikti untuk skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2019. Penerima Hibah Pengabdian Masyarakat dari Kemenristek Dikti untuk Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tahun 2018.

Penulis sebagai reporter di ‘Harian Pos Kota’ (1994-2020). Sejak 2008 hingga sekarang, penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif (FKDK) Universitas Budi Luhur. Sambil bergiat di kampus, penulis aktif berorganisasi dan menjadi anggota di berbagai organisasi: Persatuan Dosen Republik Indonesia (2022-2025), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (2019), Asosiasi Dosen Indonesia (2019), serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) (1994-2020).

Sebagai akademisi, penulis aktif meneliti dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di berbagai jurnal. Penulis pada tahun 2018 menerbitkan Buku Jurnalisme Warga “HOT” (Hiburan, Objektif dan Terpercaya): Teori dan Praktik (2018) sebagai luaran dari PKM Hibah Kemenristek Dikti. Pada Juni 2026, penulis menerbitkan buku berjudul “Media, Budaya Jawa & Kepemimpinan Konstruksi Kepemimpinan Hasta Brata pada Era Kontemporer”.

Penulis dapat dihubungi melalui rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id. atau melalui nomor 0812-8877-7675



Suwarno, S.Sos., M.I.Kom., lahir di Klaten pada tanggal 22 Juni 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Budi Luhur dan S2 di Universitas Mercu Buana. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Budi Luhur dan juga diberikan kepercayaan oleh Yayasan Budi Luhur sebagai Kepala Bagian Keamanan. Selain mengajar, penulis juga aktif berorganisasi dengan penga-

laman mulai dari pengurus Saka Bhayangkara, Ketua Paguyuban, Bendahara Paguyuban, Bendahara Pemuda Pancasila tingkat ranting, dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui suwarnow663@gmail.com atau melalui nomor 0812-8388-1617



Mulyati, S.I.Kom., M.I.Kom., lahir di Ponorogo pada tanggal 6 Januari 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 (Ilmu Komunikasi) di Universitas Budi Luhur pada 2007 dan pendidikan S2 (Ilmu Komunikasi) di Universitas Mercu Buana pada 2016.

Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, penulis menjadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, mengampu matakuliah Komunikasi Antar Budaya, Komunikasi Organisasi dan Kelompok serta Komunikasi Organisasi. Selain menjadi dosen, penulis juga dipercaya menjadi Dosen Penasehat Akademik, Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan, Dosen Pembimbing Tugas Akhir, dan sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir.

Penelitian yang sudah dilakukan: *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Mahasiswa untuk Memilih Program Studi ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur* (2019); *Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa (Studi tentang Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa Etnis Sunda dan Mahasiswa Etnis Jawa di Universitas Budi Luhur)* (2021); *The Sensation of Children’s Song Animation as One of The Electronic Literature and also the Creative Economy Product, The Study of: “Sikat Gigi by Budi dan Lulu and “Gosok Gigi” by Upin & Ipin* (2022); *The Role of The Villain as A Determinant of The Existence of The Main Character* (2023); dan *Strategi Humas PT KCIC dalam Membangun Kereta Cepat Woosh Jakarta–Bandung* (2025).

Selain aktif mengajar dan meneliti, penulis juga aktif mempublikasikan hasil penelitiannya (sejak 2023 hingga kini) di berbagai jurnal nasional dan terlibat dalam berbagai program Pengabdian kepada Masyarakat (sejak 2020 hingga kini).

Penulis dapat dihubungi melalui mulyati@budiluhur.ac.id atau melalui nomor 0813-1626-5834

Indonesia

dalam *Board of Peace*

Perspektif Media, Diplomasi Perdamaian, & Kontroversi

Perdebatan mengenai keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* berkembang melalui berbagai pemberitaan media yang memberi penekanan dan representasi berbeda. Perbedaan tersebut secara tak langsung memperlihatkan bahwa konstruksi makna dalam pemberitaan dipengaruhi oleh praktik jurnalistik, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis yang menjadi landasan masing-masing media dalam merepresentasikan realitas.

Berpijak dari fenomena tersebut, buku ini menawarkan pemahaman mengenai proses konstruksi realitas media dengan mengintegrasikan analisis tematik, analisis *framing* Robert Entman, perspektif *hierarchy of influences*, dan teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann. Integrasi ini menghasilkan model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara tema-tema yang teridentifikasi dalam teks, pembingkaihan isu, konteks produksi berita, serta representasi realitas dalam pemberitaan keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace*.

Model konseptual yang dikembangkan dalam buku ini menjadi dasar refleksi dalam menelaah dinamika pemberitaan tentang *Board of Peace* dan bagaimana media membentuk pemahaman publik mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia. Refleksi ini didasarkan realitas empiris bahwa suatu peristiwa bisa disajikan dengan penekanan dan sudut pandang berbeda oleh media yang berbeda. Perbedaan ini kemudian memunculkan pertanyaan: *apakah pemberitaan merupakan representasi atas fakta, atau lebih dipengaruhi oleh kebijakan redaksional, orientasi ideologis, dan proses konstruksi di ruang redaksi?*

